



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025-2029



RPJMD



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.

13. Program ...

13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini untuk menyediakan dokumen yang menjabarkan dan memberikan gambaran umum tentang rencana Pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan metode dan pendekatan kerangka fikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. menetapkan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029;
 - b. menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Daerah selama tahun 2025-2029; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan daerah sekitar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

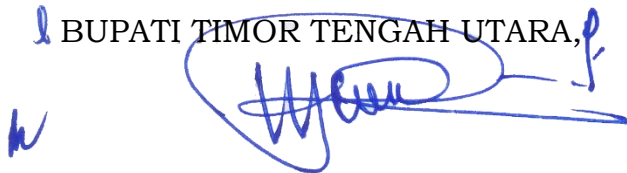
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025
NOMOR 3 TAHUN 2025
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA: 03/2025

PENJELASAN ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan disusun dan ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui berbagai tahapan dan proses yang melibatkan identifikasi, penyusunan, dan pengorganisasian berbagai kegiatan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan diperlukan. Penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari hasil analisis situasi yang mendalam berdasarkan identifikasi masalah yang ada, sumber daya yang tersedia, dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Perencanaan pembangunan yang baik dan dapat diukur adalah perencanaan yang tidak hanya mencakup langkah- langkah yang jelas dan terstruktur, tetapi juga dapat dievaluasi dan dipantau untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah. Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan RPJPD, serta RTRW Daerah lain.

Penyusunan RPJMD meliputi 6 (enam) tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perumusan rancangan akhir dan penetapan RPJMD. Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up dan top down*. Selain itu digunakan pula pendekatan yang berorientasi pada substansi, meliputi: tematik-holistik, integratif dan spasial. Dalam hal ini kebijakan pembangunan diprioritaskan pada pelaksanaan tema tertentu yang bersifat menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir untuk suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki kedudukan yang strategis. RPJMD ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 yakni Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP,MA dan Kamilus Elu, SH hasil pemilihan Tanggal 27 November 2024 dan dilantik Tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. Penyusunan Dokumen ini juga mempedomani RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara dan terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pencapaian tujuan berkelanjutan. RPJMD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Timor Tengah Utara setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 153.

LAMPIRAN ...



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

i

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

**ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-24
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-40
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-52
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-64
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-66
2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024	II-66
2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-68
2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030	II-70
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-73
2.3.1 Permasalahan	II-73
2.3.2 Isu Strategis	II-86
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1 Visi dan Misi	III-1
3.1.2 Tujuan dan Sasaran	III-5
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-10
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	III-10
3.2.2 Program Prioritas Daerah	III-29
3.2.3 Keselarasan Asta Cita Nasional, Dasa Cita Prov.NTT dan Sapta Cita Kab.TTU	III-43
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.1.1 Program dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-47
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	IV-47
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah	IV-47
BAB V PENUTUP	V-1



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kab.TTU	II-2
Tabel 2. 2	Produksi Perkebunan di Kab.TTU Tahun 2021-2024.....	II-6
Tabel 2. 3	Produksi Tanaman Sayur di Kab.TTU Tahun 2021-2024 (kuintal)	II-7
Tabel 2. 4	Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara 2021-2024 (kg)	II-9
Tabel 2. 5	Populasi Ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 (ekor)	II-9
Tabel 2. 6	Produksi Perikanan Tangkap di Kab.TTU Tahun 2019-2022	II-12
Tabel 2. 7	Data Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024	II-13
Tabel 2. 8	Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kab.TTU	II-14
Tabel 2. 9	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Wilayah Kab.TTU, Tahun 2020-2024	II-21
Tabel 2. 10	Jumlah kategori miskin ekstrem di Kab.TTU Tahun 2024, Desil 1-4.....	II-26
Tabel 2. 11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (persen) di Kab.TTU Tahun 2020– 2024	II-27
Tabel 2. 12	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Persentasenya di Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2. 13	Persentase Tenaga Kerja Formal yang Sudah/Belum Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan	II-36
Tabel 2. 14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kab.TTU Tahun 2021-2024.....	II-38
Tabel 2. 15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU Tahun 2020-2024.....	II-42
Tabel 2. 16	Status Indeks Desa Membangun Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2. 17	Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2. 18	Indeks Daya Saing Daerah Kab.TTU Tahun 2022-2024.....	II-58
Tabel 2. 19	Proporsi Kontribusi PDRB Kab.TTU Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2. 20	Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2. 21	Realisasi Capaian SPM Berdasarkan Kategori Indeks Pencapaian SPM Tahun 2022-2024.....	II-65
Tabel 2. 22	Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024.....	II-67
Tabel 2. 23	Neraca Daerah Kabupaten TTU Tahun 2020-2024	II-69
Tabel 2. 24	Proyeksi Keuangan Kab.TTU tahun 2026-2030	II-72
Tabel 2. 25	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kab.TTU tahun 2026-2030	II-73
Tabel 2. 26	Pelingkupan Isu Strategis KLHS RPJMD Kab.TTU Tahun 2025 2029.....	II-94
Tabel 2. 27	Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kab.TTU Tahun 2025-2029	II-95
Tabel 3. 1	Sasaran Visi Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2029	III-3
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029	III-8
Tabel 3. 3	Strategi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029	III-10
Tabel 3. 4	Penahapan Pembangunan RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2029..	III-11
Tabel 3. 5	Lokus Pengembangan Daerah	III-12
Tabel 3. 6	Kawasan Hutan Produksi menurut Kecamatan	III-13
Tabel 3. 7	Potensi Pengembangan Komoditi Perkebunan	III-13
Tabel 3. 8	Potensi Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan	III-14



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

iii

Tabel 3. 9	Potensi Pengembangan Komoditi Tanaman Buah-Buahan	III-15
Tabel 3. 10	Potensi Pengembangan Komoditi Tanaman Sayur	III-16
Tabel 3. 11	Potensi Pengembangan Komoditi Tanaman Biofarmaka.....	III-17
Tabel 3. 12	Potensi Pengembangan Peternakan	III-17
Tabel 3. 13	Data Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara.....	III-19
Tabel 3. 14	Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kabupaten Timor Tengah Utara.....	III-20
Tabel 3. 15	Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029	III-24
Tabel 3. 16	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029.....	III-30
Tabel 3. 17	Keterkaitan SAPTA CITA (Kab. TTU), DASA CITA (Prov. NTT) dan ASTA CITA Nasional	III-44
Tabel 4. 1	Program dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 4. 2	Indikator Kinerja Utama	IV-47
Tabel 4. 3	Indikator Kinerja Daerah	IV-47
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Kunci	IV-51



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-6
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Timor Tengah Utara	II-2
Gambar 2. 2	Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-16
Gambar 2. 3	Presentase Rumah Tangga dengan akses Air Minum Layak Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-17
Gambar 2. 4	Indeks Ketahanan Pangan Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-17
Gambar 2. 5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2. 6	Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2. 7	Indeks Risiko Bencana Kab.TTU Tahun 2020-2024.....	II-20
Gambar 2. 8	Bencana di Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-20
Gambar 2. 9	Jumlah Penduduk Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-21
Gambar 2. 10	Komposisi Kependudukan menurut Kelompok Umur Tahun 2024	II-22
Gambar 2. 11	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kab.TTU Tahun, 2025-2029	II-23
Gambar 2. 12	Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kab.TTU Tahun 2025-2029	II-23
Gambar 2. 13	Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kab.TTU Tahun 2025-2029	II-23
Gambar 2. 14	Proyeksi Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2025-2029	II-24
Gambar 2. 15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-25
Gambar 2. 16	Presentase Penduduk Miskin Kab.TTU Tahun 2020-2024 ...	II-25
Gambar 2. 17	Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (Desil 1) Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-26
Gambar 2. 18	Pendapatan Perkapita Perduduk Kab.TTU Tahun 2020 – 2024	II-28
Gambar 2. 19	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-29
Gambar 2. 20	Grafik Indeks Gini Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-30
Gambar 2. 21	Indeks Pembangunan Manusia Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2. 22	Usia Harapan Hidup Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2. 23	Capaian Indeks Keluarga Sehat Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2. 24	Realisasi Prevalensi Stunting di Kab.TTU Tahun 2021-2024	II-33
Gambar 2. 25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-33
Gambar 2. 26	Indeks Pendidikan Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-34
Gambar 2. 27	Literasi dan Numerasi SD/Mi Kab.TTU Tahun 2021-2024 ..	II-35
Gambar 2. 28	Literasi SMP/MTs Kab.TTU, Tahun 2021-2024	II-35
Gambar 2. 29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2024	II-36
Gambar 2. 30	Indeks Ketimpangan Gender Kab.TTU Tahun 2020 – 2024...	II-39
Gambar 2. 31	Indeks Pembangunan Gender Kab.TTU Tahun 2020-2024 ...	II-40
Gambar 2. 32	Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-40
Gambar 2. 33	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-41
Gambar 2. 34	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kab.TTU Tahun 2020-2024.....	II-41



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

v

Gambar 2. 35	Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2. 36	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Perkapita Kab.TTU Tahun 2020-2024.....	II-43
Gambar 2. 37	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PRDB Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2. 38	Laju Pertumbuhan Kontribus PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-45
Gambar 2. 39	Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kab.TTU Tahun 2020-2024 (juta)	II-47
Gambar 2. 40	Ekspor Barang dan Jasa (Milliar) di Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2. 41	Nilai Investasi di Kab.TTU Tahun 2022-2024	II-48
Gambar 2. 42	Capaian Indeks Desa Membangun Kab.TTU Tahun 2021-2024	II-49
Gambar 2. 43	Capaian Indeks SPBE Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-53
Gambar 2. 44	Indeks Pelayanan Publik	II-54
Gambar 2. 45	Indeks Integritas Kab.TTU Tahun 2021-2023	II-54
Gambar 2. 46	Indeks Reformasi Birokrasi Kab.TTU Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2. 47	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.TTU Tahun 2020 – 2024.....	II-56
Gambar 2. 48	Jumlah Kerja Sama Antar Daerah Tahun 2021-2024.....	II-59
Gambar 2. 49	Realisasi Capaian SPM Tahun 2022-2024.....	II-65
Gambar 2. 50	Kinerja Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kab.TTU Tahun 2020- 2024	II-66
Gambar 3. 1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029.....	III-7



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

I-1

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan disusun dan ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui berbagai tahapan dan proses yang melibatkan identifikasi, penyusunan dan pengorganisasian berbagai kegiatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan diperlukan. Penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari hasil analisis situasi yang mendalam berdasarkan identifikasi masalah yang ada, sumber daya yang tersedia dan potensi yang dapat dimanfaatkan. Perencanaan pembangunan yang baik dan dapat diukur adalah perencanaan yang tidak hanya mencakup langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, tetapi juga dapat dievaluasi dan dipantau untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai secara efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. Selain itu, keberadaan sistem perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara secara teknis mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD meliputi 6 (enam) tahapan yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perumusan rancangan akhir dan penetapan RPJMD. Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan berorientasi proses meliputi teknokratik,



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

I-2

partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Selain itu digunakan pula pendekatan yang berorientasi pada substansi yakni tematik-holistik, integratif dan spasial. Dalam hal ini kebijakan pembangunan diprioritaskan pada pelaksanaan tema tertentu yang bersifat menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir untuk suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki kedudukan yang strategis. RPJMD ini merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 yakni **Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP,MA dan Kamilus Elu, SH** hasil pemilihan Tanggal 27 November 2024 dan dilantik Tanggal 20 Februari 2025 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. Penyusunan Dokumen ini juga mempedomani RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara dan terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pencapaian tujuan berkelanjutan. RPJMD akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga RPJMD ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Timor Tengah Utara setiap tahunnya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025- 2029 disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana terakhir diubah dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

I-3

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

I-4

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

I-5

- Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);
 - 32. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 134);
 - 33. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 145); dan
 - 34. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 149).

**1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara 2023-2043 dan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana proses penyusunannya dilakukan secara simultan. RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang ada dilingkup Kabupaten Timor Tengah Utara, antara lain KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD, hasil evaluasi Pembangunan lima tahun terakhir dan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang bersifat sektoral.

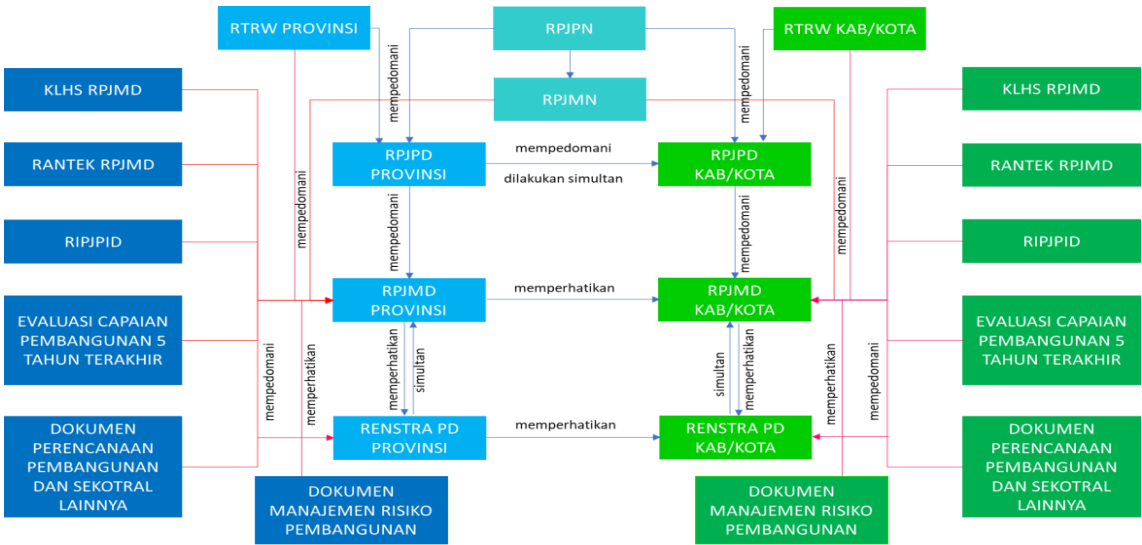
RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan setiap tahunnya. RPJMD selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan manajemen risiko level Kabupaten, sedangkan Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen risiko level perangkat daerah. Gambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

I-6

Gambar 1. 1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber: Imendagri nomor 2 tahun 2025

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD tahap pertama RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaen Timor Tengah Utara yakni

“Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”.

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan berdasarkan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Timor Tengah Utara dan menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen rencana Pembangunan jangka menengah daerah yang menjabarkan dan memberikan gambaran umum tentang rencana Pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara periode lima tahunan yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan metode dan pendekatan kerangka pikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 adalah:

- 1. Menetapkan tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2025-2029.
- 2. Menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

I-7

Kabupaten Timor Tengah Utara selama tahun 2025-2029.

3. Mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan daerah sekitar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Maksud dan Tujuan serta Sistematika RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing dan Aspek Pelayanan Umum, Standar Pelayanan Minimal dan Kerja Sama Daerah. Bab ini juga memuat Gambaran Keuangan Daerah yang mencakup penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis juga digambarkan dalam bab ini.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dan Program-program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan daftar program perangkat daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan Target Penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-1

**BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH**

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Timor Tengah Utara terletak di Pulau Timor—salah satu pulau besar di antara gugusan pulau dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah daratan dengan luas 2.615,90 km² atau sekitar 5,48% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagian utara wilayah Timor Tengah Utara yang berbatasan dengan Laut Sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantai utara (pantura), memiliki luas lautan ± 950 km² dengan panjang garis pantai ±50 km. Kabupaten TTU adalah salah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Ambenu-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi dalam 24 Kecamatan dan 193 kelurahan/desa (11 kelurahan dan 182 desa). Seluruh Ibu Kota Kecamatan dapat diakses menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kecamatan dengan jarak tempuh terjauh dan tersulit dari Kota Kefamenanu adalah Kecamatan Mutis dan Kecamatan Biboki Feotleu. Wilayah terluas adalah Kecamatan Biboki Anleu dengan luas 289,68 km² atau 11,07% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Wilayah terkecil adalah Kecamatan Musi dengan luas 40,44 km² atau 1,55% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel luas wilayah menurut kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara berikut ini:

**Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kab.TTU**

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa/ Kelurahan	No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Biboki Anleu	289,68	9	14	Insana Tengah	119,61	7
2	Biboki Feotleu	114,86	5	15	Insana Utara	136,74	5
3	Biboki Moenleu	148,03	7	16	Miomaffo Barat	118,67	13
4	Biboki Selatan	140,65	8	17	Miomaffo Tengah	59,38	6
5	Biboki Tanpah	60,55	4	18	Miomaffo Timur	83,25	11
6	Biboki Utara	63,97	10	19	Musi	40,44	6
7	Bikomi Nilulat	40,45	6	20	Mutis	188,1	4
8	Bikomi Selatan	135,36	10	21	Naibenu	99,75	4
9	Bikomi Tengah	44,81	9	22	Noemuti	134,31	12
10	Bikomi Utara	49,43	9	23	Noemuti Timur	53,03	4
11	Insana	252,83	17	24	Kota Kefamenanu	74,45	9
12	Insana Barat	91,78	12	Jumlah		2.615,90	193
13	Insana Fafinesu	75,77	6				

Sumber: Dokumen RPJPD Kab. TTU Tahun 2025-2045



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-2

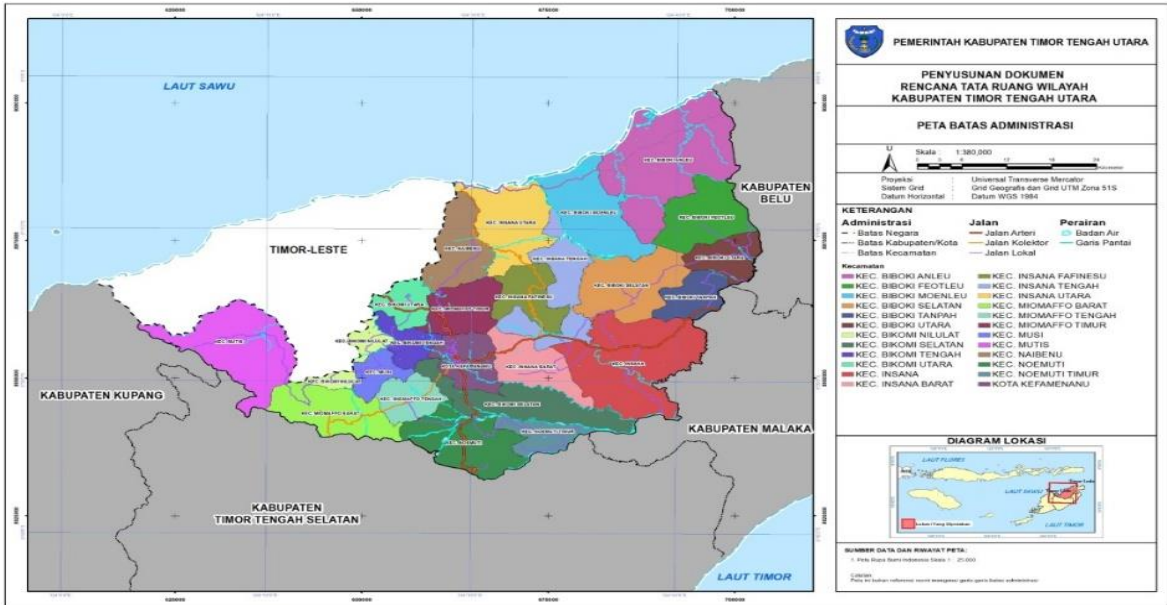
b) Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Timor Tengah Utara terletak diantara 9° 02' 48" - 9° 37' 36" Lintang Selatan (LS) serta antara 124° 04' 02" - 124° 46' 00" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara geografis pada umumnya merupakan tipologi desa daratan (182 desa/kelurahan) dan hanya 11 desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai yaitu: Desa Oepuah dan Oepuah Utara di Kecamatan Biboki Moenleu; Desa Humusu C, Humusu Oekolo dan Desa Oesoko di Kecamatan Insana Utara; Desa Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik dan Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu.

Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% meliputi areal seluas 2.065,19 km² atau 77,36 % dari luas wilayah TTU, sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22,64 % dengan kemiringan lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 % sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut yakni seluas 1.676,51 km² atau 62,80 %. Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain Alfisols, Entisol, Inceptisol, Mollisol dan Vertisol. Hasil perhitungan GIS Rencana Tata Ruang Wilayah memperlihatkan bahwa Tanah alfisol seluas 6.264,27 Ha dan tersebar di Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara dan Kecamatan Naibenu. Tanah entisol seluas 219.401,15 Ha dan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tanah Inceptisol seluas 9.766,52 Ha dan tersebar di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Tanpah dan Kecamatan Biboki Utara. Tanah mollisol seluas 25.714,85 Ha dan tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Noemuti Timur dan Kecamatan Kota Kefamenanu. Tanah vertisol seluas 443,14 Ha dan hanya terdapat di Kecamatan Noemuti Timur.

Ditinjau dari aspek letak wilayah, Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk salah satu kabupaten wilayah perbatasan karena berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi NTT, oleh karena itu perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Timor Tengah Utara



Sumber: Dokumen RTRW Kab. TTU .



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-3

c) Peran Strategis Daerah

Secara geostrategis, Kabupaten TTU ditetapkan sebagai kawasan perbatasan karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada dibagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia. Kawasan perbatasan Negara mencakup:

1. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
2. Kawasan perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste.
3. Kawasan perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
 - i. Kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
 - ii. Seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
4. Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut meliputi PKSN dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.

Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang termasuk kedalam kawasan perbatasan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis.

Berbagai potensi sumberdaya dapat dikembangkan pada kawasan perbatasan diantaranya, sektor pertanian, peternakan, ekonomi kerajinan tangan seperti Tenun, potensi pariwisata budaya serta potensi pariwisata bahari seperti Tanjung Bastian-Pantai Wini. Selain itu diperlukan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara seperti yang telah dilakukan berupa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan. Dalam konteks pengembangan sistem perkotaan skala nasional Kabupaten Timor Tengah Utara guna menunjang kegiatan strategis nasional pada kawasan perbatasan, maka ditetapkanlah Kota Kefamenanu sebagai perkotaan skala nasional yang berfungsi sebagai fungsi perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

B. Potensi Sumber Daya Alam

a) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu yang diperuntukan guna memenuhi keperluan masyarakat dan pengembangan industri dan ekspor. Selain itu, kawasan hutan produksi juga berfungsi sebagai perlindungan daerah resapan air.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Timor Tengah Utara didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 terdiri atas



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-4

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas kurang lebih 53.906 Ha terdapat di Kecamatan Naibenu, Kecamatan Musi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Insana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Foetleu dan Kecamatan Biboki Anleu.
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan luas kurang lebih 12.936 Ha terdapat di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Noemuti Timur, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Bikomi Selatan dan Kecamatan Biboki Anleu.

Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi terdiri atas:

- a. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak.
- b. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan.
- d. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
- e. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah.
- f. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
- g. Mengarahkan disetiap kawasan hutan produksi tetap, untuk membentuk hutan kota.

b) Kawasan Pergaraman

Garam merupakan komoditas penting dalam kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Produksi garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor garam. Pada dasarnya, dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia seharusnya mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan garam sendiri. Pengembangan usaha garam yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam perlu ditingkatkan. Kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki luas wilayah kurang lebih 124,50 Ha pada kawasan pantai utara dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk pengembangan lahan garam guna memasok bahan baku garam industri dari dalam negeri.

c) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di perkotaan dan perdesaan. Peruntukan kawasan permukiman haruslah mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan upaya tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Wilayah perkotaan merupakan kawasan yang digunakan sebagai pusat pergerakan berbagai kegiatan dengan aglomerasi penduduk dan intensitas penggunaan lahan untuk permukiman yang tinggi, serta ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana prasarana penunjang transportasi dan infrastruktur yang memadai. Wilayah perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki pusat pelayanan terkonsentrasi di sekitar Perkotaan Kefamenanu dan sekitarnya. Orientasi pergerakan penduduk cenderung mengarah ke pusat kota di mana pada wilayah ini terdapat fasilitas pendukung yang lengkap. Rencana pengembangan kawasan permukiman



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-5

perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara didapat berdasarkan hasil survey lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dengan luas kurang lebih 112.339 Ha yang terdapat di seluruh Kecamatan.

Pengelompokan lokasi permukiman perdesaan dilakukan dengan memperhatikan sawah irigasi, kebutuhan perumahan, penduduk perdesaan untuk masa yang akan datang dengan usahanya dan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas. Secara umum lokasi kawasan permukiman desa tersebar secara acak dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara mengikuti sumber produksi masyarakat setempat. Status kawasan permukiman desa adalah desa rural atau desa yang memiliki karakter atau ciri pedesaan dan pertanian yang masih kuat. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hasil survey lapangan dan hasil analisis kesesuaian lahan yang direncanakan dengan luas kurang lebih 5.425 Ha.

d) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan laut. Berdasarkan hasil survey dan hasil analisis kesesuaian lahan kawasan transportasi di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa kawasan Terminal ALBN ditetapkan dengan luas kurang lebih 10,13 Ha.

e) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

f) Kawasan Lindung

Pemanfaatan Lahan yang digunakan untuk tujuan Kawasan Lindung dapat dijabarkan sebagai berikut:

Badan Air

Badan air merupakan kumpulan air yang besarnya bergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, suhu, curah hujan dan kesasaran batuan pembendungannya. Badan air terdiri atas sungai, rawa, danau, laut dan samudra. Badan air dicirikan oleh tiga komponen utama yaitu komponen hidrologi, komponen fisika-kimia dan komponen biologi. Badan air di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 2.315 Ha terdapat di semua kecamatan. Upaya penanganan dan pengelolaan badan air yaitu:

1. Perlindungan badan air dalam kaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sekitar badan air.
2. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu.
3. Pengurangan hasil sedimen untuk mencegah banjir.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa kawasan hutan lindung. Kawasan tersebut bersifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitarnya dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan yang tidak dapat dialihkan peruntukannya.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-6

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat di Kecamatan Mutis.

Kawasan Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki Surat Keputusan terkait Cagar Budaya.

Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Manfaat dari ekosistem mangrove yaitu adalah sebagai mitigasi bencana dan menjadi obyek wisata alam dan atraksi ekowisata. Ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan, karena menjadi tempat berkembang biak.

g) Perkebunan Rakyat

Komoditi perkebunan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 2021-2024 terdiri dari Kelapa, Kopi, dan Tembakau sebagaimana termuat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 2
Produksi Perkebunan di Kab.TTU Tahun 2021-2024

Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau
Miomaffo Barat	2021	34	24	-
	2022	31,66	107	2,3
	2023	25,1	5	2,5
	2024	150	171	
Miomaffo Tengah	2021	16	13	-
	2022	16	13	2,25
	2023	14	5	2
	2024	91	75	12
Musi	2021	23	14	-
	2022	23	14	-
	2023	20	4	2
	2024	106	95	12
Mutis	2021	17	12	-
	2022	17	12	1,6
	2023	18,25	2	1
	2024	127	68	12
	2021	42	11	-

Kecamatan	Tahun	Kelapa	Kopi	Tembakau
Kota Kefamenanu	2021	33	8	-
	2022	33	-	-
	2023	30	-	-
	2024	303	4	
Insana	2021	55	8	-
	2022	55	-	-
	2023	51	-	-
	2024	330	10	
Insana Utara	2021	33	6	-
	2022	33	-	-
	2023	32	-	0,1
	2024	252	10	
Insana Barat	2021	39	3,6	-
	2022	39	-	-
	2023	35	-	0,1
	2024	152	11	
	2021	24	3	-



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-8

No	Kecamatan	Tahun	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Kentang	Kubis	Tomat	Bawang Putih	Petsai	Kacang Panjang
	Bikomi Nilulat	2022	2	-	-	9	-	-	-	1	5,00	-
		2023	1	-	-	5,4	1	-	4,75	1,25	4,00	-
		2024	1,5			0,9	1,5		0,9	0,5	2,8	
10	Bikomi Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Naibenu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	2,6	-	-	1,2	-	0,7	-
12	Noemuti Timur	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kota Kefamenanu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	2	-	4,00	24	-	-	-	1	14,00	4,00
		2023	0,4	-	-	104	-	5	48	-	7,00	19,00
14	Insana	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	3	4,00	25	-	5	-	-	9,00	6,00
		2023	-	12,8	6,20	9,2	-	-	8,4	-	-	33,60
15	Insana Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	2	-	62	-	-	-	-	5,00	5,00
		2023	2	6	-	58	-	-	12	-	-	1,00
16	Insana Barat	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	8	-	17	-	-	3,00	1,00
		2023	0,2	-	-	9,5	-	5,24	0,83	-	1,21	0,60
17	Insana Tengah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	40	-	-	-	-	114	-
		2023	-	-	-	-	-	55	-	-	145,7	-
18	Insana Fafinesu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
19	Biboki Selatan	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	1	-	-	-	-	7	-
		2023	-	3	3,4	-	-	-	-	-	-	1,00
20	Biboki Tanpah	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-
		2023	4	-	-	19,2	-	2	4	-	3	-
21	Biboki Moenleu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		2023	-	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-
22	Biboki Utara	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	6	-	-	-	-	-	-	-	255	-
		2023	17,4	-	-	4,6	-	-	2,01	-	1,7	-
23	Biboki Anleu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-
24	Biboki Feotleu	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2024										

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten TTU, 2022 dan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2025

Komoditi tanaman biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2021-2024 terdiri dari Jahe, Laos, dan Kencur. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-9

Tabel 2. 4
Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara
2021-2024 (kg)

No	Kecamatan	Tahun	Jahe	Laos	Kencur	No	Kecamatan	Tahun	Jahe	Laos	Kencur
1	Miomaffo Barat	2021	4.166,00	4.249,00	9.163,00	13	Kota Kefamenanu	2021	-	-	-
		2022	48	340	255			2022	17	3	-
		2023	7.738,00	3.064,00	10.263,00			2023	3	2	1
		2024	502	692	551			2024	30	20	22
2	Miomaffo Tengah	2021	876	-	-	14	Insana	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
		2024	-	-	-			2024	85	95	-
3	Musi	2021	-	-	-	15	Insana Utara	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	15	177	-
		2023	1.100,00	1.959,00	3			2023	100	93	-
		2024	-	1.959,00	-			2024	-	50	-
4	Mutis	2021	-	-	-	16	Insana Barat	2021	-	-	-
		2022	1.168,00	2.900,00	2.010,00			2022	121	164	53
		2023	2.236,00	2.332,00	1.474,00			2023	39	48	47
		2024	1.800,00	9	4			2024	-	-	-
5	Miomaffo Timur	2021	-	-	-	17	Insana Tengah	2021	-	-	-
		2022	2.600,00	80	139			2022	-	1.200,00	-
		2023	17.680,00	5.000,00	636			2023	400	-	-
		2024	1.000,00	-	100			2024	-	15	-
6	Noemuti	2021	58	40	-	18	Insana Fafinesu	2021	-	-	-
		2022	22	39	-			2022	-	-	-
		2023	44	68	-			2023	-	-	-
		2024	18	22	-			2024	-	-	-
7	Bikomi Selatan	2021	-	-	-	19	Biboki Selatan	2021	-	-	-
		2022	225	-	-			2022	-	-	-
		2023	475	-	-			2023	-	-	-
		2024	150	-	-			2024	-	-	-
8	Bikomi Tengah	2021	-	-	-	20	Biboki Tanpah	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
		2024	-	-	-			2024	-	-	-
9	Bikomi Nilulat	2021	2	2	-	21	Biboki Moenleu	2021	230	-	70
		2022	-	-	-			2022	30	50	20
		2023	-	-	-			2023	225	25	15
		2024	1000	-	-			2024	300	200	50
10	Bikomi Utara	2021	-	-	-	22	Biboki Utara	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	458	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
		2024	-	-	-			2024	-	-	-
11	Naibenu	2021	-	-	-	23	Biboki Anleu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	-	-	-
		2024	1200	1200	-			2024	-	-	-
12	Noemuti Timur	2021	-	3	-	24	Biboki Feotleu	2021	-	-	-
		2022	-	-	-			2022	-	-	-
		2023	-	-	-			2023	250	150	100
		2024	-	-	-			2024	-	-	-

Sumber : Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2024

h) Kawasan Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri atas sapi potong, Kuda, kambing dan Babi. Dalam kurun waktu 2020-2024 populasi ternak tertinggi di dominasi oleh ternak babi dengan jumlah populasi di tahun 2024 sebanyak 114.163 ekor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5
Populasi Ternak di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2020-2024 (ekor)

No	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)			Jumlah
			Sapi Potong	Kambing	Babi	
1	Miomaffo Barat	2020	5.517	130	2.963	8.821
		2021	5.557	163	3.197	9.161
		2022	-	167	3.293	3.460
		2023	-	179	3.524	3.703
		2024	-	193	3.806	3.999
2	Miomaffo Tengah	2020	2.144	508	1.480	4.142
		2021	216	589	1.594	2.411



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-10

No	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)			Jumlah
			Sapi Potong	Kambing	Babi	
		2022		606	1.622	2.228
		2023		648	1.736	2.384
		2024		700	1.875	2.575
3	Musi	2020	2.135	507	1.802	4.444
		2021	2.151	587	1.941	4.679
		2022		604	1.959	2.563
		2023		646	2.096	2.742
		2024		698	2.264	2.962
4	Mutis	2020	9.567	4.708	7.336	22.073
		2021	9.637	5.477	7.913	23.562
		2022		5.641	8.129	13.770
		2023		6.036	8.698	14.734
		2024		6.519	9.394	15.913
5	Miomaffo Timur	2020	4.885	1.940	3.601	10.484
		2021	4.921	2.249	388	7.625
		2022		2.316	3876	6.192
		2023		6.478	4147	10.625
		2024		2.676	4479	7.155
6	Noemuti	2020	4.974	684	3.752	9.436
		2021	501	793	4.041	5.365
		2022		816	4.167	4.983
		2023		873	4.453	5.326
		2024		943	4.809	5.752
7	Bikomi Selatan	2020	4.853	681	3.659	9.222
		2021	4.889	790	3.941	9.654
		2022		813	4.059	4.872
		2023		870	4.343	5.213
		2024		940	4.690	5.630
8	Bikomi Tengah	2020	2.305	819	1.378	4.502
		2021	2.322	948	1.484	4.754
		2022		976	1.529	2.505
		2023		1044	1.636	2.680
		2024		1128	1.767	2.895
9	Bikomi Nilulat	2020	2.450	864	1.952	5.266
		2021	2.468	1	2.102	4.571
		2022		1030	2.165	3.195
		2023		1102	2.317	3.419
		2024		1190	2.502	3.692
10	Bikomi Utara	2020	5.696	6.265	4.963	16.949
		2021	5.738	7.254	5.345	18.366
		2022		7.471	5.505	12.976
		2023		7.994	5.890	13.884
		2024		8.634	6.361	14.995
11	Naibeu	2020	2.852	1.751	3.116	7.723
		2021	2.873	2.027	3.356	8.261
		2022		2.087	3.427	5.514
		2023		2.233	3.667	5.900
		2024		2.412	3.960	6.372
12	Noemuti Timur	2020	3.995	133	1.662	5.790
		2021	4.024	154	179	4.357
		2022		158	1804	1.962
		2023		169	1930	2.099
		2024		183	2084	2.267
13	Kota Kefamenanu	2020	4.123	385	5.523	10.124
		2021	4.153	451	595	5.307
		2022		464	6119	6.583
		2023		496	6547	7.043
		2024		536	7071	7.607
14	Insana	2020	10.076	930	5.378	16.416
		2021	1.015	1.078	5.792	7.922
		2022		1.110	5.966	7.076
		2023		1.188	6.384	7.572
		2024		1.283	6.895	8.178
15	Insana Utara	2020	6.761	4.280	4.551	15.696
		2021	681	4.961	4.904	10.666



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-11

No	Kecamatan	Tahun	Peternakan (Ekor)			Jumlah
			Sapi Potong	Kambing	Babi	
		2022		5.121	5.501	10.622
		2023		5.479	5.886	11.365
		2024		5.917	6.357	12.274
16	Insana Barat	2020	5.982	1.331	3.835	11.164
		2021	6.026	1.542	413	8.000
		2022		1.588	4154	5.742
		2023		1.699	4445	6.144
		2024		1.835	4801	6.636
17	Insana Tengah	2020	6.589	1.347	3.120	11.100
		2021	6.637	1.562	3.361	11.611
		2022		1.608	3.412	5.020
		2023		1.721	3.651	5.372
		2024		1.859	3.943	5.802
18	Insana Fafinesu	2020	5.141	754	1.116	7.011
		2021	5.179	873	1.202	7.254
		2022		899	1.238	2.137
		2023		926	1.325	2.251
		2024		1039	1.431	2.470
19	Biboki Selatan	2020	7.493	2.528	5.047	15.281
		2021	7.548	2.939	5.441	16.175
		2022		3.027	5.604	8.631
		2023		3.239	5.996	9.235
		2024		3.498	6.476	9.974
20	Biboki Tanpah	2020	4.234	1.049	2.225	7.524
		2021	4.265	1.215	2.397	7.896
		2022		1.251	2.469	3.720
		2023		1.339	2.642	3.981
		2024		1.446	2.853	4.299
21	Biboki Moenleu	2020	9.290	4.251	6.074	19.634
		2021	9.358	4.922	6.542	20.844
		2022		5.069	6.718	11.787
		2023		5.424	7.188	12.612
		2024		5.858	7.763	13.621
22	Biboki Utara	2020	7.321	2.811	109	10.267
		2021	7.375	3.256	118	10.779
		2022			122	122
		2023			131	131
		2024			141	141
23	Biboki Anleu	2020	13.922	9.741	9.960	33.654
		2021	14.024	11.278	10.727	36.065
		2022		11.616	11.049	22.665
		2023		12.429	11.822	24.251
		2024		13.424	12.768	26.192
24	Biboki Feotleu	2020	4.354	1.065	1.734	7.163
		2021	4.386	1.233	1.868	7.499
		2022		1.269	1.924	3.193
		2023		1.358	2.059	3.417
		2024		1.467	2.224	3.691
Jumlah		2020	136.659	49.462	86.336	273.886
		2021	115.944	56.342	78.841	252.784
		2022	0	55.707	95.811	151.518
		2023	0	63.570	102.513	166.083
		2024	4.123	64.580	114.153	182.949

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

i) Kawasan Pertambangan dan Energi

Sejak tahun 2009 - 2021, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengeluarkan 47 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hingga tahun 2021 tersisa 46 perusahaan yang masih berstatus aktif melakukan kegiatan Operasi Produksi di Kecamatan Miomafo Utara, Bikomi Selatan, Miomaffo Timur, Biboki Anleu, Kota Kefamenanu, Biboki Moenleu, Miomafo Barat, Bikomi Niulat, Nikomi Tengah, Bikomi Utara, Noemuti, Insana, Biboki Tanpah, Biboki Feotleu, dan Miomafo Tengah, Berdasarkan data IUP di atas kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-12

kawasan pertambangan mineral dan energi dengan luas kuang lebih 13.467 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Musi, dan Kecamatan Naibenu.

j) Kawasan Pantai Utara

Kawasan Perikanan dan Penggaraman

Dalam kurun waktu 2019-2022, produksi perikanan tertinggi terjadi tahun 2020 sebanyak 847,775 ton. Jenis ikan dengan produksi tertinggi yaitu tembang sebanyak 1030,22 ton. Jenis ikan dengan produksi terendah yaitu kurisi sebanyak 4,6 ton. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6
Produksi Perikanan Tangkap di Kab.TTU Tahun 2019-2022

No	Perikanan	Produksi (Ton)				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Cakalang	2,1	2,25	2,2	0	6,55
2	Tongkol	142,3	192,2	150,3	192,2	677
3	Tembang	243,55	265,08	256,52	265,08	1030,22
4	Kombong	103,33	107,33	107,33	107,33	425,305
5	Layang	225,3	209,05	205,3	209,02	848,67
6	Cendro	16,81	16,88	15,8	0	49,485
7	Julung-Julung	11,3	10,3	10,3	0	31,9
8	Kerapu	1,5	1,28	1,47	0	4,24
9	Kurisi	1,35	1,875	1,38	0	4,6
10	Ekor Kuning	11,7	15,78	13,76	0	41,23
11	Ikan Lainnya	14,79	25,78	23,79	74,12	138,465
Jumlah		774,02	847,78	788,16	847,75	3257,67

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten TTU, 2022 dan Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, 2023

Kawasan Ekosistem Magrove

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 168 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu dan Kecamatan Insana Utara. Strategi untuk menjaga agar keseimbangan antara sumberdaya alam yang tersedia dengan kebutuhan yang terus meningkat, yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang didasarkan atas dasar kelestarian sumber daya alam, peningkatan manfaat ekonomi maupun ekologi agar kesejahteraan manusia juga meningkat. Di samping itu, perlu diupayakan peningkatkan pengelolaan hutan mangrove agar diperoleh nilai lingkungan dan nilai ekonomi yang seimbang, dengan mengupayakan rehabilitasi hutan yang telah rusak sebagai prioritas utama.

Reboisasi sebagai upaya rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak, pada dasarnya adalah untuk memulihkan fungsi ekologis ekosistem mangrove yang sangat besar artinya bagi kehidupan biota laut dan juga bagi manusia. Dalam pelaksanaan reboisasi selain bertujuan untuk memulihkan peran dan fungsi mangrove, proyek tersebut juga diharapkan agar masyarakat setempat yang terlibat memperoleh penghasilan, sehingga dapat menanggulangi masalah ekonomi keluarganya.

k) Kawasan Industri

Kegiatan industri di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengalami perkembangan yaitu Industri Kecil Menengah (IKM). Perkembangan tersebut terjadi karena IKM dibangun menggunakan modal relatif yang relatif kecil,



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-13

penggunaan teknologi yang masih terbatas, tenaga kerja berkisar 10-200 orang, pemasaran cenderung berskala lokal.

Jumlah IKM di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebanyak 675 unit yang terdiri dari 257 IKM Pangan dan 418 IKM Non Pangan. Kecamatan Kota Kefamenanu memiliki jumlah IKM tertinggi yaitu 160 unit. Kecamatan Naibenu dan kecamatan Biboki Feotleu memiliki jumlah IKM terendah yaitu 3 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7
**Data Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah IKM Pangan	Jenis IKM Pangan	Jumlah IKM Non Pangan	Jenis IKM Non Pangan
1	Kecamatan Kota Kefamenanu	81	Aneka Kripik, Aneka Cemilan, Aneka Kue, Aneka Kue Basah, Instan Kunyit, Abon Dendeng,Roti, Beras, Tahu,Tempe, Garam Yodium, Manisan, Tengteng, Donat dan Kacang, Kripik KCG Telur, Aneka Ceke, Kua Bahan Lokal, Emping Jagung, Gula Merah, Ferm Anggur Pisang, Sambal Lu'at, Kua Rambut, Abon, Cuka Apel, VCO, Abon Ikan, Pangan, Kacang Gurih, Air Isi Ulang, Minuman, Instan Kunyit	79	Beti, Tais, Selendang, Menjahit, Rajutan, Batu Bata, Mebel, Lemari, Tempat Tidur, Peti Jenasah, Acesoris Batu Permata, Merangkai Bunga, Batu Aki, Dekorasi/Eo,Pakan Ternak, Balok, Meubel, , Kaset VCD,Sopi
2	Kecamatan Miomaffo Timur	17	Garam Yodium, Aneka Kripik, VCO, Instan Kunyit	22	Beti,Tais, Selendang, Menjahit, Minyak Gosok, Tasbeh Rosario
3	Kecamatan Noemuti	10	Garam Yodium, Manisan Asam, Beras, Anggur Pisang	37	Beti, Tais, Selendang, Tas, Tanasak, Niru, Sopi
4	Kecamatan Miomaffo Barat	7	Keripik Talas, Aneka Kripik, Mutisqua	15	Beti,Tais,Selendang,Tas, Dompel,Accessories,Kain Meja, Gorden, Minyak Gosok, Pakan Ternak
5	Kecamatan Insana	3	Garam Yodium, Kripik Pisang, Anggur Pisang	26	Beti, Tais, Selendang, Fashion,Minyak Rambut, Minyak Gosok, Genteng, Mebel, Batu Aki, Sopi
6	Kecamatan Insana Utara	17	Garam Yodium, Abon Ikan, Beras, Krupuk Jagung, Aneka Cemilan	5	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih Sopi
7	Kecamatan Biboki Selatan	3	Beras, Keripik	8	Kain Meja, Gorden, Instan Kunyit, Terali, Sopi
8	Kecamatan Biboki Utara	20	Keripik Pisang	7	Beti, Tais, Selendang, Batu Akik
9	Kecamatan Biboki Anleu	22	Garam Yodium, Beras, Krupuk Jagung, Aneka Kripik	62	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih Sopi, Minyak Atsiri VCO
10	Kecamatan Bikomi Utara	24	Aneka Keripik, Rempeyek Cemilan, Instan Kunyit	6	Sopi, Beti, Tais, Selendang, Pakan Ternak
11	Bikomi Selatan	8	Beras, Aneka Keripik, Stik Jagung, Kopi, VCO, Porang	14	Sopi, Beti, Tais, Selendang
12	Bikomi Nilulat	1	Teh Kelor	3	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih
13	Kecamatan Bikomi Tengah	1	Aneka Kripik	4	Beti, Tais, Selendang, Minyak Sereh
14	Kecamatan Naibenu	1	Jamu Kelor	2	Beti, Tais, Selendang
15	Kecamatan Miomaffo Tengah	2	Dodol Asam, Keripik Pisang	15	Sopi, Acesoris,Batu Aji, Pakan Ternak
16	Kecamatan Musi	6	Aneka Kripik, Kacang-kacangan	7	Anggur Pisang, Beti Tais, Selendang, Tas, Tanasak, Niru
17	Kecamatan Mutis			1	Beti, Tais, Selendang
18	Kecamatan Noemuti Timur	4	Beras	10	Beti, Tais, Selendang, Sepatu, Sendal, Kain Meja, Gorden,
19	Kecamatan Insana Barat	15	Stik Jagung, Aneka Kripik, Tortila, Jamu Kelor, Instan Mengkudu, Instan Kunyit	39	Sopi,Terali,Menjahit, Beti, Tais, Selendang
20	Kecamatan Insana Tengah	2	Gula Merah, Beras	42	Sopi, Beti, Tais, Selendang, Balok, Minyak Kayu Putih



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-14

No	Kecamatan	Jumlah IKM Pangan	Jenis IKM Pangan	Jumlah IKM Non Pangan	Jenis IKM Non Pangan
21	Kecamatan Insana Fafinesu	2	Aneka Keripik	7	Sopi, Beti, Tais, Selendang
22	Kecamatan Biboki Moenleu	9	Beras, Dendeng Ikan	2	Beti, Tais, Selendang
23	Kecamatan Biboki Tanpah	2	Pangan	2	Beti, Tais, Selendang
24	Kecamatan Biboki Feotleu			3	Beti, Tais, Selendang
Jumlah		257		418	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Timor Tengah Utara, 2025

1) Kawasan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2021 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2025. Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara, telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), 2 Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD), dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara juga menjabarkan tentang Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) yang terdiri atas DTWD alam, DTWD budaya dan DTWD buatan manusia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8
Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kab.TTU

No	Objek Wisata	Kecamatan	Jenis DTWD
1	Air Terjun Pah Koto	Mutis	DTWD Alam
2	Air Mutis Babnain	Mutis	DTWD Alam
3	Puncak Tunnoer	Mutis	DTWD Alam
4	Pantai Tanjung Bastian	Insana Utara	DTWD Alam
5	Pantai Oebubun	Biboki Moenleu	DTWD Alam
6	Faularan	Biboki Anleu	DTWD Alam
7	Perbukitan Manufonu	Insana Utara	DTWD Alam
8	Kampung Adat Maslete	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
9	Taman Doa Bukit Neonat	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
10	Upacara Kure Neomuti	Noemuti	DTWD Budaya
11	Wisata Sejarah Kota Kefamenanu di Noetoko	Miomaffo Barat	DTWD Budaya
12	Gua Maria Bitauini	Insana	DTWD Budaya
13	Istana Raja Oelolok	Insana	DTWD Budaya
14	Kampung Adat Tamkesi	Biboki Selatan	DTWD Budaya
15	Pos Lintas Batas Negara Wini	Insana Utara	DTWD Buatan Manusia
16	Perlindungan Batas Napan	Bikomi Utara	DTWD Buatan Manusia
17	Kolam Renang Taekas	Miomaffo Timur	DTWD Buatan Manusia
18	Kolam Renang Oeluan	Noemuti	DTWD Buatan Manusia

Sumber: PERDA No. 9 Tahun 2021 tentang RIPPARDA Kabupaten TTU Tahun 2022-2025

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/ atau program yang terkait penataan ruang, kewajiban penyelenggaraan KLHS melekat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam PP ini telah diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui KLHS. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan penyelenggaraan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi atau peninjauan kembali rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-15

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung peri kehidupan makhluk hidup bersifat terbatas. Hal ini dapat terlihat dari beberapa pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena ini, diperlukan penyelenggaraan KLHS yang berupaya mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap degradasi kualitas lingkungan. KLHS berupaya melibatkan aspek lingkungan hidup sejak tahap awal KRP sehingga dapat bersifat makro dan berkelanjutan. Telaah kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, termasuk dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan pada tahapan penyusunan KLHS. Identifikasi tersebut dikaitkan dengan enam kajian yaitu : Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Dukung Lingkungan Hidup mengandung unsur makna Kapasitas penyediaan (supply) sistem & sumber alam, Jumlah kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya (demand), serta Cukup, harmonis dan minim dampak negatif. Daya Tampung Lingkungan Hidup mengandung unsur makna Kapasitas ambien, Hasil produk dan eksekusi dari suatu kegiatan serta Menampung dan menetralkan.

Dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014 telah merangkum beberapa teknik pengukuran dan penentuan daya dukung berdasarkan fungsi dan tujuannya yang digunakan sebagai pendekatan dalam perhitungan daya dukung dan daya tampung di RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil sebagai berikut:

1. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kemampuan Dan Kesesuaian Lahan di Kab.TTU
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan peta dengan tiap-tiap variabel seperti keadaan iklim, kondisi tanah, dan kemiringan lereng, maka diperoleh klasifikasi kesesuaian lahan di Kabupaten Timor Tengah Utara paling sesuai untuk kawasan budidaya sebesar 261.589,93 Ha. Sedangkan Daya Dukung Lahan
2. Daya Dukung Lahan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan
 - a. Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan status daya dukung lahan Kab.TTU pada tahun 2023 dinyatakan Belum Terlampaui. Adapun terdapat total nilai produksi pertanian sebesar Rp773,354,900,000.00, produksi perkebunan sebesar Rp348,137,740,000.00, dan produksi peternakan sebesar Rp782,367,250,000.00.
 - b. Berdasarkan proyeksi CCR daya dukung Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025-2029 secara keseluruhan termasuk dalam golongan sangat baik. Namun masih terdapat beberapa Kecamatan yang perlu diperhatikan seperti Kecamatan Kota Kefamenanu yang masih tergolong kategori dalam sangat rendah dan Kecamatan Naibenu.
 - c. Berdasarkan daya dukung fungsi lindung Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 dikategorikan cukup baik.
 - d. Berdasarkan proyeksi daya tampung penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2029 yaitu 90.283.074 jiwa dengan daya



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-16

tampung rumah sebesar 18.056.615 unit. Selain itu juga, daya tampung rumah memenuhi daya tampung jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara.

D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

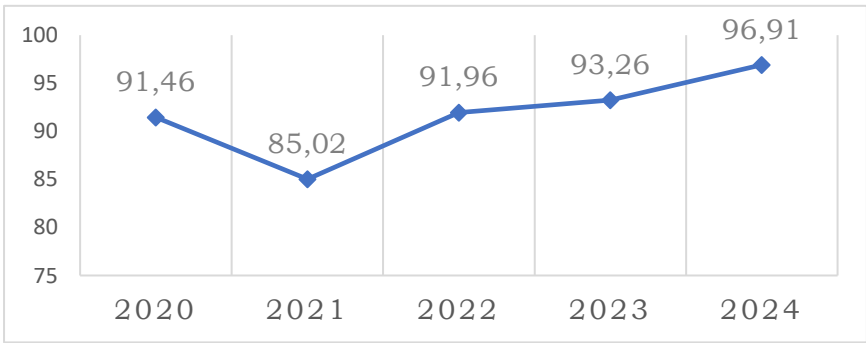
Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan menggambarkan kondisi Energi, Air dan Kemandirian Pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

a) Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga, baik itu yang berlistrik dari sumber PLN ataupun yang berlistrik dari non PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN ini adalah rumah tangga yang menggunakan sumber listrik dari PLN sebagai penerangan untuk masyarakat. Listrik non PLN adalah sumber listrik yang berasal dari instansi atau pihak lain yang dikelola oleh badan usaha, koperasi, csr, pemda, ataupun swadaya masyarakat sebagai sumber penerangan. Sebagian besar aktivitas rumah tangga ditunjang oleh energi listrik, mulai dari penerangan rumah, alat elektronik, dan lainnya. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menunjukkan penggunaan terbesar konsumsi energi rumah tangga adalah listrik. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukan tren peningkatan setiap tahunnya terakhir tahun 2024 sebesar 96,91% hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui PLN ULP Kefamenanu dengan program Rasio Desa Berlistrik yang sampai saat ini 183 Desa dan 11 Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah terpasang listrik 100% dan saat ini PLN ULP Kefamenanu fokus untuk pemasangan listrik di wilayah dusun.

Gambar 2. 2

**Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kab.TTU Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

b) Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak

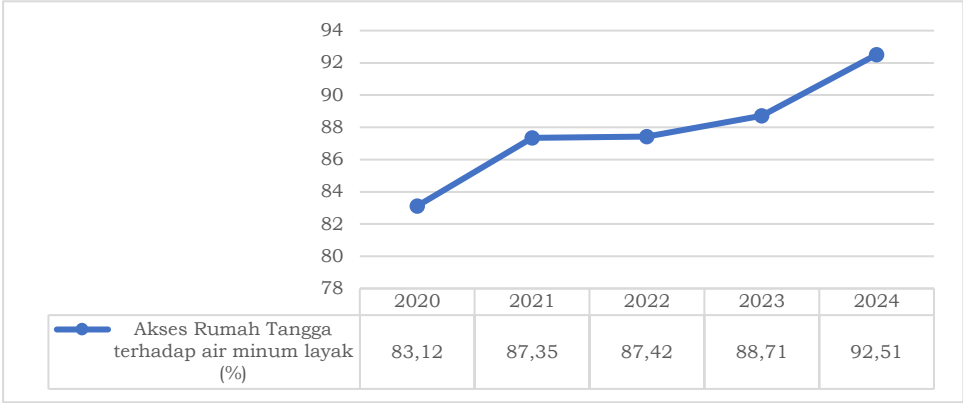
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak pada periode tahun 2020-2024 selalu menunjukan tren peningkatan. Peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum layak ini tidak terlepas dari upaya pemerintah melalui program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum serta peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. Meskipun akses sanitasi terhadap air minum layak di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih terdapat desa-desa yang belum memiliki akses terhadap sumber air minum layak.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-17

Gambar 2. 3
**Presentase Rumah Tangga dengan akses Air Minum Layak
Kab.TTU Tahun 2020-2024**

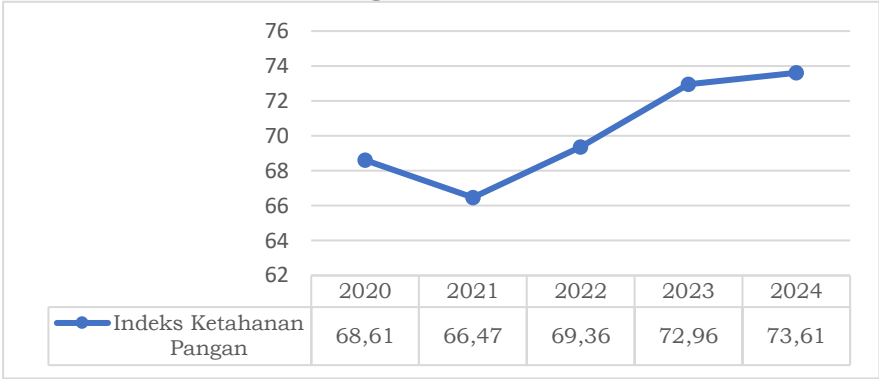


Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025

c) Indeks Ketahanan Pangan

Pada periode lima tahun terakhir capaian indeks ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya hal berjalan seiring dengan terus meningkatnya rumah tangga yang mengakses Listrik, meningkatnya rata-rata lama sekolah Perempuan, meningkatnya rumah tangga terhadap akses air minum layak, meningkatnya rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan dan meningkatnya usia harapan hidup. Selain tren positif dari beberapa indikator di atas masih terdapat beberapa persoalan terkait dengan indeks ketahanan pangan yakni masih tingginya presentase penduduk miskin dan prevalensi stunting.

Gambar 2. 4
Indeks Ketahanan Pangan Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2025

d) Swasembada Pangan

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa komoditas pangan yang bisa di produksi sendiri dan bisa mewujudkan swasembada pangan di beberapa komoditas unggulan tersebut. Komoditas unggulan yang dimaksud antara lain padi, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan bawang putih. Komoditas bawang putih merupakan salah satu komoditas unggulan yang potensial untuk dikembangkan di kabupaten Timor Tengah Utara khususnya di Kecamatan Miomaffo Barat yang pada tahun 2024 produksi bawang putih mencapai 72 kwintal. Tetapi permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan swasembada pangan di beberapa komoditas unggulan tersebut yakni masalah irigasi, ketersediaan bibit unggul serta budaya pertanian yang masih menggunakan pola-pola tradisional. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini fokus pada rehabilitasi irigasi, pemberian bantuan bibit unggul serta pendampingan kepada petani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-18

tenaga pendamping pertanian serta dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

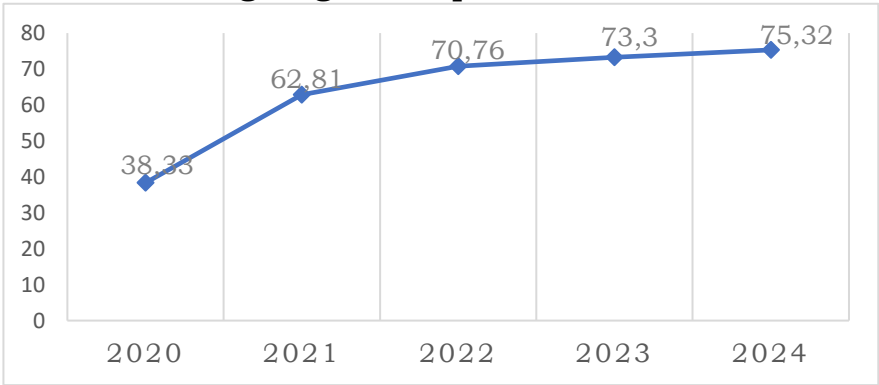
E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup yang berkualitas menggambarkan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Timor Tengah Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam, upaya rehabilitasi hutan dan konservasi kawasan perairan. Namun demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan penanganan deforestasi belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Gambar 2. 5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab.TTU Tahun 2020-2024

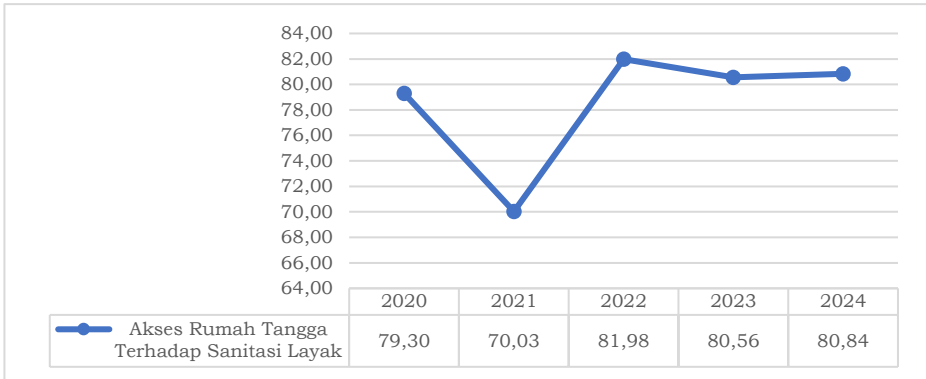


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara, 2024

b) Presentase Akses Sanitasi Layak

Dalam periode tahun 2020-2024 akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami perkembangan yang fluktuatif. Upaya pemerintah dalam meningkatkan rumah tangga dengan akses sanitasi layak antara lain dengan peningkatan kesadaran serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak melalui program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Gambar 2. 6
Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-19

c) Proporsi Rumah Tangga Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah merujuk pada persentase rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah secara langsung dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin, minimal dua kali dalam seminggu. Selain itu, layanan ini juga mensyaratkan bahwa sampah yang dikumpulkan terdiri dari setidaknya tiga kategori atau lebih, sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, indikator ini menjadi salah satu tolok ukur dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pada tahun 2024, proporsi rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 43,76 persen. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan peningkatan signifikan dalam jangka panjang, dengan sasaran mencapai 100 persen pada tahun 2045. Untuk mewujudkan target penanganan sampah mencapai 100 persen maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan mengadakan mesin incinerator untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

d) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. IKPS digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menangani dan mengurangi sampah, serta sebagai dasar penyusunan program pengelolaan sampah. Pada tahun 2024 IKPS Kab.TTU sebesar 29,78, hal ini menggambarkan belum optimalnya tata kelola persampahan di Kab.TTU.

F. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim menggambarkan kemampuan Masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan.

a) Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim merupakan fenomena global saat ini pengaruhnya telah dirasakan secara lokal dan pada masa yang akan datang diperkirakan akan terus berlangsung seiring dengan peningkatan suhu global (global warming). Di tengah perkembangan krisis iklim saat ini, upaya penurunan emisi gas rumah kaca telah menjadi isu global, untuk mendorong seluruh pihak agar terlibat dalam menekan gas emisi rumah kaca.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sampai saat ini belum bisa mengukur Emisi Gas Rumah Kaca karna belum memiliki tenaga ahli untuk mengukur emisi gas rumah kaca. Tetapi berbagai upaya telah dilakukan dalam penanganan isu global ini dengan cara pengolahan limbah yang lebih baik, pertanian berkelanjutan dan pelestarian hutan. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berkomitmen untuk mengukur emisi gas rumah kaca dengan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca dalam jangka Panjang dengan sasaran mencapai 51,51 di tahun 2045.

b) Indeks Resiko Bencana

Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Penghitungannya dilakukan dengan penekanan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap ancaman (hazard) dan gabungan dari beberapa ancaman yang ada (multi hazard).



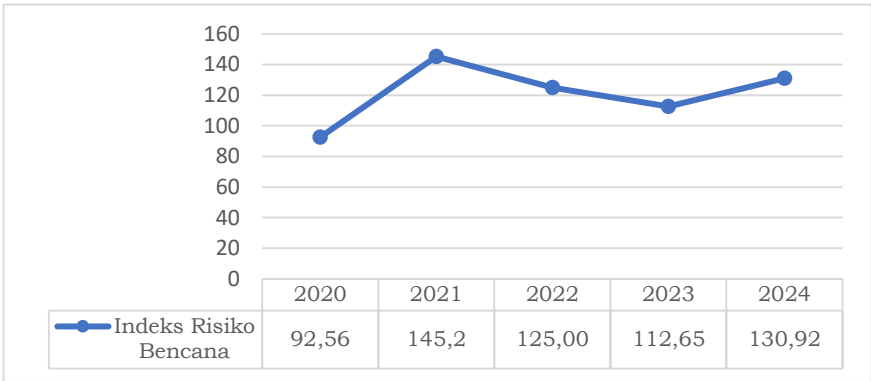
**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-20

Indeks resiko bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren flutuatif yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 7

Indeks Risiko Bencana Kab.TTU Tahun 2020-2024

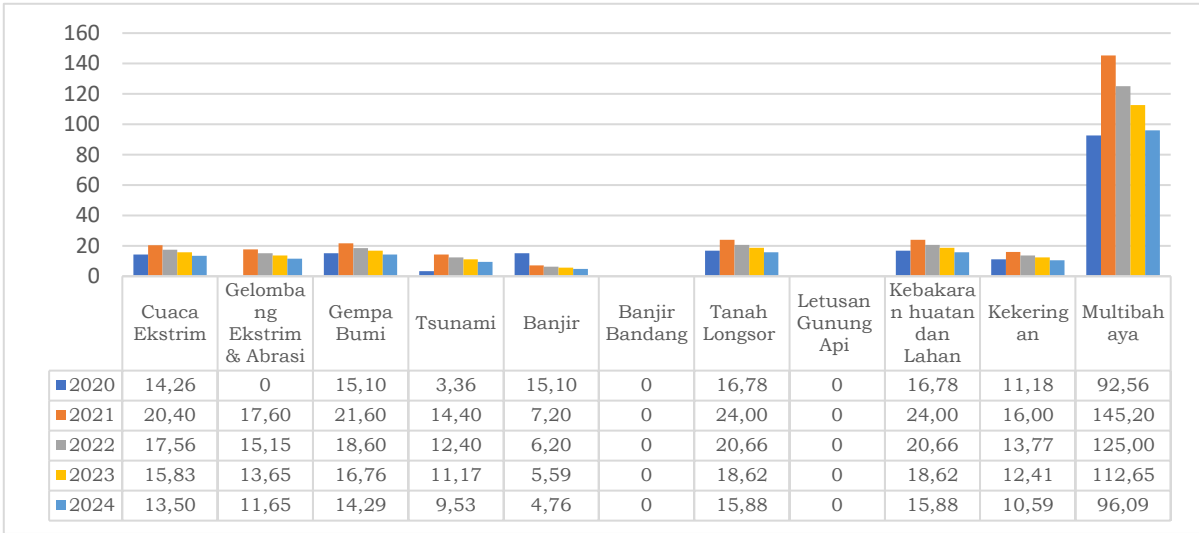


Sumber: inarisk dan Olahan Bapelitbangda 2025

Bencana yang memiliki potensi paling tinggi di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta bencana kekeringan yang berdampak pada kerusakan lahan masyarakat, infrastruktur jalan, jembatan rumah masyarakat dan fasilitas-fasilitas lainnya. Secara rinci terkait dengan bencana yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 8

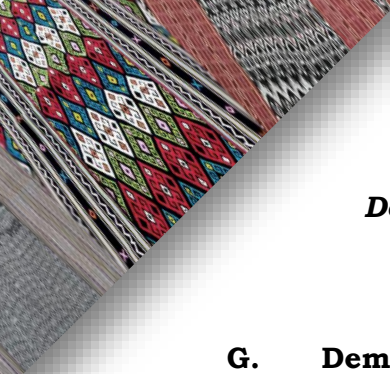
Bencana di Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: BMPB Tahun 2025

c) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai ketahanan sebuah daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan sumber daya untuk memperbaiki ketahanan dan kesiapsiagaan daerah. IKD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 yakni 0,35. Permasalahan dalam penanganan bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara yakni kerentanan daerah terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dan peralatan yang tidak memadai.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-21

G. Demografi

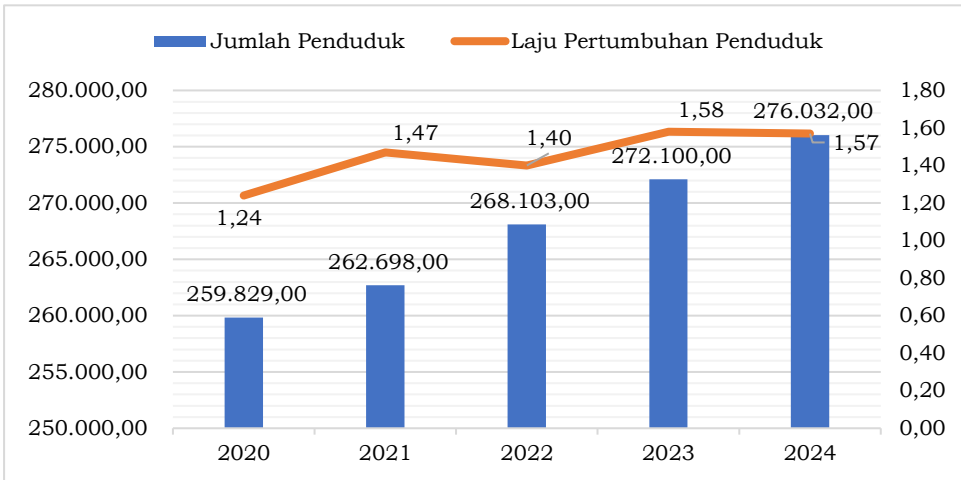
Demografi menggambarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan keberadaan masyarakat.

a) Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat dikategorikan dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur seberapa lambat atau cepatnya pertumbuhan penduduk, dapat dibagi menjadi empat kategori diantaranya sangat lambat, lambat, cepat, dan sangat cepat. Pertumbuhan penduduk dikategorikan sebagai sangat lambat jika laju pertumbuhannya kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan kategori lambat memiliki laju pertumbuhan antara 1-2 persen per tahun. Kategori cepat ditandai dengan laju pertumbuhan di atas 2-3 persen per tahun, dan pertumbuhan penduduk dianggap sangat cepat jika laju pertumbuhannya lebih dari 3 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan migrasi, baik imigrasi maupun emigrasi. Hingga akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 276.032 jiwa. Berikut adalah gambar yang menunjukkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara.

Gambar 2. 9
Jumlah Penduduk Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten, Tahun 2024

Tabel 2. 9
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Wilayah
Kab.TTU, Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Miomaffo Barat	15.337	52,94	15.413	53,21	15.634	53,97	16.068	55,47	15.868	54,78
2	Miomaffo Tengah	6.081	52,94	6.162	53,65	6.302	54,87	6.479	56,41	6.505	56,63
3	Musi	4.740	32,02	4.806	32,47	4.918	33,22	5.058	34,17	5.082	34,33
4	Mutis	7.150	50,84	7.201	51,20	7.320	52,04	7.692	54,69	7.462	53,05
5	Miomaffo Timur	12.417	205,07	12.601	208,11	12.906	213,15	13.007	214,81	13.362	220,68
6	Noemuti	12.743	199,20	12.922	202,00	13.224	206,72	13.342	208,57	13.669	213,68
7	Bikomi Selatan	11.188	276,59	11.323	279,93	11.566	285,93	11.361	280,87	11.909	294,41
8	Bikomi Tengah	7.613	56,24	7.695	56,85	7.850	57,99	8.146	60,18	8.060	59,54
9	Bikomi Nilulat	4.800	107,12	4.847	108,17	4.940	110,24	4.934	110,11	5.062	112,97
10	Bikomi Utara	6.252	126,48	6.317	127,80	6.442	130,33	6.521	131,92	6.609	133,70
11	Naibenu	5.576	22,05	5.634	22,28	5.746	22,73	5.629	22,26	5.897	23,32
12	Noemuti Timur	4.270	46,52	4.325	47,12	4.420	48,16	4.505	49,08	4.558	49,66
13	Kota Kefamenanu	47.766	630,41	48.202	636,16	49.095	647,95	48.672	642,37	50.249	663,18
14	Insana	20.996	175,54	21.282	177,93	21.771	182,02	21.543	180,11	22.485	187,99
15	Insana Utara	10.166	74,35	10.311	75,41	10.555	77,19	11.070	80,96	10.914	79,82



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-22

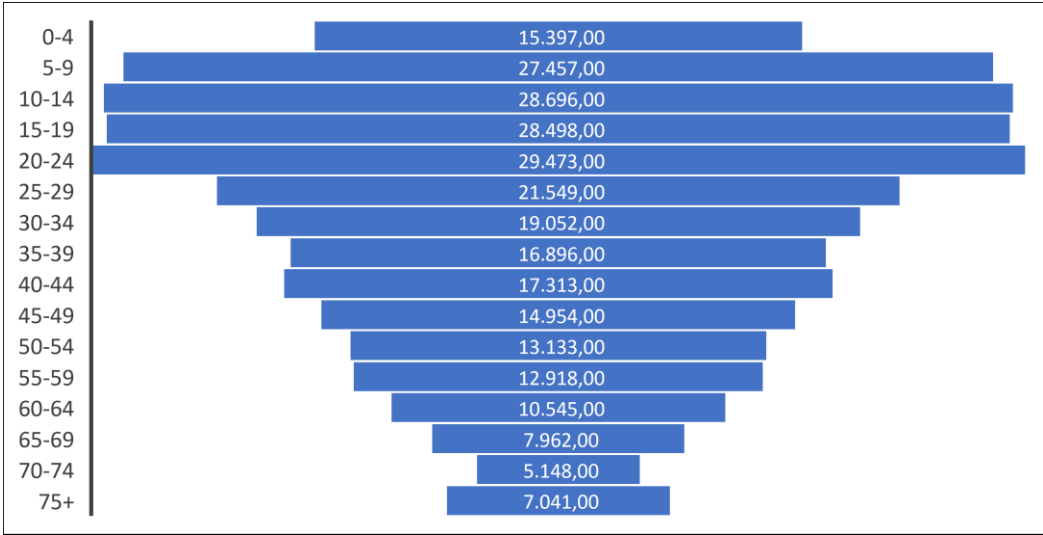
No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)
16	Insana Barat	10.660	89,83	10.840	91,35	11.125	93,75	11.441	96,41	11.565	97,46
17	Insana Tengah	10.491	176,68	10.618	178,81	10.847	182,67	11.596	195,28	11.168	188,08
18	Insana Fafunesu	5.898	70,85	5.991	71,96	6.142	73,78	6.124	73,56	6.371	76,53
19	Biboki Selatan	9.393	232,27	9.457	233,85	9.610	237,64	9.445	233,56	9.791	242,11
20	Biboki Tanpah	5.620	29,88	5.643	30,00	5.719	30,40	6.168	32,79	5.794	30,80
21	Biboki Moenleu	8.021	80,41	8.116	81,36	8.288	83,09	8.662	86,84	8.528	85,49
22	Biboki Utara	11.269	83,90	11.361	84,59	11.561	86,08	12.072	89,88	11.810	87,93
23	Biboki Anleu	17.128	322,99	17.350	327,17	17.738	334,49	17.929	338,09	18.295	344,99
24	Biboki Feotleu	4.254	57,14	4.281	57,50	4.384	58,89	4.636	62,27	4.426	59,45
Jumlah		259.829	99,33	262.698	100,42	268.103	102,49	272.100	104,02	275.439	105,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

b) Komposisi Penduduk

Demographic dividend atau bonus demografi adalah suatu kondisi yang digambarkan dengan banyaknya populasi usia produktif. Tidak hanya banyak, namun jumlah populasinya mendominasi usia tidak produktif. Rentang usia produktif yang dimaksud berada pada rentang usia 15-64 tahun. Pada masa usia tersebut, seseorang dianggap memiliki potensi terbaiknya untuk melakukan peranan penting dalam hidupnya, salah satunya seperti bekerja. Jika dimanfaatkan dengan baik, potensi tersebut dapat memberikan timbal balik besar untuk kemajuan ekonomi bangsa. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai dampak bonus demografi. Singkatnya, manfaat bonus demografi adalah memberikan peluang bagi sebuah bangsa untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya melalui peranan generasi usia produktif. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 10
Komposisi Kependudukan menurut Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c) Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

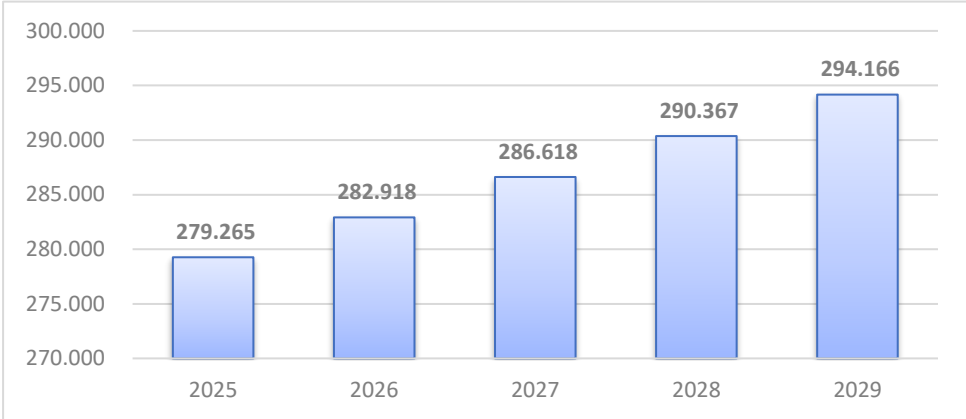
Proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-23

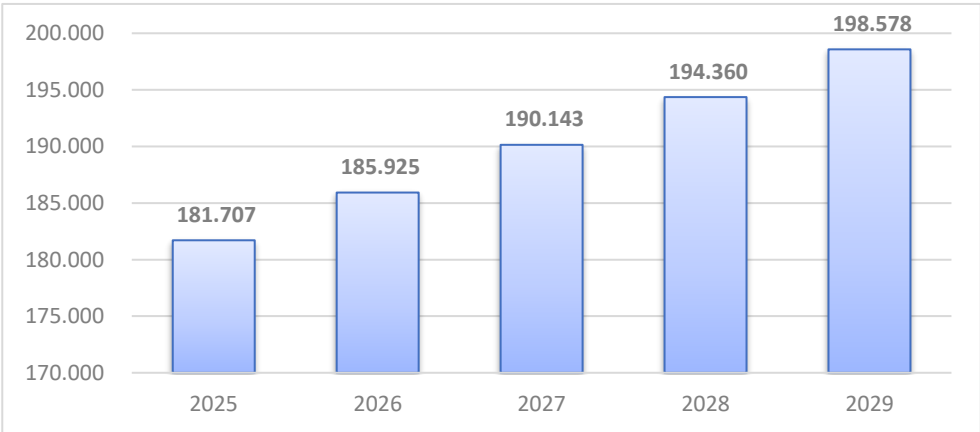
Gambar 2. 11
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kab.TTU Tahun, 2025-2029



Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2025

Proyeksi Penduduk Usia Produktif
Berdasarkan proyeksi Penduduk Usia Produktif, pada periode tahun 2025-2029 Kabupaten Timor Tengah Utara akan memasuki masa bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif di proyeksikan lebih banyak dari jumlah penduduk usia anak dan usia lanjut.

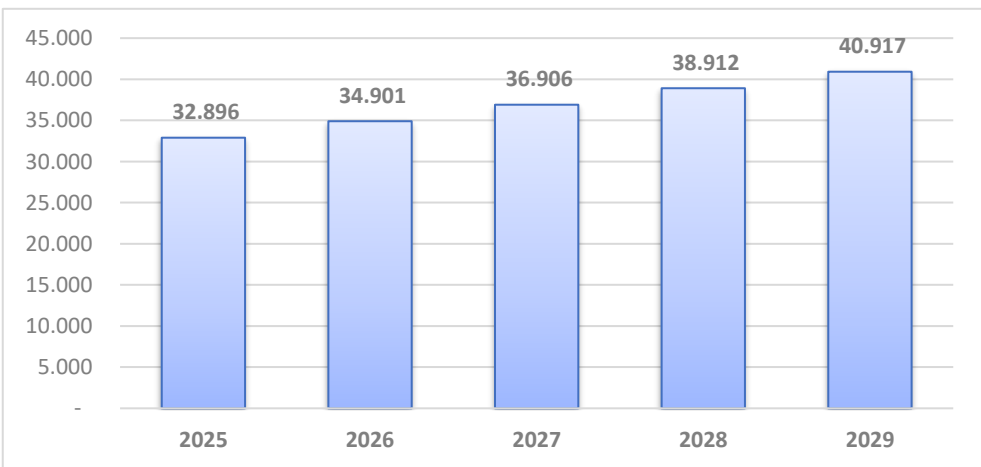
Gambar 2. 12
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kab.TTU Tahun 2025-2029



Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2025

Proyeksi Penduduk Usia Lanjut
Penduduk Usia Lanjut di proyeksikan tumbuh sampai dengan 40.917 jiwa di tahun 2029 atau sebanyak 13,91% dari proyeksi jumlah penduduk pada akhir periode tahun 2029.

Gambar 2. 13
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kab.TTU Tahun 2025-2029



Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2025

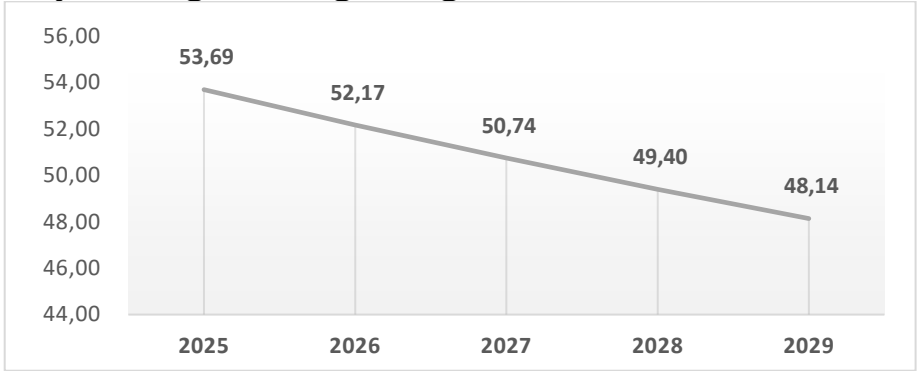


**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-24

Proyeksi Angka ketergantungan
Angka ketergantungan/beban ketergantungan, penduduk yang belum produktif dan tidak produktif terhadap usia produktif proyeksikan akan terus menurun dalam periode tahun 2025-2029.

Gambar 2. 14
Proyeksi Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2025-2029



Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan Ekonomi menggambarkan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

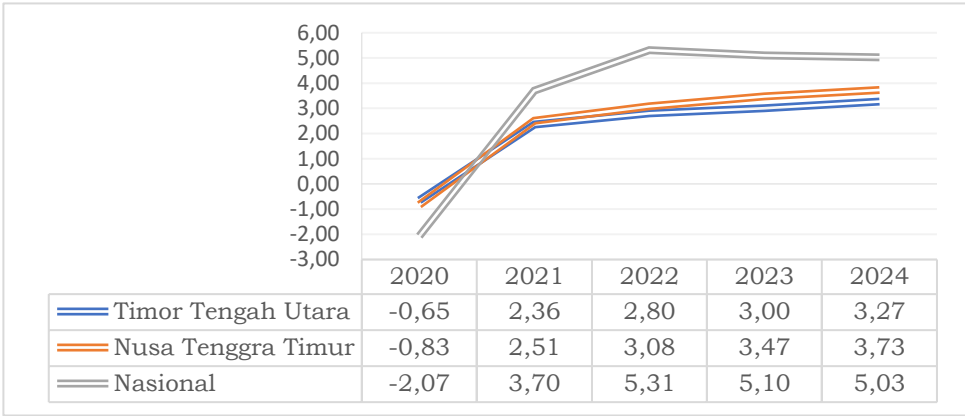
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 3,27 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar -0,65% yang menunjukkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun itu. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan mengakibatkan guncangan pada perekonomian global dan nasional. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional yang masing-masing tercatat -0,83% dan -2,07%. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi pasca pandemi COVID 19. Berbagai program pemerintah terkait penanganan COVID-19 telah dilaksanakan dan masyarakat mulai beradaptasi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara nasional mulai menunjukkan perbaikan. Selengkapnya terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara, provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-25

Gambar 2. 15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. TTU, Prov.NTT dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



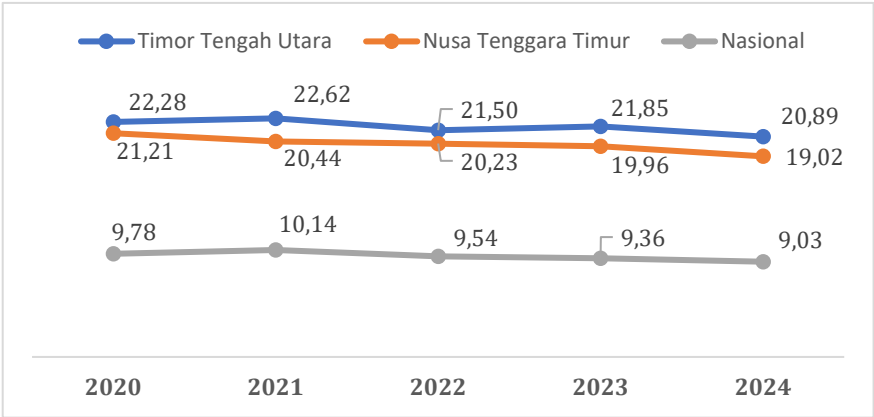
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

b) Presentase Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara antara tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi mengalami penurunan di antara tahun 2020 sampai tahun 2024 dari 22,28 persen turun sebesar 1,39% menjadi 20,89 persen di tahun 2024. Kenaikan persentase penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan mengakibatkan penurunan pendapatan. Namun, pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik karena masyarakat telah mampu beradaptasi dengan situasi pandemi dan program-program pemerintah berjalan dengan efektif, namun perlu perbaikan pada sektor-sektor unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menurunkan angka kemiskinan.

Gambar 2. 16
Presentase Penduduk Miskin Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025 (Diolah)



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

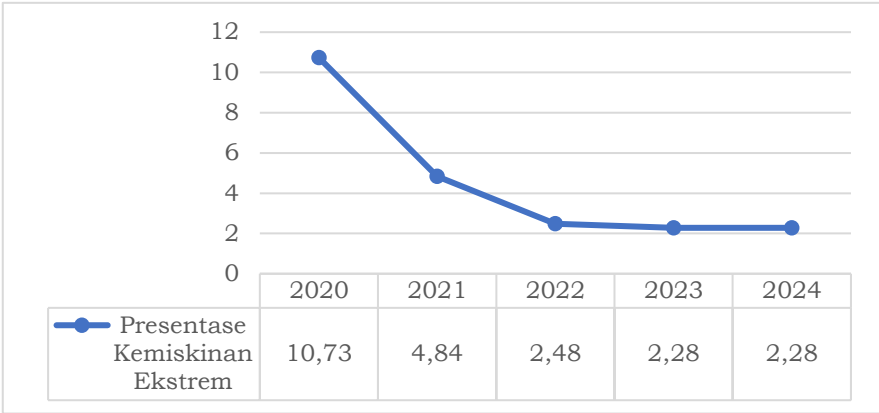
II-26

c) Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB,1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Demikian apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp 1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara persentase penduduk miskin ekstrem dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 17

Presentase Penduduk Miskin Ekstrem (Desil 1) Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber Data : Kemenko PMK, 2025

Tabel 2. 10

Jumlah kategori miskin ekstrem di Kab.TTU Tahun 2024, Desil 1-4

NO	KECAMATAN	TINGKAT KESEJAHTRAAN			
		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4
1.	Kecamatan Kota Kefamenanu	683	638	698	581
2.	Kecamatan Miomaffo Timur	463	518	440	358
3.	Kecamatan Miomaffo Barat	633	663	574	451
4.	Kecamatan Noemuti	331	352	322	285
5.	Kecamatan Miomaffo Tengah	371	324	205	236
6.	Kecamatan Musi	191	183	160	147
7.	Kecamatan Mutis	505	328	221	120
8.	Kecamatan Bikomi Selatan	686	494	349	228
9.	Kecamatan Bikomi Tengah	516	370	212	171
10.	Kecamatan Bikomi Nilulat	268	279	177	132
11.	Kecamatan Bikomi Utara	330	281	224	148
12.	Kecamatan Naibenu	297	240	152	113
13.	Kecamatan Noemuti Timur	231	169	127	105
14.	Kecamatan Insana Barat	724	516	421	322
15.	Kecamatan Insana	1.314	891	607	443
16.	Kecamatan Insana Utara	522	379	300	207
17.	Kecamatan Insana Tengah	748	556	393	219
18.	Kecamatan Insana Fafinesu	354	254	205	125
19.	Kecamatan Biboki Selatan	591	372	265	203
20.	Kecamatan Biboki Tanpah	410	291	197	136
21.	Kecamatan Biboki Moenleu	507	353	215	158
22.	Kecamatan Biboki Utara	777	505	333	207
23.	Kecamatan Biboki Feotleu	325	171	120	88
24.	Kecamatan Biboki Anleu	1.492	653	456	255
Jumlah		13.269	9.780	7.373	5.438

Sumber: Kemenko PMK, 2025



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-27

d) PDRB dan Pendapatan Perkapita

Indikator pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Tabel 2. 11

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Laju Pertumbuhannya (persen) di Kab.TTU Tahun 2020– 2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.205,88 (-0,33)	1.250,82 (3,73%)	1.300,49 (3,97%)	1.330,93 (2,31%)	1354,21 (1,75%)
2	Pertambangan dan Penggalian	38,89 (-29,6%)	39,09 (0,51%)	39,83 (1,89%)	41,21 (3,48%)	42,6 (3,37%)
3	Industri Pengolahan	30,36 (-4,34%)	29,82 (-1,78%)	31,43 (5,4%)	33,86 (7,72%)	36,48 (7,74%)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,76 (18,1%)	1,9 (7,97%)	1,99 (4,92%)	2,21 (11,3%)	2,4 (8,40%)
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,62 (6,14%)	0,67 (7,54%)	0,68 (2,59%)	0,7 (2,64%)	0,73 (3,69%)
6	Konstruksi	273,18 (-8,26%)	287,68 (5,31%)	286,91 (-0,3%)	309,46 (7,86%)	309,77 (0,10%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137,18 (-3,12%)	141,38 (3,06%)	151,66 (7,27%)	160,32 (5,71%)	167,56 (4,52%)
8	Transportasi dan Pergudangan	159,38 (-7,39%)	163,81 (2,78%)	167,52 (2,27%)	173,54 (3,59%)	180,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,89 (-9,08%)	17,15 (1,52%)	18,03 (5,16%)	18,94 (2,06%)	20,64 (8,29%)
10	Informasi dan Komunikasi	195,61 (14,97%)	200,5 (2,5%)	209,36 (4,42%)	217,83 (4,05%)	224,64 (3,13%)
11	Jasa Keunagan dan Asuransi	64,69 (7,73%)	55,98 (-2%)	56,4 (1,12%)	57,61 (2,14%)	60,16 (4,43%)
12	Real Estat	69,58 (-1,38%)	71,21 (2,35%)	73,52 (3,24%)	75,43 (2,6%)	77,32 (2,50%)
13	Jasa Perusahaan	1,81 (-36,3%)	1,57 (3,43%)	1,62 (3,43%)	1,66 (2,52%)	1,76 (5,97%)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	469,52 (3,86%)	463,91 (-1,19%)	467,86 (0,85%)	468,64 (0,17%)	509,17 (8,65%)
15	Jasa Pendidikan	165,8 (1,39%)	162,04 (2,27%)	161,63 (- 0,3%)	166,07 (2,75)	170,7 (2,79%)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,76 (3,62%)	43,43 (6,54%)	43,98 (1,27%)	45,3 (3,01%)	46,49 (2,61%)
17	Jasa lainnya	19,03 (012,2%)	18,32 (- 3,76%)	18,63 (1,74%)	19,21 (3,12%)	19,61 (2,06%)
Total		2.880,93 (-0,65%)	2.949,05 (2,36%)	3.031,55 (2,80%)	3.122,6 (3%)	3225,12 (3,27%)

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2025

Tabel 2. 12

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) dan Persentasenya di Kab.TTU Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.616,21 (39,53%)	1.250,82 (3,73%)	1.300,49 (3,97%)	1.330,93 (2,31%)	1354,21 (1,75%)
2	Pertambangan dan Penggalian	73,83 (1,81%)	39,09 (0,51%)	39,83 (1,89%)	41,21 (3,48%)	42,6 (3,37%)
3	Industri Pengolahan	46,86 (1,15%)	29,82 (-1,78)	31,43 (5,4%)	33,86 (7,72%)	36,48 (7,74%)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16 -0,05%	1,9 (7,97%)	1,99 (4,92%)	2,21 (11,3%)	2,4 (8,40%)
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,74 -0,02%	0,67 (7,54%)	0,68 (2,59%)	0,7 (2,64%)	0,73 (3,69%)
6	Konstruksi	425,98 (10,42%)	287,68 (5,31%)	286,91 (-0,3%)	309,46 (7,86%)	309,77 (0,10%)
7	Perdagangann Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,95 (5,5%)	141,38 (3,06%)	151,66 (7,27%)	160,32 (5,71%)	167,56 (4,52%)
8	Transportasi dan Pergudangan	218 -5,33%	163,81 (2,78%)	167,52 (2,27%)	173,54 (3,59%)	180,88 (4,23%)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,75 (0,61%)	17,15 (1,52%)	18,03 (5,16%)	18,94 (2,06%)	20,64 (8,92%)
10	Informasi dan Komunikasi	200,02 (4,89%)	200,5 (2,5%)	209,36 (4,42%)	217,83 (4,05%)	224,64 (3,13%)
11	Jasa Keunagan dan Asuransi	78,62 (1,92%)	55,98 -2%	56,4 (1,12%)	57,61 (2,14%)	60,16 (4,43%)



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-28

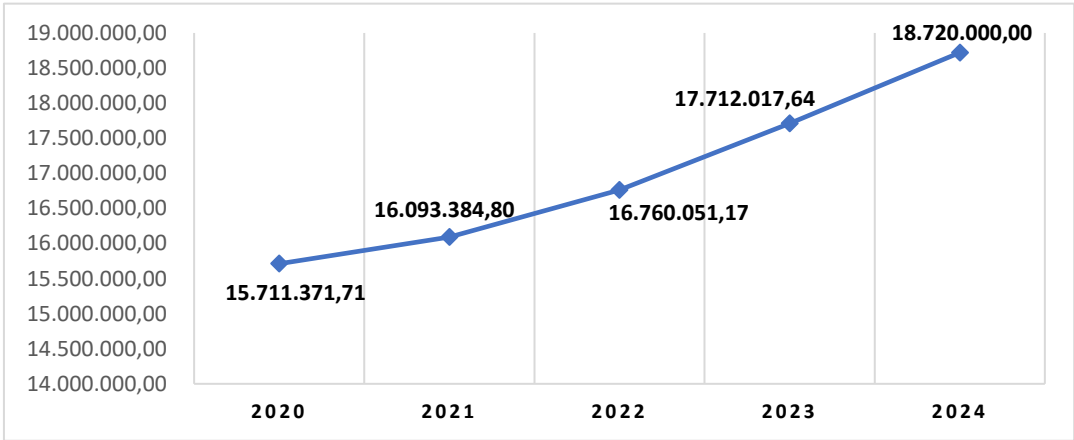
No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
12	Real Estat	97,69 (2,39%)	71,21 (2,35%)	73,52 (3,24%)	75,43 (2,6%)	77,32 (2,50%)
13	Jasa Perusahaan	4,43 -0,11%	1,57 (3,43%)	1,62 (3,43%)	1,66 (2,52%)	1,76 (5,97%)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	685,84 (16,77%)	463,91 -1,19%	467,86 (0,85%)	468,64 (0,17%)	509,17 (8,65%)
15	Jasa Pendidikan	291,22 (7,12%)	162,04 (2,27%)	161,63 (-0,3%)	166,07 (2,75)	170,7 (2,79%)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,26 -1,5%	43,43 (6,54%)	43,98 (1,27%)	45,3 (3,01%)	46,49 (2,61%)
17	Jasa lainnya	36,3 -0,89%	18,32 (-3,76%)	18,63 (1,74%)	19,21 (3,12%)	19,61 (2,06%)
Total		4.088,8 (100%)	2.949,05 (2,36%)	3.031,55 (2,80%)	3.122,6 (3%)	3225,12 (3,27%)

Sumber: BPS Kabupaten TTU Tahun 2025

Data diatas menunjukan sumbangan terbesar untuk PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 sampai pada tahun 2024 masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan sektor lapangan usaha konstruksi. Meskipun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB tertinggi tetapi dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif mulai dari 39,82% di tahun 2020, menurun sebesar 9,54 di tahun 2021 menjadi 30,28%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 40,95% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024.

Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Pendapatan per kapita diperoleh dari jumlah Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) pada suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten TTU dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 18
Pendapatan Perkapita Perduduk Kab.TTU Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara, 2025

Dari gambar di atas diperoleh informasi pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di Kabupaten TTU selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan baiknya perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara yang berimbas pada membaiknya standar hidup masyarakat.

e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja 15-64 tahun). Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja



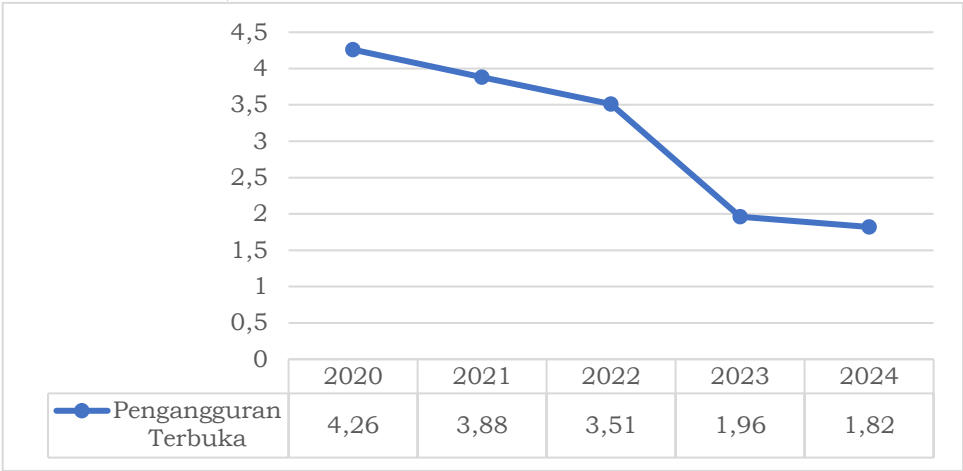
**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-29

yang belum dimanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Penurunan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Timor Tengah Utara berjalan searah dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. 19
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

f) Indeks Gini

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang menunjukkan pemerataan yang sempurna. Tingkat ketimpangan dalam Indeks Gini dibagi menjadi tiga kategori diantaranya rendah ($\text{Indeks Gini} < 0,3$), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$), dan tinggi ($\text{Indeks Gini} > 0,4$).

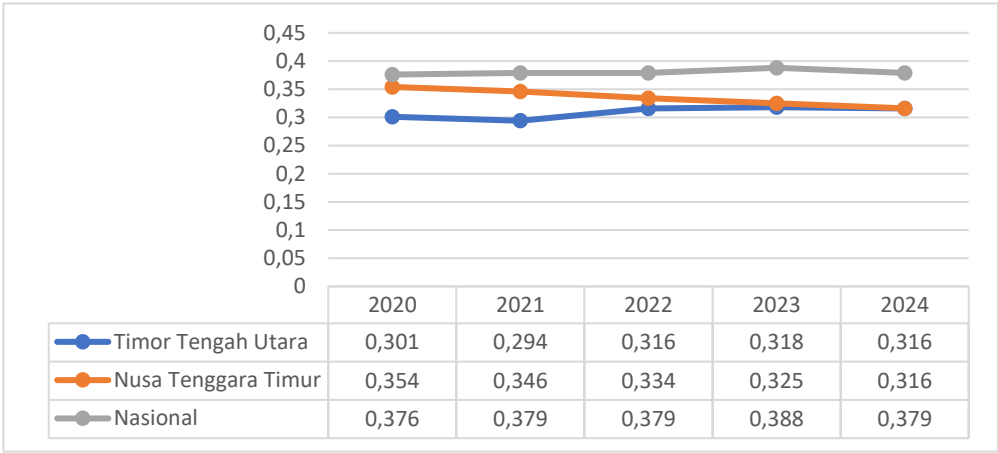
Dalam periode tahun 2020-2024 indeks gini Kabupaten Tengah Utara mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks Gini Kabupaten Timor Tengah Utara dalam perbandingan dengan Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-30

Gambar 2. 20
Grafik Indeks Gini Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: BPS dan Olahan Bapelitbangda Kab.TTU 2025

g) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan usia harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Menurut standar *United Nations Development Programme* (UNDP) tingkatan IPM terdiri dari 4 (empat) kategori diantaranya: 1).Kategori Sangat Tinggi (≥ 80) 2). Kategori Tinggi (70-79) 3).Kategori Sedang (60-69) 4). Kategori Rendah (<60).

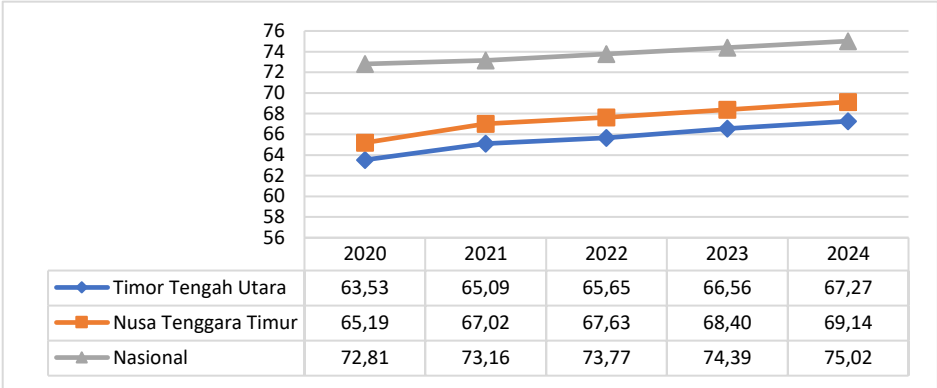
Sejak tahun 2020-2024, nilai IPM di Kabupaten Timor Tengah Utara terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, nilai IPM Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 63,53% dan terus meningkat hingga mencapai 67,27% di tahun 2024. Dalam periode lima tahun, terjadi kenaikan IPM sebesar 3,74%. Perkembangan ini menunjukkan arah pembangunan yang positif di Kabupaten Timor Tengah Utara. Meskipun IPM terus mengalami peningkatan tetapi masih berada pada kategori sedang (IPM 60-69). Perkembangan IPM di Kabupaten Timor Tengah Utara sejalan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-31

Gambar 2. 21
Indeks Pembangunan Manusia Kab.TTU, Prov.NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

h) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal serta kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Idealnya, peningkatan PAD menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya inovasi daerah dalam memaksimalkan potensi lokal mulai dari optimalisasi pajak daerah dan retribusi hingga pengelolaan kekayaan daerah.

Pertumbuhan PAD di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 sebesar -40,07% meningkat menjadi 27,48% pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi -5,05%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yakni belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dan regulasi perpajakan daerah yang belum tertata dengan baik. Oleh karena itu pada tahun 2030 Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan pertumbuhan PAD sebesar 5,87%.

B. Kesehatan Untuk Semua

Menggambarkan kesehatan semua penduduk pada siklus hidup di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

a) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan. Usia Harapan Hidup (UHH) sangat diperlukan, mengingat Usia Harapan Hidup merupakan indikator penting pembangunan kesehatan dan ekonomi.

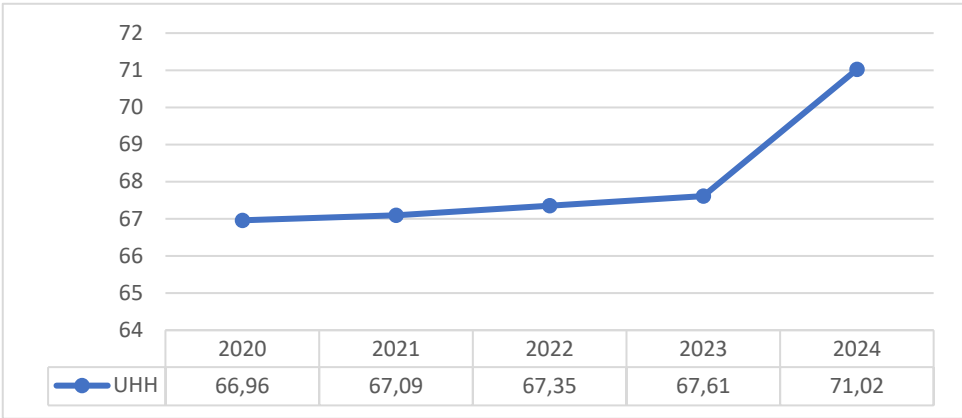
UHH di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 66,96 tahun dan terus meningkat menjadi 71,02 pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam gambar dibawah ini. Peningkatan UHH di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-32

Gambar 2. 22
Umur Harapan Hidup Kab.TTU Tahun 2020-2024



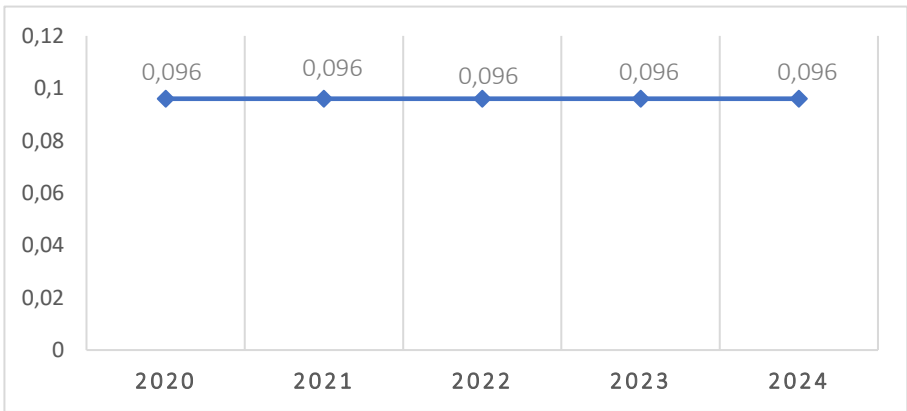
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

b) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu metode untuk menentukan apakah sebuah keluarga termasuk dalam kategori sehat, prasehat, atau tidak sehat, dengan ketentuan nilai IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Terdapat 12 indikator yang membentuk IKS, yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, bayi menerima imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru menerima pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi menjalani pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan perawatan dan tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta keluarga memiliki akses terhadap air bersih dan menggunakan jamban sehat.

Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 0,096 selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2. 23
Capaian Indeks Keluarga Sehat Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab.TTU

c) Prevalensi Stunting

Balita Pendek (Stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted). Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

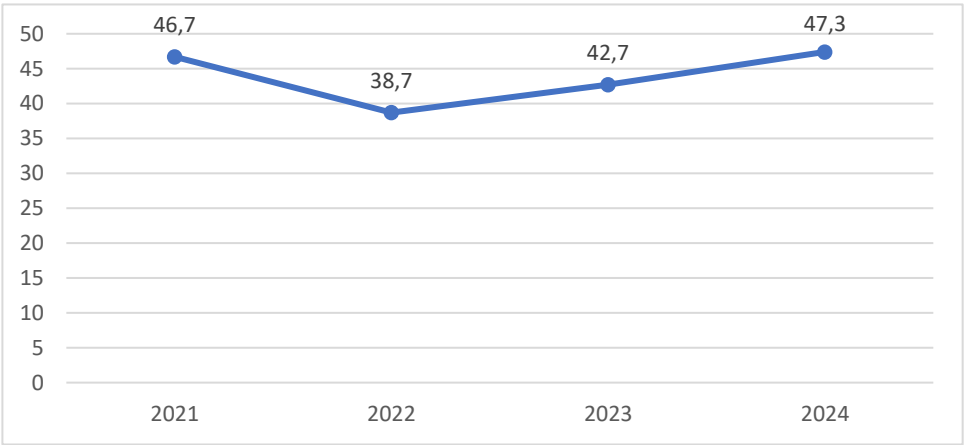


**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-33

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan setiap tahun dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali menunjukkan bahwa Prevalensi Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Gambar 2. 24
Realisasi Prevalensi Stunting di Kab.TTU Tahun 2021-2024



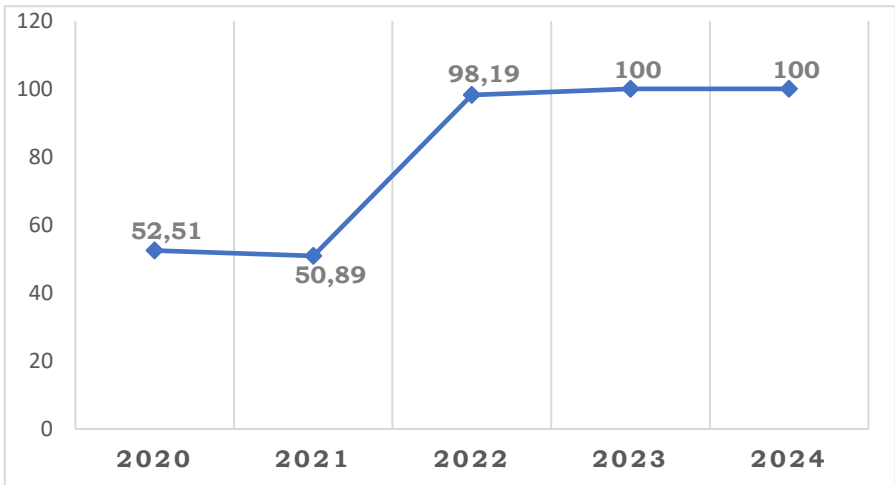
Sumber Data : Survei Kesehatan Indonesia

Peningkatan prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni kekurangan gizi, infeksi dan penyakit, kondisi sosial dan ekonomi, keterbatasan air bersih dan sanitasi serta pola asuh yang salah dari orang tua anak.

d) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan terutama pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara tidak terlepas dari pencanangan UHC (*Universal Health Coverage*) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2022.

Gambar 2. 25
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kab.TTU, Tahun 2020-2024



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. TTU

C. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Menggambarkan kondisi masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

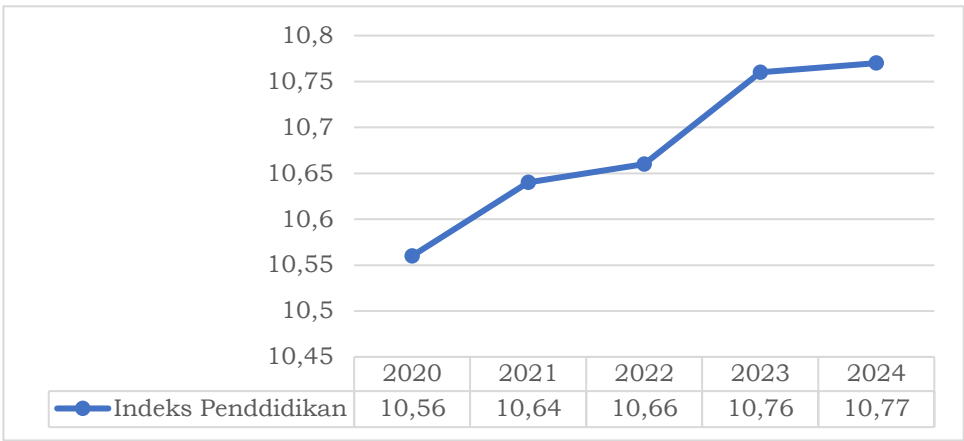
II-34

a) Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dihitung melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Hasil dari perhitungan indeks pendidikan menunjukkan bahwa nilai indeks pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 sebesar 10,56, terus meningkat secara persisten mencapai 10,77 pada tahun 2024, hal ini sejalan dengan terus meningkatnya nilai rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Gambar 2. 26
Indeks Pendidikan Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

b) Hasil Pembelajaran

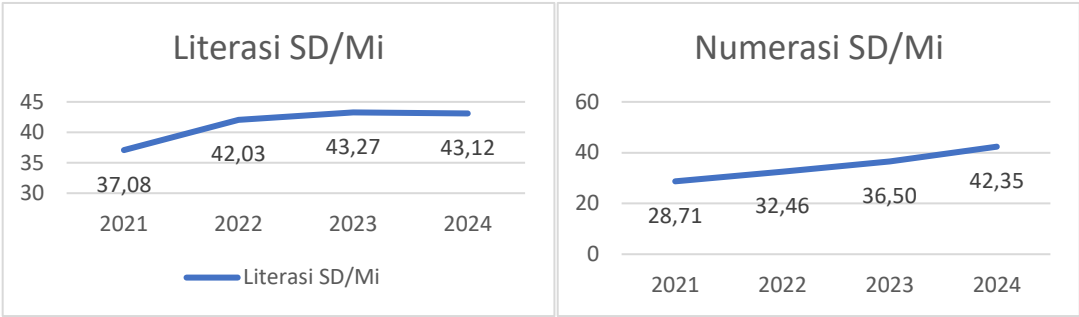
Kemampuan Literasi dan Numerasi adalah dua kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa siswi di era globalisasi. Literasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sementara itu, Numerasi adalah kemampuan menerapkan konsep numerik dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kompetensi ini berhubungan erat dengan penalaran, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Penyebab literasi dan numerasi siswa SD/Mi maupun SMP/MTs masih rendah yakni kualitas Pendidikan yang tidak merata dengan kekurangan guru berkualitas dan fasilitas Pendidikan yang belum memadai, kondisi sosial dan ekonomi yang rendah, kurangnya dukungan orang tua dalam Pendidikan, budaya membaca yang lemah, kebijakan Pendidikan yang tidak konsisten dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi juga turut menyulitkan upaya peningkatan literasi dan numerasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak terkait. Langkah-langkah seperti perbaikan kualitas guru, peningkatan akses terhadap bahan bacaan dan teknologi pendidikan, serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam Pendidikan anak perlu diutamakan. Selengkapnya terkait dengan tren Literasi, Numerasi SD/Mi dan Literasi, Numerasi SMP/MTs dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

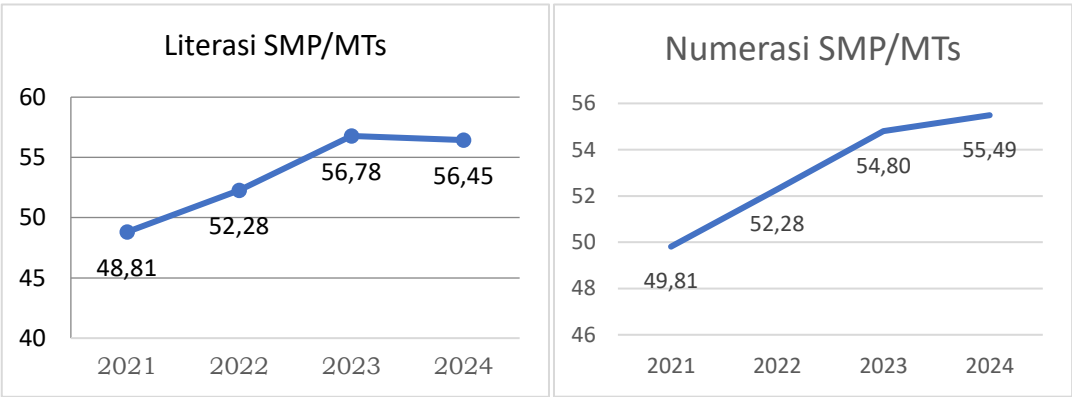
II-35

Gambar 2. 27
Literasi dan Numerasi SD/Mi Kab.TTU, Tahun 2021-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Gambar 2. 28
Literasi SMP/MTs Kab.TTU, Tahun 2021-2024



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c) Presentase Satuan PAUD yang Melaksanakan PAUD-HI

Tujuan pelaksanaan PAUD-HI antara lain terpenuhinya kebutuhan esensial AUD secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada, terselenggaranya pelayanan AUD secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dan terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif. Dengan prinsip pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, pelayanan yang berkesinambungan pelayanan yang non diskriminasi, pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat, partisipasi masyarakat serta berbasis budaya yang konstruktif.

Di Kabupaten Timor Tengah Utara Indikator ini menjadi salah satu tolak ukur dalam upaya meningkatkan satuan PAUD yang melaksanakan PAUD HI. Pada tahun 2025, presentase PAUD yang melaksanakan PAUD HI di tetapkan sebagai *baseline* sebesar 20%. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan peningkatan Presentase Satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan sasaran mencapai 70% di tahun 2030.

d) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder



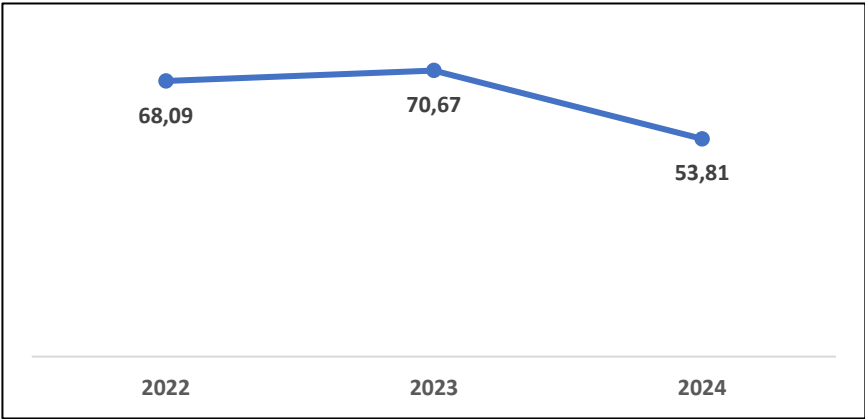
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-36

dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan literasi Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara sempat mengalami peningkatan sampai dengan 70,67% di tahun 2023 tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 53,81%. Penurunan indeks pembangunan literasi masyarakat tidak terlepas dari beberapa permasalahan yakni keterbatasan akses perpustakaan, formasi pegawai pustakawan yang terbatas serta peraturan daerah terkait perpustakaan yang belum menjadi prioritas dan belum maksimalnya dorongan anggaran dari pemerintah.

Gambar 2. 29
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2022-2024



Sumber: Perpustakaan Nasional, Tahun 2025

D. Perlindungan Sosial Yang Adaptif
Menggambarkan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

a) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jaminan sosial tenaga kerja (*workers' social security*) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: resiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Di negara-negara maju jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari sistem perlindungan sosial karena hampir seluruh keluarga dalam masyarakat akan tercakup oleh program jaminan sosial tenaga kerja. Akan tetapi, di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja formal hanya mencakup sebagian kecil keluarga dalam masyarakat karena sebagian besar penduduk bergerak di sektor informal.

Tabel 2. 13
Persentase Tenaga Kerja Formal yang Sudah/Belum
Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	BPJS Ketenagakerjaan			
		Sudah	%	Belum	%
2022	3.789	1.006	26,55	2.783	73,45
2023	3.811	1.820	47,76	1.991	52,24
2024	3.955	1.387	38,20	2.568	64,93

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2025



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-37

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Namun persentase tenaga kerja yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya belum mencapai 50%. Oleh karena itu pemerintah daerah sedang mengupayakan agar seluruh tenaga kerja dapat tersentuh oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mengalokasikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan yang akan dimulai tahun 2026. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi pekerja formal tetapi juga mencakup pekerja informal dan pekerja rentan lainnya.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menggambarkan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika dan moral yang menjadi modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan daerah untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa.

a) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan hidup beragama juga menjadi kata kunci dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Karena tanpa kerukunan, bangsa Indonesia justru akan semakin terpuruk dalam bayang-bayang konflik sosial horizontal yang berkepanjangan. Kementerian Agama baru saja mempublikasikan bahwa indeks kerukunan umat beragama terus meningkat dalam 3 Tahun terakhir. Pada Tahun 2021 sebesar 72,39, indeks naik menjadi 73,09 pada 2022. Sementara pada 2023, indeks KUB kembali naik menjadi 76,02.

Pada Tahun 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi tertinggi terkait kerukunan umat beragamanya dengan nilai indeks KUB 81,07. Masyarakat NTT meyakini dengan kerukunan semua umat bisa menjalankan ibadahnya dengan damai dan nyaman. Antar umat beragama saling jaga satu sama lain tempat ibadahnya dan proses pelaksanaan ibadahnya.

Pada tahun 2024 Indeks KUB Kabupaten TTU sebesar 84,25. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berhasil dalam menjalankan program indikator kinerja tiap Tahunnya yakni jumlah fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional telah dilakukan.

b) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang dirancang untuk memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan kebudayaan, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan di bidang kebudayaan serta sebagai acuan untuk koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Kriteria pencapaian IPK adalah sebagai berikut: $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), dan $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik). Capaian indeks pembangunan kebudayaan di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebesar 50,70 dengan kategori cukup. Capaian ini menunjukkan adanya kemerosotan budaya dan perlu berbagai upaya untuk meningkatkannya.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-38

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Menggambarkan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender.

a) Indeks Perlindungan Anak

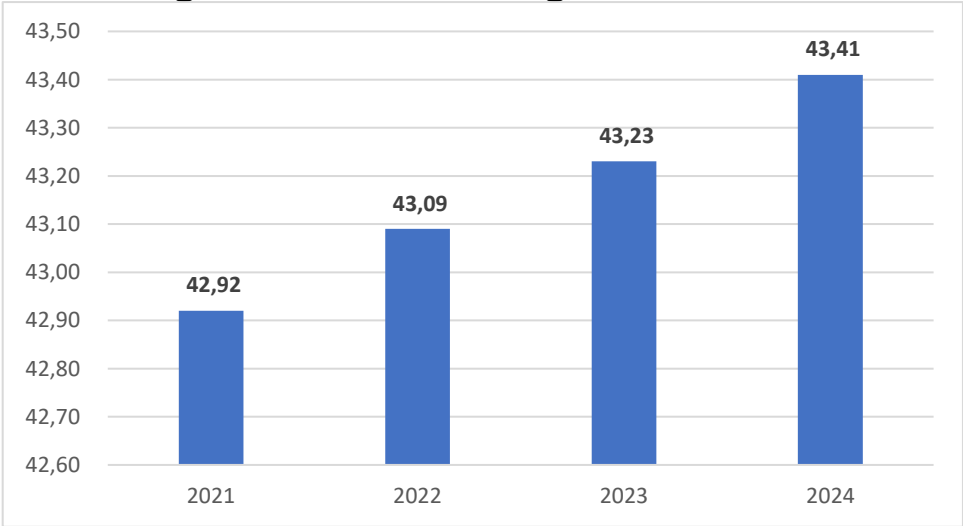
Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran standar yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA terdiri dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), yang didasarkan pada lima klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar terbentuknya IPA meliputi Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Nilai Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Timor Tengah Utara 2024 sebesar 50,46. Hal ini menggambarkan bahwa belum optimalnya perlindungan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara.

b) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai pencapaian Kualitas Keluarga. IKK berfungsi sebagai dasar perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mencapai Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan kategori indeks berkisar antara 0,00 hingga 100. Kategori IKK adalah sebagai berikut IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK terdiri dari lima pilar atau dimensi, yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Capaian indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kab.TTU pada tahun 2021 s.d 2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 14

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kab.TTU Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.TTU, 2025

c) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda yang dapat diukur dengan 5 (lima) domain dasar yaitu pendidikan,



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

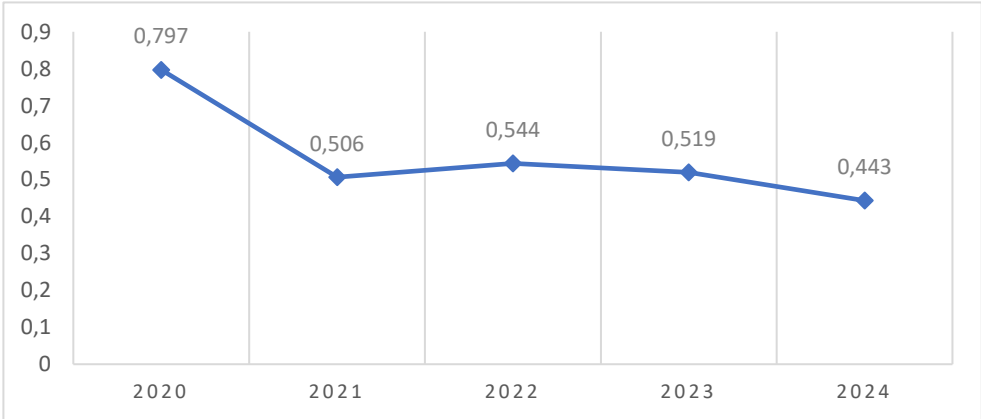
II-39

kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Capaian indeks pembangunan pemuda Provinsi NTT pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 54,33 dan 55,33 sedangkan capaian Nasional pada tahun yang sama sebesar 55.33 dan 56.33. Pengukuran indeks pembangunan pemuda di tingkat Kabupaten belum dilaksanakandan akan dimulai perhitungannya pada tahun 2026.

d) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dalam periode tahun 2020-2024 secara keseluruhan tren IKG mengalami penurunan hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Timor Tengah Utara semakin membaik dimana budaya patriarki, kesenjangan akses pendidikan dan pekerjaan bisa diakses oleh laki-laki dan perempuan.

Gambar 2. 30
Indeks Ketimpangan Gender Kab.TTU Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Provinsi NTT, Tahun 2025

e) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 95,55% menurun sebesar 0,36% menjadi 95,15%, sedangkan pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan terakhir tahun 2024 sebesar 96,08%

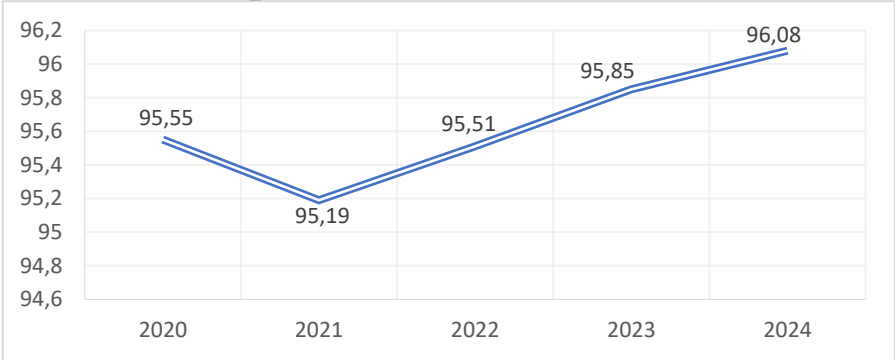


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-40

Gambar 2. 31

Indeks Pembangunan Gender Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menggambarkan kondisi Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

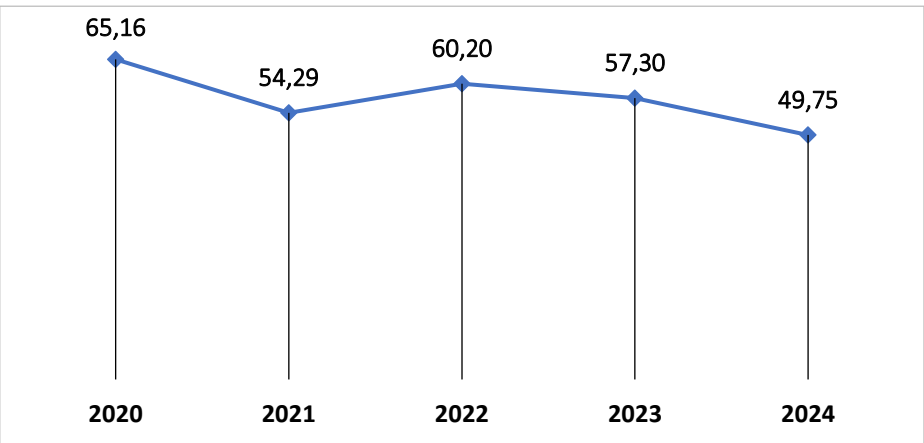
a) Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase angka ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif tetapi mengalami penurunan di tahun 2024, hal ini berarti tingkat ketergantungan di Kabupaten Timor Tengah Utara tergolong rendah, karena jumlah usia penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2. 32

Angka Ketergantungan Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Olahan Bapelitbangda 2025

B. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Menggambarkan kondisi tentang IPTEK dan Inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

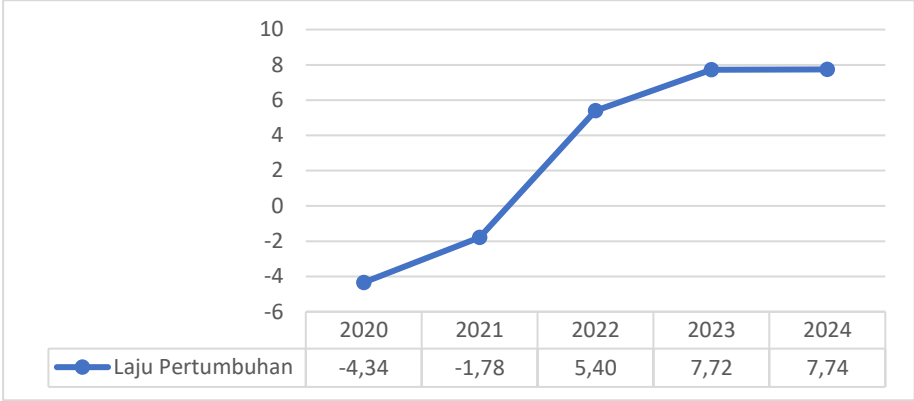
II-41

a) Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara. Sejak tahun 2020-2024 Rasio PDRB Industri Pengolahan menyumbang kurang lebih 1% setiap tahunnya, angka tersebut tergolong rendah karena disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya sumber daya, kurangnya investasi dan kurangnya kebijakan dan teknologi yang mendukung perkembangan industri.

Gambar 2. 33

Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kab.TTU Tahun 2020-2024



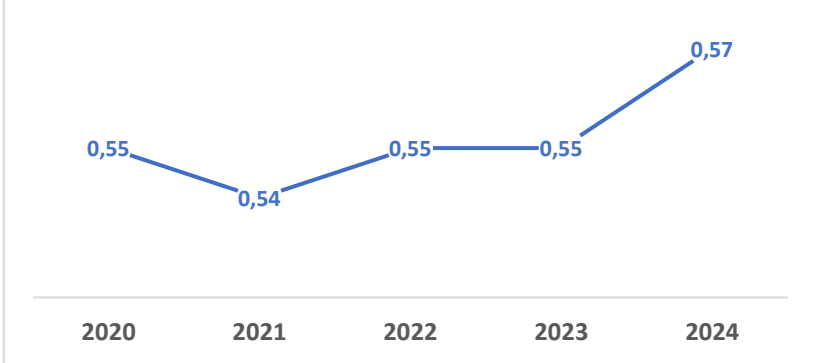
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025

b) Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sejak tahun 2020-2024 rasio PDRB akomodasi makan dan minum mengalami fluktuasi. Sehingga Pemerintah masih perlu tetap berupaya untuk meningkatkan angka rasio kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum terhadap PDRB Daerah karena angka pada tahun terakhir meskipun lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun angka tersebut hanya mencapai 0,57%. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan promosi wisata, meningkatkan sinergi antara pelaku usaha dan sektor pariwisata, melakukan pengembangan potensi destinasi alam dan peningkatan daya tarik produk lokal.

Gambar 2. 34

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2025

c) PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk Fashion, Kuliner, Kriya, Film, Animasi dan Video, Aplikasi, Musik, Seni Pertunjukan, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi dan Radio, Seni Rupa serta Desain produk berupa Periklanan, Penerbitan Arsitektur dan Desain Interior. Perhitungan PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilaksanakan, tetapi dalam Rencana



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-42

Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Timor Tengah utara menargetkan kontribusi PDRB ekonomi kreatif sebesar 319,07 juta di tahun 2030.

d) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Capaian Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 sebesar 0,006 dimana capaian ini sangat rendah. Hal ini di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarkat untuk berusaha. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berupaya untuk meningkatkan Rasio Kewirausahaan Daerah melalui beberapa program yakni *Car Free Day* dan Pasar Rakyat. Program *Car Free Day* dan pasar rakyat tersebut digelar sebagai sarana untuk menghidupkan semangat olahraga masyarakat dan menghidupi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Timor Tengah Utara.

e) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator penting yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, TPAK Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuasi, kemudian menurun pada tahun 2023, dengan proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. 15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab.TTU Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	85,66	99,99	78,13
2021	85,28	71,8	78,41
2022	85,01	75,09	79,95
2023	83,06	68,48	75,77
2024	86,81	78,52	82,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

f) Presentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang Disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Hal ini sudah dimandatkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, serta perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen, dari jumlah pekerja nya. Bahkan juga disebutkan, tidak boleh memberhentikan seseorang pekerja yang mengalami disabilitas karena sesuatu hal, untuk mereka juga diberikan hak untuk kembali bekerja. Pada tahun 2024 penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 15% dari total penyandang disabilitas usia angkatan kerja.

g) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan suatu sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah

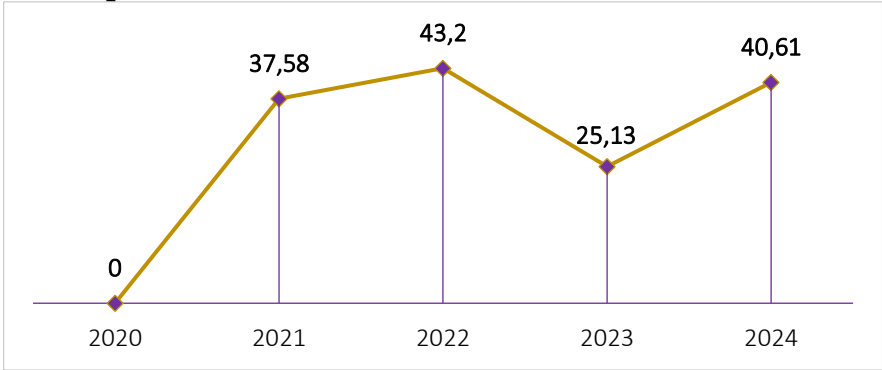


**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-43

yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong setiap pemda untuk berpartisipasi mengikuti penginputan data terkait lomba inovasi daerah, *Innovative Government Award* (IGA) dan memastikan pemda berkomitmen dalam memajukan ekosistem inovasi di daerahnya masing-masing. Inovasi daerah yang dapat dimaksud meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kabupaten Timor Tengah Utara telah berpartisipasi dalam Penilaian dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah sejak tahun 2021. Berikut ini hasil capaian indeks inovasi daerah kabupaten Timor Tengah Utara beberapa tahun terakhir.

Gambar 2. 35
Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024



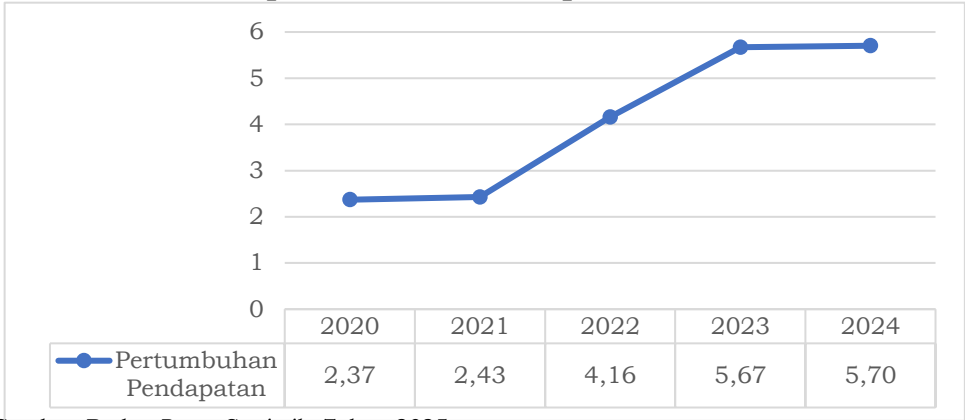
Sumber : BSKDN Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 tidak dapat dinilai karena tidak melakukan penginputan pada sistem. Pada tahun 2021 untuk pertama kalinya Kabupaten Timor Tengah Utara berpartisipasi dan mendapatkan skor sebesar 37,58 dengan kategori Inovatif. Kondisi indeks inovasi daerah pada tahun 2024 merupakan nilai/skor tertinggi selama beberapa tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kontribusi inovasi yang dibuat oleh perangkat daerah/masyarakat. Namun pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas dari inovasi yang sudah ada maupun menciptakan inovasi berdasarkan kajian sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah.

h) Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Perkapita

Laju pertumbuhan pendapatan/ PDRB Perkapita Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan peningkatan setiap tahun dari 2,37 persen di tahun 2,37 terus meningkat sampai dengan 5,70 di tahun 2024.

Gambar 2. 36
Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Perkapita Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025



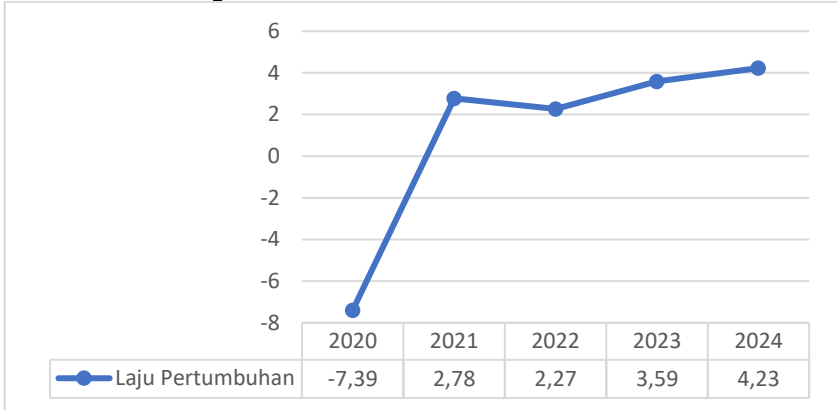
**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-44

i) Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB

Sektor transportasi dan pergudangan mencakup berbagai layanan yang mendukung pergerakan barang dan manusia. Ini termasuk jasa transportasi darat, laut, dan udara, serta layanan pergudangan yang bertujuan untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan. Sektor ini sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Kondisi 3 (tiga) tahun terakhir kontribusi sektor transportasi dan pergudangan menunjukan tren positif. Salah satu faktor pendukungnya adalah semakin banyaknya perusahaan jasa logistik/ekspedisi yang hadir di Kabupaten Timor Tengah Utara dan masyarakat yang makin cakap dalam penggunaan jasa jual-beli *online*.

Gambar 2. 37
Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PRDB Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

C. Penerapan Ekonomi Hijau

Menggambarkan tentang penerapan ekonomi dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi. Pada tahun 2024 capaian indeks ekonomi hijau daerah sebesar 67,04.

b) Presentase Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Indonesia memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar diantaranya, mini/*micro hydro* sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW. Data potensi EBT terbaru disampaikan Direktur Energi Baru Terbarukan dan



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

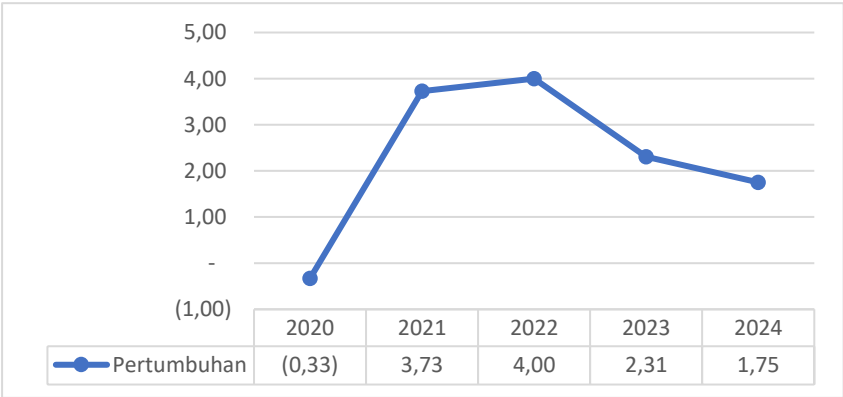
II-45

Konservasi Energi dalam acara *Focus Group Discussion* tentang *Supply-Demand* Energi Baru Terbarukan yang belum lama ini diselenggarakan Pusdatin ESDM. Capaian porsi EBT dalam buaran energi primer pada tahun 2024 sebesar 29,33%. Hal ini menggambarkan bahwa belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan.

c) Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Laju pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan mengalami penurunan antara tahun 2021-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan potensi kehutanan, pertanian dan perikanan belum maksimal.

Gambar 2. 38
Laju Pertumbuhan Kontribus PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

d) Nilai Tukar Petani dan Peternak

Nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara umum NTP menghasilkan 3 klasifikasi, diantaranya adalah:

- NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan menjadi lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada Tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Capaian nilai tukar petani/nilai tukar usaha petani pada tahun 2024 sebesar 95,7 dan nilai tukar peternakan sebesar 97,5. Hal ini menggambarkan adanya kerugian pada petani dan peternak.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-46

e) Nilai Tukar Nelayan

Dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir nilai tukar nelayan mengalami penurunan secara persisten sebesar 4,52%. Pada Tahun 2019 memiliki nilai rata-rata sebesar 96,07%, menurun menjadi 94,20% diTahun 2020, di Tahun berikutnya 2021 menjadi 92,55 dan terus menurun menjadi 91,55% diTahun 2022. Penurunan ini menggambarkan kondisi nelayan mengalami defisit sehingga pendapatan nelayan turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Tabel 2. 55
Nilai Tukar Nelayan di Kab.TTU Tahun 2019 – 2022 (2018 = 100)

Bulan	Nilai Tukar Nelayan (%)			
	2019	2020	2021	2022
Januari	97,10	95,58	93,71	93,11
Februari	95,85	95,97	93,69	91,76
Maret	96,28	94,80	92,38	91,60
April	94,99	94,23	93,48	91,03
Mei	94,49	93,39	93,83	90,72
Juni	95,87	94,90	93,14	91,18
Juli	95,31	95,37	93,07	91,51
Agustus	96,53	94,28	92,75	91,70
September	96,59	92,86	91,26	92,01
Oktober	96,92	92,66	91,14	91,37
November	96,51	92,59	90,97	91,23
Desember	96,39	93,82	91,17	91,36
Rata-Rata	96,07	94,20	92,55	91,55

Sumber: BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Tahun 2023 (Hasil Olah)

D. Transformasi Digital

Menggambarkan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital.

a) Indeks Pembangunan Statistik

IPS adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja institusi pemerintah (KLDI) dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Tujuan perhitungan Indeks Pembangunan Sektoral untuk Mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di K/L/Pemda, Sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI dan data statistik di K/L/Pemda, Mendapatkan satu ukuran terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI dan statistik dan Digunakan untuk menyusun strategi pembinaandatastatistik. Capaian indeks pembangunan statistik pada tahun 2024 sebesar 2,11 dengan predikat cukup. Hal ini menggambarkan belum optimalnya penyediaan data dan informasi terkait kondisi daerah.

b) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membantu pesatnya pertumbuhan industri, mendorong efisiensi dalam pemerintahan, dan operasional bisnis, serta mengembangkan landasan penting menuju perekonomian berbasis teknologi. TIK memiliki kemampuan untuk mengubah cara masyarakat melakukan sesuatu, seperti akses yang lebih cepat terhadap informasi yang relevan, sarana komunikasi yang efisien, peningkatan kemampuan untuk berkomunikasi, serta membuat keputusan berdasarkan informasi. Mengacu pada metodologi yang digunakan oleh International Telecommunication Union (ITU)1, BPS menyusun indeks yang menggambarkan perkembangan TIK Indonesia dengan nama Indeks



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-47

Pembangunan TIK. Indeks ini berskala 0-10 dimana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK yang semakin baik di suatu daerah.

Dalam penghitungan IP-TIK terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi menjadi 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur TIK, subindeks penggunaan TIK, dan subindeks keahlian TIK. Data yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan TIK bersumber dari BPS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sumber data terkait indikator TIK rumah tangga diperoleh dari survei rumah tangga BPS yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 sedangkan data terkait indikator telekomunikasi diperoleh dari data administrasi Kementerian Kominfo. Capaian Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2024 sebesar 5,3. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan TIK di Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat rendah.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

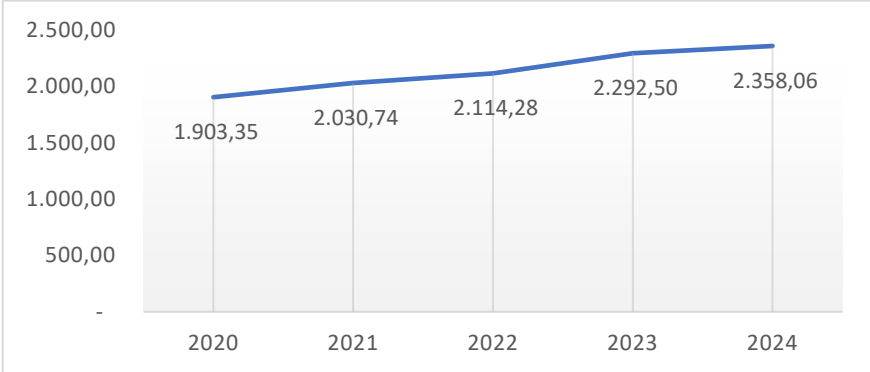
Menggambarkan kondisi integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

a) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain). Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Pembentukan modal tetap bruto (PDRB) di Kabupaten Timor Tengah Utara selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami peningkatan dari 1.903,35 di tahun 2020 meningkat menjadi 2.358,06 di tahun 2024.

Gambar 2. 39
Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kab.TTU Tahun 2020-2024 (juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2025

b) Net Ekspor Barang dan Jasa

Dalam periode tahun 2020-2024 ekspor barang dan jasa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai ekspor komoditas dan

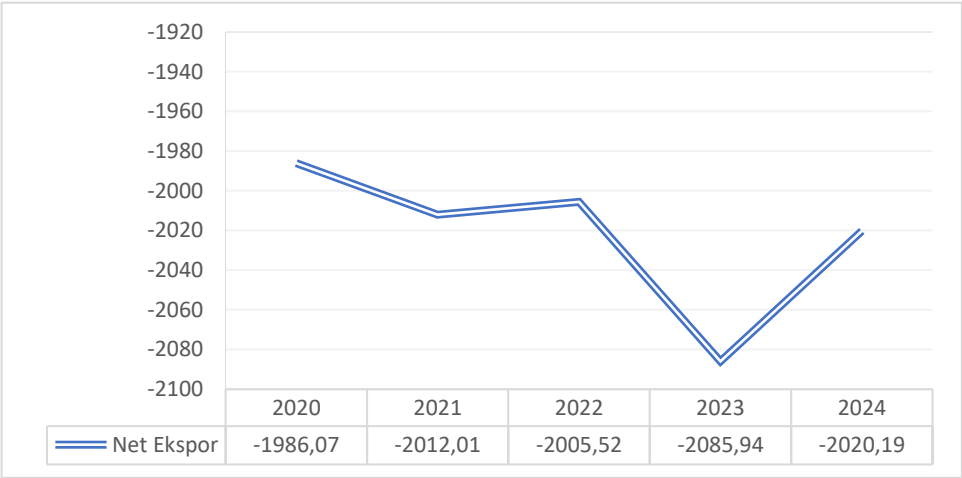


Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-48

pengembangan serta pemasaran produk unggulan daerah yang belum optimal. Selain itu kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan produk asli daerah.

Gambar 2. 40
Ekspor Barang dan Jasa (Milliar) di Kab.TTU Tahun 2020-2024

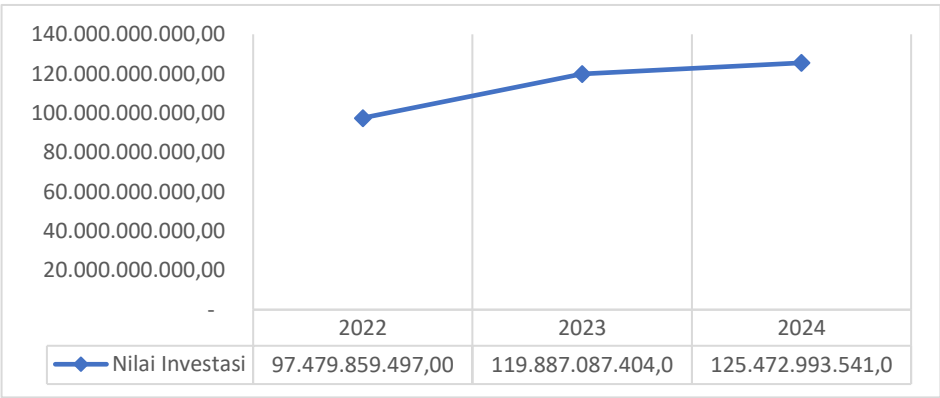


Sumber : Timor Tengah Utara dalam Angka Tahun 2024

c) Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi, baik dari sektor publik maupun swasta, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari Rp97.479.859.497,00 di tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 11,57% menjadi Rp125.472.993.541,00 di tahun 2024. Selengkapny dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 41
Nilai Investasi di Kab.TTU Tahun 2022-2024



Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

F. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menggambarkan kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta Pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan.

a) Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur adalah salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja daerah berdasarkan kualitas pelayanan infrastruktur pendidikan, Infrastruktur kesehatan, infrastruktur pekerjaan umum dan presentase rumah layak huni. Capaian indeks infrastruktur daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebesar 62,75 persen dengan capaian :



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-49

- 1) Infrastruktur pendidikan (ruang kelas) 71,00%;
- 2) Infrastruktur kesehatan 74,40%;
- 3) Infrastruktur pekerjaan umum 74,08%;
- 4) Rumah layak huni 63,19%.

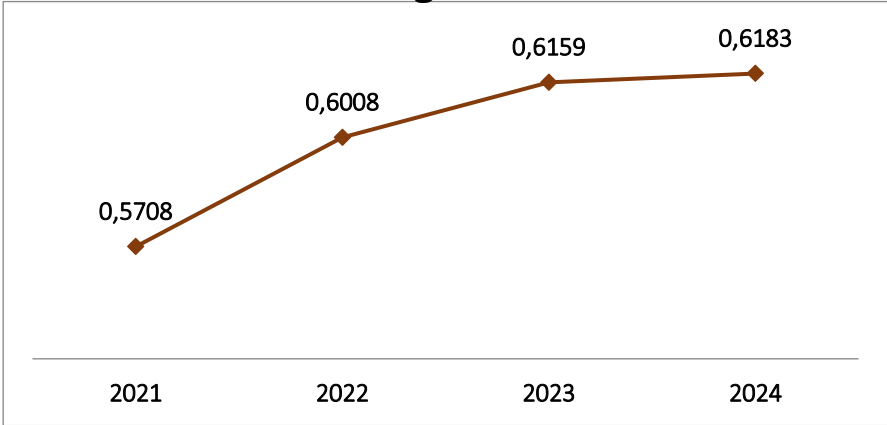
Untuk meningkatkan nilai indeks infrastruktur daerah maka pemerintah berupayan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan rumah layak huni.

b) Indeks Desa Membangun

Desa Mandiri adalah gambaran dari kesuksesan pembangunan desa. Desa Mandiri memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Indeks Membangun Desa (IDM) untuk desa mandiri adalah lebih besar dari 0,8155. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Capaian IDM Kabupaten Timor Tengah Utara selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, namun pemerintah masih perlu berupaya karena sampai dengan tahun 2024 belum ada Desa yang menyandang status Desa Mandiri.

Gambar 2. 42

Capaian Indeks Desa Membangun Kab.TTU Tahun 2021-2024



Sumber : Kementrian Desa, Tahun 2025

Tabel 2. 16

Status Indeks Desa Membangun Kab.TTU Tahun 2020-2024

No	Status Desa	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	0	0	0	0	0
2	Desa Maju	1	1	2	4	4
3	Desa Berkembang	35	45	81	113	122
4	Desa Tertinggal	119	112	76	64	55
5	Desa Sangat Tertinggal	4	2	1	1	1
Total		159	160	160	182	182

Sumber : Dinas PMD Kab.TTU

Berdasarkan data pada tabel d iatas maka dapat disimpulkan bahwa persentase Desa Mandiri sebesar 0%, Desa Maju sebesar 2,20%, Desa Berkembang sebesar 67,03%, Desa Tertinggal 30,22% dan Desa Sangat Tertinggal sebesar 0,55% pada tahun 2024. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir belum ada Desa yang menyandang status Desa Mandiri tetapi dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah status Desa Maju dan Berkembang serta penurunan jumlah status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Hal ini menandakan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan ekologi 182 Desa di Kabupaten Timor Tengah Utara semakin membaik setiap tahunnya.



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-50

c) Koperasi Merah Putih

Koperasi merah putih dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan koperasi merah putih bertujuan untuk menjadikan koperasi merah putih sebagai motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dengan target pembentukan hingga 80.000 koperasi desa yang profesional, digital, dan mampu menjadi pusat distribusi logistik, sembako, dan layanan publik lainnya.

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 182 Desa dan 11 Kelurahan yang sudah membentuk struktur kepengurusan Koperasi merah putih. Pembentukan koperasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara di harapkan dapat menggerakkan ekonomi desa dan kelurahan melalui koperasi yang aktif dan produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menciptakan lapangan kerja, membangun ekosistem koperasi modern yang profesional dan berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan desa/kelurahan.

d) Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan Kawasan Transmigrasi Ponu

Indikator capaian dimensi infrastruktur dasar di kawasan perbatasan, pantai utara dan kawasan transmigrasi Ponu merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan seperti ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai akses jalan yang baik serta infrastruktur dasar lainnya seperti hunian yang layak, ketersediaan air bersih dan lain sebagainya. Capaian Dimensi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan kawasan transmigrasi Ponu pada tahun 2024 sebesar 14,52. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan belum optimal.

e) Capaian Dimensi Perekonomian di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan Kawasan Transmigrasi Ponu

Kawasan perbatasan Pantai Utara dan KT Ponu memiliki berbagai macam potensi seperti perikanan, pariwisata, garam dan pertanian yang apabila dikembangkan dengan baik maka akan mampu meningkatkan perekonomian di kawasan tersebut. Tetapi terdapat beberapa permasalahan seperti belum tertatanya objek pariwisata, keterbatasan armada dan alat tangkap ikan, ketersediaan air untuk pengolahan sawah saat musim panas. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berkomitmen untuk membangun kawasan perbatasan pantai utara dan KT Ponu dengan mendorong investor untuk membangun hotel, mengolah potensi garam serta mendorong pembangunan bendungan tamtore selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan produksi nelayan, produksi jagung, meningkatkan keaktifan pasar untuk mendorong perekonomian dalam kecamatan di wilayah perbatasan, Meningkatkan produktifitas UMKM dan meningkatkan kunjungan objek wisata bahari. Capaian Dimensi Perekonomian di Kawasan Perbatasan, Pantai Utara dan KT Ponu pada tahun 2024 sebesar 38,93.

f) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki posisi wilayah berbatasan langsung dengan Timor Leste sehingga ditetapkan Pengembangan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi kawasan perbatasan Negara RI dengan Timor Leste. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Indikator ini menjadi salah satu tolak ukur dalam upaya meningkatkan pelayanan pengelolaan kawasan perbatasan daerah. Capaian indeks pengolahan kawasan perbatasan di tahun 2024 sebesar 0,51%



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-51

G. Stabilitas Ekonomi Makro

Menggambarkan kondisi stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerintahan.

a) Rasio Pajak Terhadap PDRB

Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan daerah dari pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu daerah selama periode tertentu, yang mana PDBB terdiri dari belanja konsumen, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor bersih. Secara umum, *tax ratio* berperan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan daerah dari pajak. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi *tax ratio* suatu daerah di antaranya kondisi perekonomiannya, kepatuhan wajib pajak dan kebijakan fiskal pemerintah. Semakin tinggi rasio pajak suatu daerah, maka mengindikasikan baiknya kondisi perekonomian seiring besarnya penghasilan masyarakat yang masuk ke penerimaan pajak.

Dalam periode tahun 2020-2024 tren Rasio penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan tren yang fluktuatif .

Tabel 2. 17
Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (Juta Rupiah)
Tahun 2020-2024

Tahun	Pajak Daerah	PDRB (ADHB)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)=2/3
2020	7.947,02	4.082.274,50	0,0019
2021	9.968,28	4.222.698,50	0,0024
2022	9.872,77	4.493.531,10	0,0022
2023	11.409,29	4.819.440,00	0,0024
2024	9.689,84	5.115.510,00	0,0019

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Bapelitbangda,Tahun 2025

b) Laju Inflasi

Meningkatnya harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu yang disebabkan oleh penurunan nilai uang dikenal dengan istilah *inflasi*. Ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi antara lain karena kapasitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa melebihi volume persediaannya, naiknya harga struktur input barang impor yang sangat rentan terhadap kurs mata uang asing, struktur ekonomi yang kurang seimbang dan tingginya jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Karena itu upaya pencegahan inflasi harus berawal dari pengamatan yang cermat terhadap faktor penyebab utama inflasi di suatu wilayah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 3 (tiga) wilayah yakni Kota Kupang, Maumere dan Waingapu. Kabupaten TTU tidak masuk dalam wilayah perhitungan inflasi, sehingga untuk menentukan besaran angka inflasi maupun deflasi menggunakan pendekatan *City Sister*



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-52

yakni melihat nilai inflasi wilayah yang satu daratan dengan Kabupaten TTU, sehingga besaran nilai inflasi Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada besaran inflasi Kota Kupang.

Adapun laju inflasi umum yang terjadi berdasarkan akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) per bulan di Kota Kefamenanu terhadap tujuh kelompok komoditas barang dan jasa. Inflasi umum pada tahun 2019 adalah 0,50%, Tahun 2020 keadaan Bulan Desember adalah 0,77%. Tahun 2021 inflasi tahunan sebesar 1,86%, Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 7.07% kenaikan inflasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan dan BBM. Pada tahun 2023-2024 inflasi tahunan mengalami penurunan menjadi 2.21% di tahun 2023 dan 1,53% di tahun 2024. Di Kabupaten TTU, keberadaan makanan di pasaran lebih dipengaruhi oleh faktor musim yang turut menentukan bulan-bulan kapan terjadinya inflasi tertinggi ataupun terendah.

c) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. Capaian total dana pihak ketiga pada tahun 2024 sebesar 37,37%.

d) Total Kredit/PDRB

Kredit dapat membantu sektor-sektor membiayai aktivitas mereka dan memperkuat perekonomian. Kredit juga dapat memberikan kontribusi bagi nilai produksi barang dan jasa, yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Total kredit terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah utang yang tertuang pada akhir triwulan, dibagi dengan jumlah PDRB nominal dari empat triwulan terakhir. Total kredit/PDRB di kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 sebesar 30,52%.

e) Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas yang efektif, kinerja efisien, tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan indikator ini sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Pada tahun 2024 Indeks Keuangan Daerah di tetapkan sebagai baseline sebesar 3,68 persen. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berkomitmen untuk menghitung indeks akses keuangan daerah dengan menetapkan target peningkatan sebesar 3,83 persen dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Menggambarkan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang mengelola sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-53

a) Indeks Pembangunan Hukum

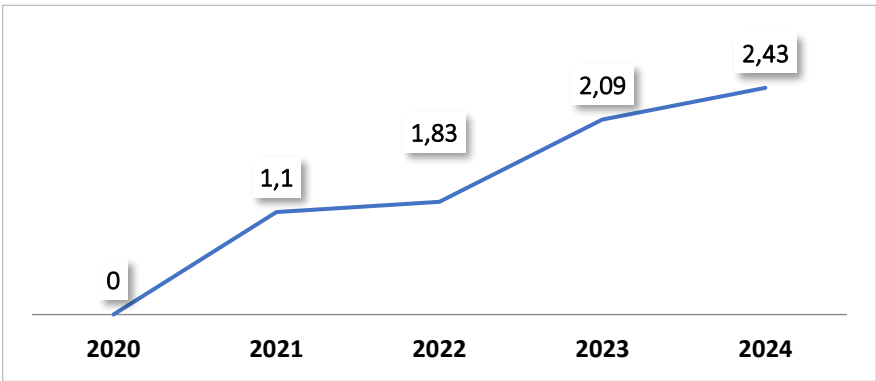
Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran 5 (lima) pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia yaitu Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum. Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan menggunakan beberapa metode pengukuran setiap tahunnya seperti survei masyarakat, wawancara pakar dan pengumpulan data administrasi Kementerian/ Lembaga. Capaian Indeks Pembangunan Hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebesar 0,6. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan hukum di Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan dengan optimal.

b) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah berpartisipasi dalam penilaian Indeks SPBE sejak tahun 2019 melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Di mana perolehan Indeks SPBE pada tahun 2019 sebesar 1,4 namun pada tahun 2020 Indeks SPBE menurun drastis menjadi 0 karena tidak dilaksanakannya penilaian akibat Pandemi Covid-19. Kemudian pada tahun 2021 Indeks SPBE terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,43 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem SPBE di Kabupaten Timor Tengah Utara semakin membaik, namun berdasarkan hasil evaluasi penilaian SPBE oleh Kemenpan RB masih banyak catatan yang perlu diperbaiki salah satunya adalah penyusunan dokumen Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kabupaten. Berikut ini hasil capaian indeks SPBE kabupaten Timor Tengah Utara selama beberapa tahun terakhir:

Gambar 2. 43
Capaian Indeks SPBE Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Kemenpan RB, 2024

c) Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas,

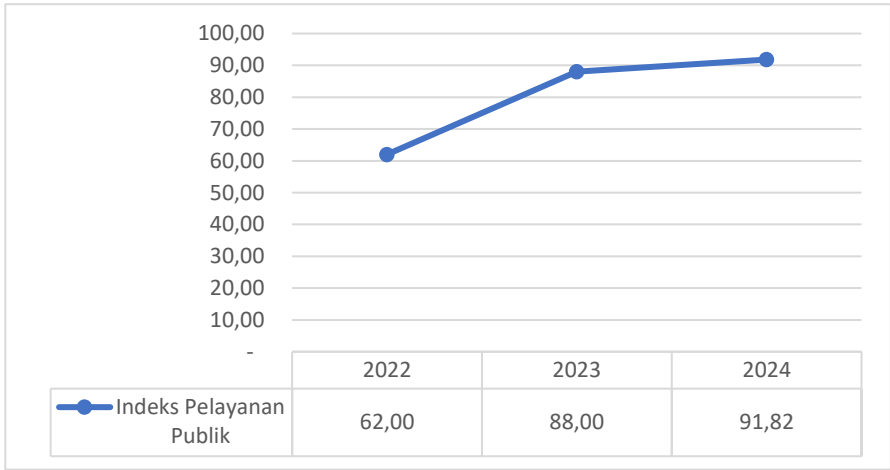


**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-54

transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Capaian indeks pelayanan publik dalam periode tahun 2022-2024 mengalami peningkatan dikarenakan semakin membaiknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Gambar 2. 44
Indeks Pelayanan Publik

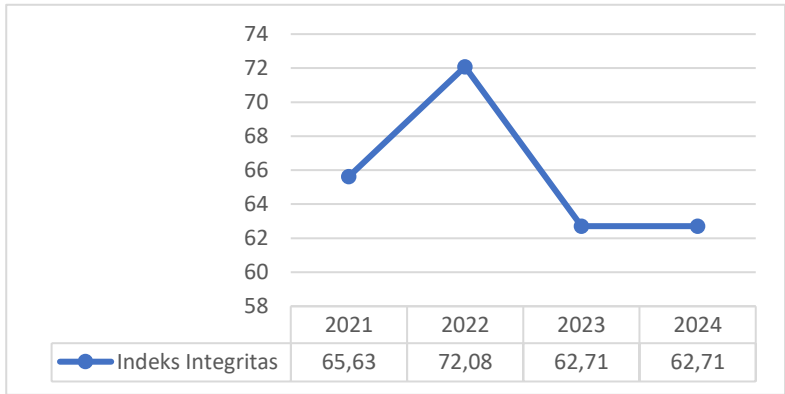


Sumber Data : Bagian Organisasi Setda TTU, Tahun 2025

d) Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional digunakan untuk mengukur tingkat risiko korupsi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah melalui persepsi dan pengalaman masyarakat, serta data objektif dari pihak internal lembaga, masyarakat pengguna layanan, dan para pihak pemangku kepentingan. Penilaian Indeks Integritas Nasional dilaksanakan melalui Survei Penilaian Integritas yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2019 dan mulai dilakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten sejak tahun 2021. Survei Penilaian Integritas dilakukan dengan menggabungkan penggunaan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui survei yang dilakukan terhadap pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan dari K/L/PD tersebut, hingga ekspert yang mengerti mengenai kondisi integritas, risiko korupsi di dalam instansi, serta upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Gambar 2. 45
Indeks Integritas Kab.TTU Tahun 2021-2023



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2024

Capaian Integritas Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuasi dan berada pada kategori rentan selama tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa masih rentan terjadi tingkat resiko korupsi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.



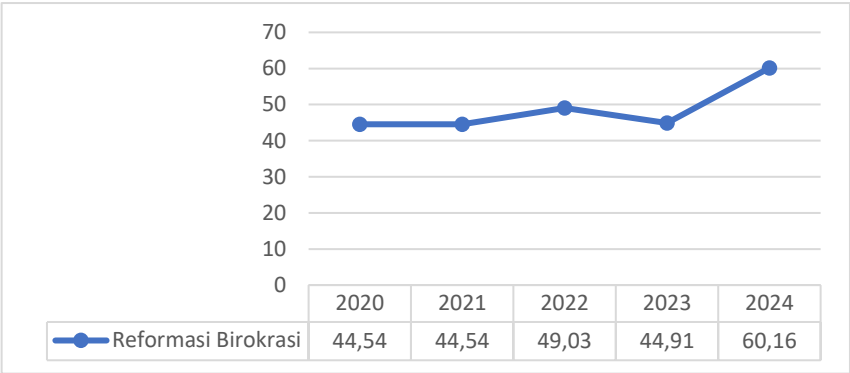
**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-55

e) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Gambar 2. 46
Indeks Reformasi Birokrasi Kab.TTU Tahun 2020-2024



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda TTU

f) Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan atau kesiapan suatu entitas, dalam hal ini organisasi pemerintah, dalam menerapkan dan menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk mengukur sejauh mana SPIP telah diimplementasikan dan seberapa efektifnya dalam mencapai tujuan organisasi, seperti efisiensi, efektivitas, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Capaian maturitas SPIP di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 2,4 atau berada pada level 2 artinya upaya pengendalian mulai terdokumentasi dan beberapa proses mulai berjalan.

g) Presentase Perangkat Daerah yang Membangun Zona Integritas

Tujuan Pembangunan Zona Integritas yakni untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI juga bertujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menargetkan pertumbuhan Presentase Perangkat Daerah yang Membangun Zona Integritas sebesar 10,45 persen di tahun 2030 dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

h) SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan

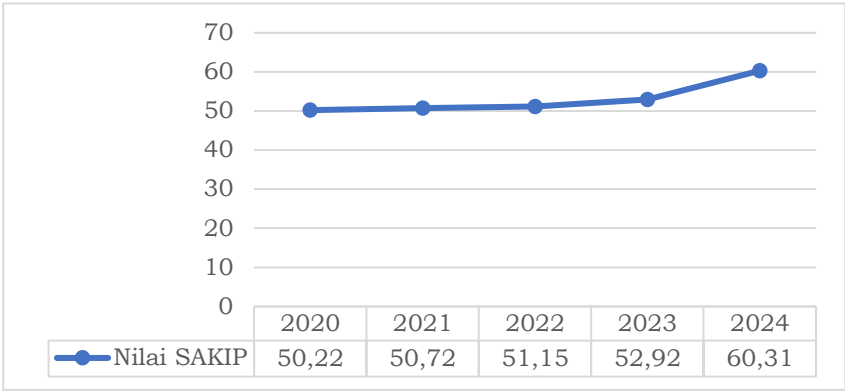


**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-56

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 2. 47
**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kab.TTU Tahun 2020 - 2024**



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda TTU

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Menggambarkan tentang kondisi Pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan Hak Asasi Manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

a) Presentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan.

Peran Satpol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Pada Tahun 2024 persentase penegakan perda hanya mencapai 25% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 100%. Terjadi penurunan sebesar 75% karena jumlah perda yang ditegakkan pada tahun 2024 hanya sebanyak 3 perda dari 12 perda yang ada.

b) Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi

Pesta demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum atau yang dikenal dengan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) melainkan juga Pemilihan Kepala Daerah atau yang disebut dengan Pilkada baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pilkada 2024 yang digelar secara serentak di Indonesia telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), partisipasi pemilih di Pilkada 2024 menyentuh angka 71 persen. Meski partisipasi pemilih mencapai 71 persen, angka tersebut masih tergolong



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-57

rendah jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 yang menyentuh angka 76,09 persen serta jauh lebih rendah dari angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden tahun 2024 yang mencapai 81,78%. Tingkat partisipasi pemilu di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 adalah sebesar 74,79%. Rendahnya partisipasi pemilih tersebut disebabkan oleh banyak hal di masih kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya demokrasi.

c) Indeks Rasa Aman

Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Mengingat rasa aman merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan oleh warga. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah indeks yang berkaitan dengan keamanan manusia, yang dikenal sebagai Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks Rasa Aman dirancang untuk menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2024 sebesar 56% yang menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara belum merasa aman berada di tempat-tempat tertentu.

d) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan instrumen yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan di suatu daerah. Stabilitas keamanan ini berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban, seperti demonstrasi, yang dapat berdampak pada ketentraman masyarakat. Indeks ini berfungsi sebagai salah satu parameter yang dipertimbangkan oleh investor saat akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Timor Tengah Utara. Capaian Indeks ketentraman dan ketertiban Kab.TTU pada tahun 2024 sebesar 20%, hal ini menunjukkan belum optimalnya penanganan masalah ketentraman dan ketertiban yang terjadi di kota maupun di pedesaan.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menggambarkan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan daerah di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antardaerah yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Kabupaten Timor Tengah Utara pada kawasan sekitar.

a) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 12 pilar pengukuran, yakni institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Berikut capaian IDSD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022-2024.

IDSD Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2022-2023 pilar 1 tidak memiliki skor karena tidak dapat diukur. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel diawah ini:



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-58

Tabel 2. 18
Indeks Daya Saing Daerah Kab.TTU Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Capaian IDSD Tahun 2022													
Nasional	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,04	3,29	2,92	2,72	3,50	3,39	4,92	3,54	2,39	0,26	5,00	2,44	3,20
Timor Tengah Utara	-	1,65	2,84	2,02	3,62	2,89	2,94	3,11	1,38	0,19	5,00	1,84	2,24
Capaian IDSD Tahun 2023													
Nasional*	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,11	2,21	3,00	3,45	3,54	3,46	4,92	3,18	3,03	4,09	2,64	3,39	3,42
Timor Tengah Utara	-	1,58	4,04	3,64	3,64	3,09	3,03	3,20	1,34	3,57	1,58	2,43	2,50
Capaian IDSD Tahun 2024													
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,14	2,63	3,26	4,34	3,57	3,92	4,74	1,88	2,58	4,11	2,17	3,6	3,41
Timor Tengah Utara	4,00	2,70	4,17	4,00	3,55	3,86	2,88	2,91	2,43	3,59	3,35	2,80	3,35

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

b) Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota

Kontribusi PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir berkisar pada angka 4% dengan tren negatif dimana terdapat penurunan setiap tahunnya dikarenakan semakin tingginya angka PRDB Provinsi sedangkan angka PDRB Kabupaten semakin menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten agar dapat meningkatkan PDRB melalui pengembangan sektor-sektor yang berkontribusi.

Tabel 2. 19
Proporsi Kontribusi PDRB Kab.TTU Terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Prov. NTT	PRDB Kab. TTU	%
2020	106.482,45	4.082,27	3,83
2021	110.881,41	4.227,70	3,81
2022	118.722,45	4.493,89	3,79
2023	128.522,85	4.819,91	3,75
2024	137.282,48	5.155,51	3,76

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

c) Jumlah Kerjasama Antar Daerah

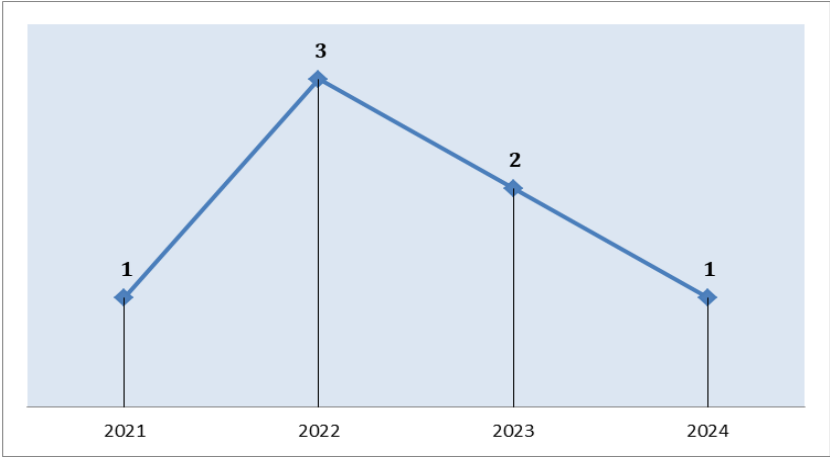
Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-59

Gambar 2. 48
Jumlah Kerja Sama Antar Daerah Tahun 2021-2024



Sumber : Bagian Pemerintahan Setda TTU, Tahun 2025

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kerja sama Pemda TTU dan daerah lain masih rendah. Pada tahun 2021 terdapat 1 kerja sama yang merupakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Tera Ruang dan Pengawasan Metrologi Legal. Pada Tahun 2022 terdapat 3 kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni kerja sama tentang (1) Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. TTU, (2) Pelayanan Rujukan Pasien dan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan (3) Percepatan Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Pengawasan Kearsipan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2023 terdapat 2 kerja sama yakni (1) kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa dan (2) Kerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 1 kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah.

d) Presentase Fasilitasi Pemasangan Pilar Batas Desa

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemasangan Pilar Batas Desa yakni memfasilitas proses penetapan pilar batas desa dengan memperhatikan beberapa tahap penetapan batas desa yakni pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan petas dasar dan pembuatan garis batas di atas peta. Penggunaan Indikator Presentase Pilar Batas Desa untuk memastikan setiap desa di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki pilar batas desa dengan menetapkan target 50 persen di tahun 2030 dalam rencana menengah daerah.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Menggambarkan kinerja urusan Pemerintahan Daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan mengacu kepada hasil evaluasi RPJMD Kab.TTU Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2029. Data capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-60

Tabel 2. 20
Capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah
Kab.TTU Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI							
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				BASELINE 2024
			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Tahun	13,31	13,32	13,34	13,35	13,36
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,81	7,96	7,97	8,16	8,17
3	Hasil Pembelajaran:						
	i) Literasi Membaca (SD/Mi)	%	-	37,08	42,03	43,27	43,12
	ii) Numerasi (SD/Mi)	%	-	28,71	32,46	36,5	42,35
	i) Literasi Membaca (SMP/MTs)	%	-	48,81	52,28	56,78	56,45
	ii) Numerasi (SMP/MTs)	%	-	49,81	52,28	54,8	55,49
4	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Ruang Kelas)	%	-	-	69,37	69,64	71,00
5	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Kawasan Perbatasan)	%	-	-	52,27	52,27	52,27
6	Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	-	-	64,88	72,00	97,51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,96	67,09	67,35	67,61	71,02
2	Indeks keluarga Sehat	Indeks	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
3	Kesehatan Ibu dan Anak						
	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	131,14	221,6	254,24	188,75	188,75
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	12,79	5,06	9,50	5,29	8,80
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	-	46,7	38,7	42,7	47,4
	Prevalensi Wasting	%	5,5	8,1	9,4	9,3	8,7
4	Cakupan penemuan dan pengobatan Kasus HIV/AIDS (%)	%	-	-	36,84	92,06	92,06
5	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	24,6	18,18	42,1	40,10	54,00
6	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	93,40	94,90	84,4	92,70	89,90
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	52,51	58,89	98,19	100	100
8	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit)	%	65,23	67,72	69,62	70,56	74,40
9	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit) (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	65,23	67,72	69,62	70,56	74,40
10	Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	-	-	81,61	81,61	80,54
11	Maturitas BLUD	Skor					74,06
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	75,25	72,38	74,14	74,08	74,08
2	Rasio elektrifikasi	%	91,46	85,02	91,96	93,26	96,91
3	Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	%	83,12	87,35	87,42	88,71	92,51
4	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih	%	83,12	87,35	87,42	88,71	92,51
5	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	79,3	70,03	81,98	80,56	80,84
6	Jalan dalam Kota Kondisi baik (Kewenangan Kabupaten)	%	-	-	-	-	49,54
7	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Kawasan Perbatasan	%	75,25	72,38	74,14	74,08-	74,08
8	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	47,13	47,13	35,21	33,78	38,72
10	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%			51,88	72,61	83,85
11	Rasio Jaringan Irigasi	%			-	-	10,88
12	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio			0,660	0,644	0,644
13	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%			57,39	50	100



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-61

INDIKATOR KINERJA KUNCI							
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				BASELINE 2024
			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase Rumah Layak Huni	%			62,68	63,00	63,19
2	Persentase Rumah Layak Huni pada Kawasan Perbatasan	%	-	-	-	-	63,19
3	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	-	-	0,12	0,13	0,14
4	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%			99,65	90,11	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks			125,00	112,65	130,92
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	-	-	-	-	0,35
3	Indeks Rasa Aman	Indeks	-	-	-	-	56,00
4	Persentase Penegakan Perda	%	-	-	47,00	26,00	25,00
5	Jumlah Angka Kriminalitas	Angka	-	-	20,00	17,00	17,00
6	Jumlah Angka Kriminalitas dalam Kota	Angka	-	-	20,00	17,00	17,00
7	Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	%	-	-	64,96	96,07	82,18
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	Persentase Kemiskinan (%)	%	22,28	22,62	21,50	21,85	20,89
2	Kemiskinan Ekstrem	%	10,73	4,84	2,48	2,28	2,28
3	Capaian SPM Bidang Sosial	%	-	-	32,02	97,82	99,73
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	%			96,49	96,97	98,02
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,26	3,88	3,51	1,96	1,82
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%			-	-	38,2
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	78,13	78,41	79,95	75,77	82,66
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks			-	-	50,46
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,55	95,19	95,51	95,85	96,08
3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,797	0,506	0,54	0,52	0,44
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	99,99	71,8	75,09	68,48	78,52
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	68,61	66,47	69,36	72,96	73,61
2	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	-	67,4	74,80	74,90	80,10
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	13,97	10,42	14,40	17,84	17,84
4	Ketersediaan Protein Perkapita	%	53,83	56,79	57,12	54,20	54,20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	38,33	62,81	75,56	73,30	75,32
2	Proporsi Rumah Tangga (RT) Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%			-	-	43,76
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks					29,78
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Indeks			83,04	54,61	88,6
5	Indeks Kualitas Air (%)	Indeks			47,22	63,33	71,70
6	Indeks Kualitas Udara (%)	Indeks			93,02	92,66	94,51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%			5,61	11,74	21,71
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	77,18	82,5	86,00	84,82	85,24
3	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran)	%	42,51	50,81	47,77	52,24	84,83
4	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan (KTP)	%	81,18	89,62	91,52	94,41	98,16
5	Persentase Keluarga yang memiliki Akta Nikah	%	56,59	49,84	54,6	56,02	58,30
6	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	86,09	92,78	97,97	99,59	98,47



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-62

INDIKATOR KINERJA KUNCI							
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				BASELINE 2024
			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	-	0,5708	0,6008	0,6159	0,6183
2	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	-	-	40,00	40,00	45,00
3	Jumlah Desa Maju	Desa	1	1	2	2	4
4	Persentase BumDes Aktif	BumDes	-	-	16,48	19,23	27,47
5	Persentase Keaktifan PKK	%	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	-	42,92	43,09	43,23	43,41
2	Angka Ketergantungan	%	65,16	54,29	60,20	57,30	49,75
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,24	1,47	1,40	1,58	1,57
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
1	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	%			2,27	3,59	4,23
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,4	1,1	1,83	2,09	2,43
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%			-	-	0,006
2	Persentase Koperasi Aktif	%			65,98	65,98	65,98
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	1.903,35	2.030,74	2.114,28	2.292,50	2.358,06
2	Pertumbuhan Nilai Investasi	%			- 21,69	18,69	4,65
3	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar			97,47	119,88	125,47
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Persentase Wirausaha Muda	%				8	20
2	Jumlah Prestasi Olahraga (Jumlah Atlet)	Jumlah			68	48	50
3	Persentase Pemuda yang Dibina	%			15	14	15,16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	-	-	-	1,41	2,11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Keamanan)	Indeks	1,4	1,1	1,83	2,09	2,43
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks			-		50,70
2	Jumlah Kegiatan Prosesi Adat Rutin yang dilakukan	Kegiatan			-	-	17
3	Jumlah Warisan Budaya Atoin Meto yang dilestarikan	Jumlah			-	-	175
4	Persentase Satuan Pendidikan, Unit Kerja Pemerintah serta BUMN/BUMD/BUMDes yang menerapkan Nilai Budaya Atoin Meto	%			-	-	66,67
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	27,12	68,09	70,67	53,81
2	Perpustakaan Digital	Perpustakaan	1	1	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	70,11	74,44	75	75	75,94
2	Persentase Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	%	-	-	-	-	55,81
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-63

INDIKATOR KINERJA KUNCI							
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				BASELINE 2024
			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Nilai Tukar Nelayan	Nilai					91,55
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai					91,55
3	Pertumbuhan Produksi Nelayan dan Pembudidaya Perikanan	%			9,53	- 7,03	7,56
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
1	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Miliar)	Miliar	16,89	17,15	24,53	26,61	29,43
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang			-	-	18.671
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
1	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Petani	Nilai			-	-	95,7
2	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi pada Kawasan Perbatasan	%			-	-	5,02
3	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung pada Kawasan Perbatasan	%			-	-	4,41
4	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi	%			-	-	5,02
5	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung	%			-	-	4,41
6	Nilai Tukar Peternak/Nilai Tukar Usaha Peternak	Nilai					97,5
7	Luasan Hijauan Pakan Ternak	Ha					1.465
8	Populasi ternak Sapi	Ekor					172.064
9	Populasi ternak Babi	Ekor					110.714
10	Populasi ternak Kambing	Ekor					68.253
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
1	Net Ekspor Barang dan Jasa	Miliar			-2005,52	-2085,94	-2020,19
2	Persentase Kecamatan di Kawasan Perbatasan yang memiliki pasar Aktif	%			-	-	100,00
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Miliar			264,5	299,05	321,12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (Miliar)	Miliar			48,98	55,61	63,57
2	Proporsi IKM Non Pangan pada Level Kabupaten	%			-	14,29	35,85
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	IKM			-	-	742
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
1	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%					50,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DAERAH						
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level					Level 7
2	Bantuan Sosial Tersalurkan	%					100
3	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%			4,55	7,49	3,60
4	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks					3,68
5	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	%					37,37
6	Total Kredit/PDRB (%)	%					30,52
7	Laju Inflasi	%	0,77	1,86	7,07	2,21	1,53
8	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu			45.071	47.164	47.413
9	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks					0,60
10	Pembentukan dan Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	Desa					9
11	Jumlah Kerjasama	Kerjasama		8	20	13	21
12	Capaian SPM Kab.TTU	%			66,75	81,27	93,33
14	Indeks Pelayanan Publik	Indeks			62,00	88,00	91,82
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	44,54	46,3	49,03	44,91	60,16
16	SAKIP	Nilai	50,22	50,72	51,15	52,92	60,31
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Indeks			74,82	83,48	83,48
	KEUANGAN	f					
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks			-	-	68,17
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Pertumbuhan PAD	%			- 40,07	27,48	- 5,05
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio			0,00220	0,00251	0,00191
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%			3,79	5,10	4,29
	KEPEGAWAIAN						



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-64

INDIKATOR KINERJA KUNCI							
NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				BASELINE 2024
			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Indeks Merit Sistem	Indeks	belum ada penilaian	belum ada penilaian	0,06	0,27	0,31
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi dengan Minimal Kompetensi Dasar	%				100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks		37,58	43,2	23,15	40,61
2	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian/Kajian	Rekomendasi					1
PENGELOLAAN PERBATASAN							
1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks					0,51
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
INSPEKTORAT DAERAH							
1	Indeks Integritas Nasional	Indeks			-	-	62,71
2	Maturitas SPIP	Nilai					2,4
UNSUR KEWILAYAHAN							
KECAMATAN							
1	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%			40,00	40,00	45,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	79,87	81,07	83,93	85,64	84,25
2	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%					75,00
3	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	%					74,79
4	Jumlah Event Keagamaan terselenggara	Event	15	17	20	22	25

Sumber: Olahan Bapelitbangda, 2025

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah Kab.TTU Tahun 2020-2024, ditemukan beberapa capaian yang belum terisi dikarenakan:

- a) Waktu efektif penyelenggaraan pemerintahan daerah pada perodesasi RPJMD Kab.TTU tahun 2021-2026 hanya berdurasi 3,5 tahun yang mengakibatkan evaluasi RPJMD Kab.TTU tahun 2021-2026 dimulai pada tahun 2022-2024.
- b) Dalam rangka perwujudan Landasan Transformasi menuju TTU Emas 2045, maka ditetapkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur pembangunan landasan yang sebelumnya tidak termuat dalam RPJMD Kab.TTU Tahun 2021-2026.
- c) Adanya perubahan regulasi yang mewajibkan beberapa indikator kunci, wajib dimasukkan dalam IKK RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2029 yang akan termuat dalam Bab IV dokumen ini.
- d) Adanya keterbatasan anggaran pada beberapa urusan pemerintahan yang disebabkan oleh perubahan regulasi terkait penganggaran Dana Alokasi Umum yang berimbas pada capaian kinerja kunci urusan pemerintahan.
- e) Terdapat beberapa indikator yang pengukurannya akan dilakukan mulai tahun 2025 dikarenakan pada periode RPJMD 2021-2026, pengukuran terkait indikator tersebut masih berada pada level Nasional dan Provinsi.

2.1.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan sarana dalam mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan

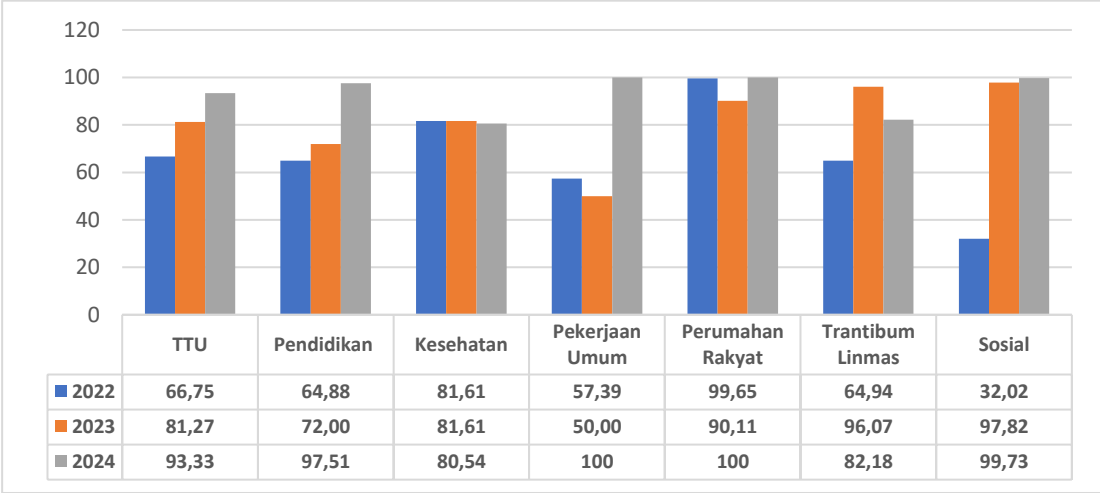


**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-65

rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial. Selanjutnya terkait dengan capaian SPM masing-masing urusan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 49
Realisasi Capaian SPM Tahun 2022-2024



Sumber: Bagian Pemerintahan Setda TTU.Tahun 2025

Tabel 2. 21
Realiasai Capaian SPM Berdasarkan Kategori Indeks Pencapaian SPM Tahun 2022-2024

Bidang Urusan	Kategori Indeks Pencapaian SPM	2022	2023	2024
Bidang Urusan Pendidikan	Pendidikan Usia Dini	81.39	79.92	98,43
	Pendidikan Dasar	97.34	91.81	96,40
	Pendidikan Kesetaraan	15.93	44.28	97,69
Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.44	70.64	72,80
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	87.37	80.91	76,74
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	87.19	82.55	69,95
	Pelayanan Kesehatan Balita	93.85	81.10	64,30
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	96.20	99.49	99,16
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	69.60	67.36	81,69
	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	86.77	88.48	93,30
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	31.21	74.33	78,39
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	78.50	97.16	93,98
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	93.38	94.74	95,68
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	76.41	72.38	85,26
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	87.51	70.75	55,20
Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	24.78	N/A	100
	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	90.00	100.00	100
Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	99.30	100.00	100
	Fasilitasi Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100.00	80.23	
Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	88.23	100.00	95,48
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	99.36	85.00	54,96
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	31.33	90.00	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	90.63	82.96	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	31.82	100.00	100
Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	24.70	100.00	100



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-66

Bidang Urusan	Kategori Indeks Pencapaian SPM	2022	2023	2024
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	40.70	96.36	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diLuar Panti	6.73	92.73	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Kehusunya Geandangan dan Pengemis di Luar Panti	-	100.00	98,64
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	88.00	100.00	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda TTU, Tahun 2025

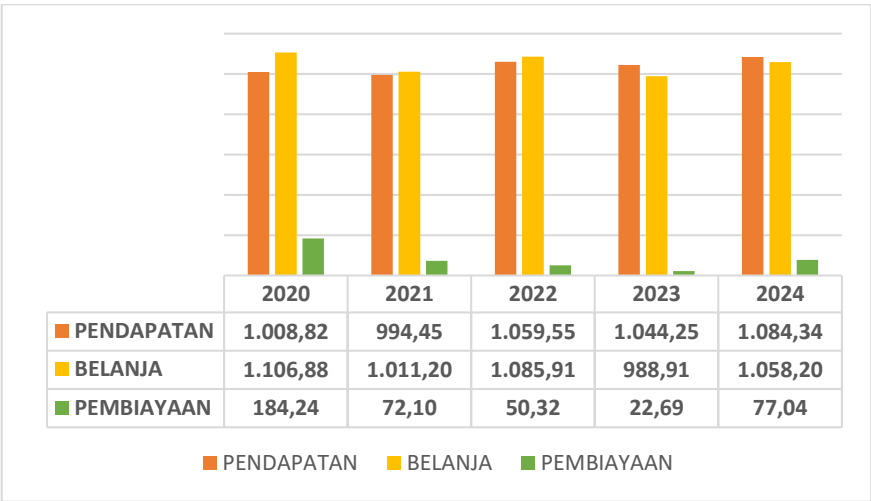
2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya, berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan yang akan datang.

2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Kinerja Pelaksanaan APBD kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan adalah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 50
Kinerja Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kab.TTU Tahun 2020- 2024



Sumber: BKAD dan Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025

Secara rinci, realisasi APBD selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-67
Tabel 2. 22

Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN		REALISASI TAHUN				
			2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH						
	A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	56.159.987.579,48	67.039.419.767,10	40.176.336.745,17	51.217.218.081,46	48.628.286.950,98
	B	Pendapatan Transfer	915.511.781.753,61	894.791.459.237,00	977.988.135.581,00	978.501.246.488,00	1.070.463.609.294,00
	C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	37.143.590.000,00	32.619.548.000,00	41.382.990.424,00	14.535.748.082,00	14.560.705.040,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.008.815.359.333,09	994.450.427.004,10	1.059.547.462.750,17	1.044.254.212.651,46	1.133.652.601.284,98
2	BELANJA DAERAH						
	A	Belanja Operasi	758.512.390.761,88	676.077.166.404,40	703.135.644.441,50	680.539.660.997,67	771.272.085.672,42
	B	Belanja Modal	109.024.988.100,00	101.803.584.186,40	163.384.456.421,00	98.836.877.460,00	94.121.541.863,00
	C	Belanja Tidak Terduga	18.225.529.530,00	27.500.219.362,36	6.462.857.339,79	2.164.493.485,09	4.448.068.000,00
	D	Belanja Transfer	221.119.343.858,00	205.816.742.011,00	212.931.352.719,00	207.365.603.900,00	233.973.351.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.106.882.252.249,88	1.011.197.711.964,16	1.085.914.310.921,29	988.906.635.842,76	1.103.815.046.535,42
SURPLUS/DEFISIT			(-98.066.892.917)	(-16.747.284.960)	(-26.366.848.171)	55.347.576.809	29.837.554.750
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
	A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	184.238.999.769,42	87.099.890.432,53	55.322.222.263,47	23.688.616.094,35	78.393.973.287,18
	B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		PEMBIAYAAN NETTO	184.238.999.769,42	72.099.890.432,53	50.322.222.263,47	22.688.616.094,35	77.393.973.287,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			86.172.106.852,63	55.352.605.472,47	23.955.374.092,35	78.036.192.903,05	107.231.528.036,74

Sumber: BKAD dan Olahan Tim Penyusun EPJMD, 2025



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-68

2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Kabupaten Timor Tengah Utara, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Gambaran Kinerja Neraca Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-69

**Tabel 2. 23
Neraca Daerah Kabupaten TTU Tahun 2020-2024**

NO	URAIAN		TAHUN				
			2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	2023 (Audited)	2024 (Audited)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET						
	A	Aset Lancar	210.551.117.445,19	106.527.475.314,46	60.430.389.098,53	113.943.603.459,87	161.780.443.088,24
	B	Investasi Jangka Panjang	102.327.326.532,00	114.421.898.575,00	119.663.773.590,00	119.804.258.629,00	121.059.793.618,00
	C	Aset Tetap	1.407.975.927.800,44	1.361.181.192.598,13	1.457.373.156.998,56	1.406.147.956.679,97	1.383.996.530.090,25
	D	Properti Investasi					5.691.726.800,00
	E	Aset Lainnya	89.577.779.633,12	90.466.096.806,60	91.497.861.434,52	94.489.924.335,38	76.965.339.237,27
	JUMLAH ASET		1.810.432.151.410,75	1.672.596.663.294,19	1.728.965.181.121,61	1.734.385.743.104,22	1.749.493.832.833,76
2	KEWAJIBAN						
	A	Kewajiban Jangka Pendek	8.506.491.029,00	11.419.246.487,57	13.855.226.109,37	14.132.921.414,17	13.730.249.449,39
	B	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	2.784.590.464,61	2.798.545.365,73	4.034.779.065,69
		Jumlah Kewajiban	8.506.491.029,00	11.419.246.487,57	16.639.816.573,98	16.931.466.779,90	17.765.028.515,08
3	EKUITAS						
	A	Ekuitas	1.801.925.660.381,75	1.661.177.416.806,62	1.712.325.364.547,63	1.717.454.276.324,32	1.731.728.804.318,68
		Jumlah Ekuitas	1.801.925.660.381,75	1.661.177.416.806,62	1.712.325.364.547,63	1.717.454.276.324,32	1.731.728.804.318,68
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.810.432.151.410,75	1.672.596.663.294,19	1.728.965.181.121,61	1.734.385.743.104,22	1.749.493.832.833,76

Sumber: BKAD dan Olahan Tim Penyusun EPJMD, 2025



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-70

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Berdasarkan Capaian Pendapatan dan Belanja selama tahun 2020-2024, maka diharapkan pendapatan dan belanja Kabupaten TTU 5 (lima) tahun kedepan dapat meningkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari tingkat Kemandirian fiskal Kabupaten TTU masih sangat bergantung dengan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah agar segera meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerapan beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan Pendapatan daerah. Dengan memperhatikan karakteristik PAD maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan kebijakan sebagai berikut;

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - b. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - c. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 - d. Pemberian *Reward* bagi WP yang taat membayar pajak, melunasi pajak sebelum jatuh tempo dan kooperatif di dalam pemeriksaan pajak daerah.
 - e. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak dan tatap muka.
 - f. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
 - g. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
 - h. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
 - i. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - j. Menerapkan *e-monitoring* pajak daerah melalui penyediaan peralatan *tapping box* (alat perekam Transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah serta mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak yang disetorkan.
 - k. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
 - l. Peningkatan SDM pemungut pajak melalui diklat perpajakan dan meningkatkan insentif penagih pajak.
 - m. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
 - n. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 - a. Restrukturisasi dan refungsionalisasi perusahaan daerah (BUMD) yang diharapkan mampu menggenjot PAD secara signifikan.
 - b. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.
 - c. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan *tax bassed*) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
 - d. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.

Selain dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara juga melakukan beberapa upaya dan langkah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dalam mendukung prioritas Nasional yang menjadi kewenangan daerah, antara lain;

1. Menyiapkan Dokumen Pendukung (*Readnesss Creteria*) secara lengkap



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-71

2. Meningkatkan Koordinasi dana tugas pembantuan
3. Memenuhi target dan menyiapkan laporan evaluasi secara lengkap tentang penyaluran DAK non fisik

Proyeksi pendapatan daerah 5 (lima) tahun kedepan, dihitung dengan memperpertimbangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5 (lima) tahun terakhir dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, Proyeksi pendapatan daerah 5 (lima) tahun kedepan menggunakan dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Daerah dan *baseline* realisasi anggaran tahun 2024.

Proyeksi Belanja daerah 5 (lima) tahun kedepan dihitung dengan memperpertimbangkan rata-rata pertumbuhan belanja 5 (lima) tahun terakhir, perubahan-perubahan regulasi, kenaikan harga barang dan jasa, Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap jenis belanja memiliki dasar proyeksi berbeda-beda dan menggunakan *baseline* tahun 2024. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Timor tengah Utara pada tabel berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-72

Tabel 2. 24
Proyeksi Keuangan Kab.TTU tahun 2026-2030

No	Uraian	2024 (Baseline)	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN DAERAH	1.133.652.601.284,98	1.275.094.547.667,14	1.326.289.822.428,73	1.355.301.302.111,27	1.370.912.391.340,96	1.387.073.327.909,67
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.628.286.950,98	83.723.499.535,29	93.366.756.607,54	99.902.429.570,07	106.895.599.639,97	114.378.291.614,77
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.070.463.609.294,00	1.167.103.484.131,85	1.208.655.501.821,19	1.231.131.308.541,20	1.239.749.227.700,99	1.248.427.472.294,90
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.560.705.040,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00
2	BELANJA DAERAH	1.103.815.046.535,42	1.300.094.547.667,14	1.326.289.822.428,73	1.355.301.302.111,27	1.369.113.866.755,08	1.373.837.619.703,72
A	BELANJA OPERASI	771.272.085.672,42	982.361.118.159,14	1.007.814.682.925,55	1.030.813.488.564,85	1.038.405.258.846,46	1.036.690.206.487,23
B	BELANJA MODAL	94.121.541.863,00	89.811.252.108,00	87.313.740.329,18	91.064.800.380,68	95.001.364.611,22	99.133.097.486,12
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.448.068.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
D	BELANJA TRANSFER	233.973.351.000,00	223.922.177.400,00	226.161.399.174,00	228.423.013.165,74	230.707.243.297,40	233.014.315.730,37
	SURPLUS / DEFISIT	29.837.554.750,00	(-25.000.000.000)	-	-	1.798.524.586	13.235.708.206,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.393.973.287,18	25.000.000.000,00	-	-	0,00	1.798.524.585,00,00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000,00	-			1.798.524.586,00	15.034.232.791,00
	Pembiayaan Netto	107.231.528.036,74	-	-	-	-	-

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-73

Penghitungan kerangka pendanaan digunakan untuk menilai seberapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan yang telah dikurangi dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kapasitas riil, maka di peroleh kapasitas riil kabupaten Timor Tengah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 25
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Kab.TTU tahun 2026-2030**

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	PENDAPATAN	1.275.094.547.667,14	1.326.289.822.428,73	1.355.301.302.111,27	1.370.912.391.340,96	1.387.073.327.909,67
2	PENCAIRAN DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)					
3	SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN	(25.000.000.000) -	-	-	798.524.585,88	13.034.232.791,83
	TOTAL PENERIMAAN	1.300.094.547.667,14	1.326.289.822.428,73	1.355.301.302.111,27	1.370.113.866.755,08	1.374.039.095.117,84
	DIKURANGI					
4	Belanja Pegawai	702.712.915.274,00	710.212.915.274,00	717.825.415.274,00	725.552.102.774,00	733.394.690.586,50
	Belanja Hibah	10.328.389.000,00	10.534.956.780,00	10.745.655.915,60	10.960.569.033,91	11.179.780.414,59
	Belanja Bantuan Sosial	650.000.000,00	653.250.000,00	656.516.250,00	659.798.831,25	663.097.825,41
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	223.922.177.400,00	226.161.399.174,00	228.423.013.165,74	230.707.243.297,40	233.014.315.730,37
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat	941.613.481.674,00	952.562.521.228,00	962.650.600.605,34	972.879.713.936,56	983.251.884.556,87
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN	358.481.065.993,14	373.727.301.200,73	392.650.701.505,93	397.234.152.818,52	390.787.210.560,97

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun lalu dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan beberapa urusan. Identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan tiga kriteria yaitu:

- a. Cakupan masalah dan dampak yang ditimbulkan;
- b. Merupakan masalah yang terus menerus terjadi sehingga menghambat proses Pembangunan; dan
- c. Masalah tersebut terkait dengan komponen utama pembangunan.

Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi
- b. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- c. Permasalahan Aspek Daya Saing
- d. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Penjabaran terkait Permasalan pada ke-empat aspek diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Aspek Geografi dan Demografi	
AKAR MASALAH	PERMASALAHAN
Belum Optimalnya Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan Strategis Daerah
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-74

Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan dan Energi	
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Pantai Utara	
Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Industri dan Kerajinan	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman secara terpusat	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Transportasi	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	
Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	
Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	
Konversi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan potensi pengembangan wilayah	Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten yang belum berklasifikasi Sangat Baik
Belum optimalnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	
Rendahnya debit air baku	Cakupan ketersediaan Air Baku yang masih rendah
Belum optimalnya sambungan air minum layak ke masyarakat (SR)	
Belum adanya Jaringan Persampahan dari hulu ke hilir	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan penanganan Persampahan dan Air Limbah Domestik
Belum adanya Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Sampah	
Rendahnya Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	
Belum terukurnya Emisi Gas Emisi Rumah Kaca	Belum optimalnya pengelolaan dan pembangunan rendah karbon
Belum optimalnya Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh)	Belum Optimalnya Pemenuhan Energi Listrik Masyarakat
Tingginya kasus orang yang terpapar Kekeringan	Rendahnya Ketahanan Daerah dan tingginya Risiko Bencana Daerah
Penanganan Risiko Bencana	
Tingginya kasus orang yang terpapar Cuaca Ektrim	
Rendahnya Ketersediaan protein per kapita	Menurunnya Ketahanan Pangan Daerah
Rendahnya Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	
Belum terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk tidak sebanding dengan Persebaran Penduduk
Meningkatnya Angka Ketergantungan	
Persebaran Penduduk yang tidak merata serta migrasi penduduk yang belum tercatat secara baik	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-75

AKAR MASALAH	PERMASALAHAN
Rendahnya Sumber Daya Manusia yang terlatih dan terampil	Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam	
Rendahnya Ilmu Pengetahuan Masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong peningkatan usaha	
Belum memadainya permodalan bagi pelaku perekonomian	
Tingkat Ketimpangan pendapatan masyarakat masih berada pada tahap sedang	
Belum stabilnya inflasi kabupaten	
Belum optimalnya penggunaan bank/layanan simpanan sebagai tempat menabung	
Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan layanan perbankan	
Rendahnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikrofinansial	
Rendahnya kepersertaan asuransi sebagai perlindungan dari risiko finansial	
Rendahnya Literasi dan pendidikan keuangan	
Belum Optimalnya Akses ke layanan keuangan melalui teknologi finansial (fintech)	
Masih rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan ketenagakerjaan dan Kesehatan	
Rendahnya Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	
Rendahnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kab.TTU	Indeks Pembangunan Manusia masih berklasifikasi sedang
Masih rendahnya Usia Harapan Hidup	
Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah	
Rendahnya Harapan Lama Sekolah	
Rendahnya minat keluarga mengikuti dan mengaplikasikan Program KB	Masih rendahnya Keluarga Sehat
Belum optimalnya Persalinan dan pelayanan di Fasilitas Kesehatan	
Belum optimalnya Imunisasi Dasar Bayi	
Belum optimalnya Pemberian ASI Eksklusif	
Belum optimalnya pemantauan Pertumbuhan Balita	
Belum optimalnya Penanganan TBC	
Belum optimalnya penanganan kasus Hipertensi secara rutin	
Belum optimalnya penanganan Penderita gangguan jiwa terlantar dan mendapat pengobatan	
Tingginya angka perokok	
Masih terdapat Keluarga yang belum memiliki akses atau menggunakan jamban bersih	
Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi	Rendahnya Tingkat Kesehatan Ibu dan Anak



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-76

Tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Meningkatnya Kasus Tuberkulosis dan HIV/Aids
Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis	
Meningkatnya Penemuan Kasus HIV/Aids	
Belum optimalnya Dimensi Kualitas dan Struktur Keluarga	Rendahnya Kualitas Keluarga dalam menjawab Keluarga Sejahtera
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Keluarga	
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Keluarga	
Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi Keluarga	
Belum optimalnya Hak Sipil dan Kebebasan Anak	Belum Optimalnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
Lingkungan Keluarga yang Kurang Kondusif dan pola pengasuhan alternatif	
Belum optimalnya penerapan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak	
Belum Optimalnya Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	
Belum optimalnya perlindungan khusus terhadap anak	
Jumlah Lapangan dan Kesempatan Kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja (Fress Graduated) sesuai bidang keahliannya	Belum Optimalnya Pembangunan Pemuda
Adanya Diskriminasi Gender (Angka Perkawinan Anak)	
Belum Optimalnya Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda	
Tingginya tingkat kemiskinan	Belum Optimalnya Pembangunan Kebudayaan Daerah
Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia	
Belum Optimalnya Ekonomi Budaya	
Belum optimalnya ketahanan sosial budaya termasuk di dalamnya perlindungan Warisan dan Ekspresi Budaya serta Budaya Literasi	
Aspek Daya Saing	
AKAR MASALAH	PERMASALAHAN
Rendahnya PDRB/Pendapatan Per Kapita Masyarakat	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU
Belum optimalnya Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	
Belum Optimalnya Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	
Belum Optimalnya penerimaan Pajak Daerah jika dibandingkan dengan PDRB	
Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Kab.TTU terhadap PDRB Prov.NTT	
Belum optimalnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Rendahnya Akses dan Pemahaman Masyarakat terkait layanan keuangan
Belum optimalnya upaya Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-77

Belum Optimalnya Perluasan Akses dan Kesempatan guna meningkatkan Kapabilitas SDM	
Rendahnya jumlah Lapangan Pekerjaan yang tersedia jika dibandingkan dengan Kualifikasi Pendidikan para pencari kerja	
Tingginya Angka Kemiskinan Daerah	
Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur dasar dan ekonomi manusia	
Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian	
Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja Industri dan Jasa	Belum Optimalnya transformasi pertanian menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan,
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum berklasifikasi Sangat Baik	
Belum adanya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	
Belum optimalnya Produktivitas Petani	
Nilai jual hasil pertanian yang fluktuatif	
Hasil Pertanian yang bersifat musiman	Rendahnya Produktifitas dan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
Belum optimalnya Produktivitas Nelayan	
Nilai jual hasil perikanan yang fluktuatif	
Rendahnya Jumlah Kewirausahaan Daerah yang dapat bertahan dalam dunia usaha	
Minimnya permodalan usaha guna pengembangan usaha	
Tingginya angka ketergantungan Pencari Kerja terhadap lowongan pekerjaan	Rendahnya Kewirausahaan Daerah
Minimnya Pengetahuan dan pengetahuan pengusaha tentang Pemanfaatan digital sebagai pengembangan usaha	
Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	
Menurunnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	
Rendahnya/Belum Terukurnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	
Rendahnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes
Rendahnya Persentase Koperasi Aktif	
Belum Optimalnya Pengelolaan BumDes	
Rendahnya/Belum Terukurnya Return on Aset (ROA) BUMD	
Rendahnya Aset Dana Pensiun	
Rendahnya Total Dana Pihak Ketiga	Rendahnya Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
Rendahnya Nilai Transaksi Saham Kabupaten	
Rendahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto	
Rendahnya/Belum Adanya Ekspor Barang dan Jasa	
Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah	
Rendahnya Harapan Lama Sekolah	Rendahnya Indeks Pendidikan Kab.TTU



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-78

Rendahnya Persentase satuan pendidikan SD/Mi yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	Belum Optimalnya Hasil Pembelajaran Siswa/i
Rendahnya Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	
Minimnya pengetahuan dasar masyarakat tentang lanskap digital secara utuh, termasuk internet dan dunia maya.	Rendahnya Literasi Membaca dan Literasi Digital Masyarakat
Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital oleh masyarakat.	
Rendahnya penerapan pengguna beretika ketika berada di internet termasuk saat menggunakan media sosial.	
Rendahnya pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi secara online, mengingat praktik kejahatan siber yang kian marak dapat sangat merugikan masyarakat.	
Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Daerah
Rendahnya Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
Rendahnya Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian Menengah Tinggi	
Infrastruktur Pendidikan	Belum optimalnya penyediaan Infrastruktur Dasar Daerah
Fasilitas Pendidikan belum sepenuhnya dalam kondisi Baik	
Infrastruktur Kesehatan	
Fasilitas Kesehatan yang belum sepenuhnya dalam kondisi Baik	
Infrastruktur Pekerjaan Umum	
Belum optimalnya Pemenuhan Air Bersih	
Jaringan Irigasi Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik	
Lahan Pertanian di Kab.TTU belum sepenuhnya dialiri atau dibangun jaringan irigasi	
Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses Sanitasi Layak	
Jalan Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik	
Belum Optimalnya Elektrifikasi	
Infrastruktur Perumahan Rakyat	
Belum optimalnya pemenuhan Rumah Layak Huni	
Belum optimalnya pengembangan Kawasan Permukiman	
Rendahnya Kecakapan mayarakat dalam bekerja menggunakan Teknologi	Rendahnya Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
Belum optimalnya pemenuhan jaringan Internet	
Belum Optimalnya Pembangunan dan Kemandirian Desa	Belum Optimalnya Pembangunan dan Kemandirian Desa



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-79

Belum optimalnya pengendalian Anti monopoli sumber daya ekonomi,	Belum Optimalnya Peningkatan Demokrasi Kab TTU
Belum optimalnya Kesetaraan kesempatan kerja	
Belum optimalnya Akses masyarakat terhadap informasi publik,	
Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat	
Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas Lembaga Demokrasi	
Belum optimalnya penerapan Demokrasi Indonesia	
Belum optimalnya penanganan keamanan dan kesiapsiagaan Bencana	Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat
Masih adanya perilaku Bullying di Masyarakat	
Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya pemenuhan terhadap kebutuhan Biologis dan Fisiologis serta Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri	
Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan termasuk Kebebasan Politik dan Pemikiran, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari Diskriminasi	
Belum optimalnya kebebasan dari kekerasan fisik	
Rendahnya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	
Rendahnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial	
Belum optimalnya peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP	
Belum stabilnya ekonomi makro daerah	Belum optimalnya Daya Saing Daerah
Belum optimalnya Sumber Daya Manusia	
Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Pasar	
Belum optimalnya ekosistem inovasi Kab.TTU	
Belum optimalnya harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Belum Optimalnya Reformasi Hukum
Belum optimalnya reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Daerah mengikuti perkembangan jaman.	
Belum optimalnya penyederhanaan regulasi	
Belum optimalnya kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Daerah (legal drafter) daerah.	
Rendahnya kepatuhan terhadap hukum	
Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum	
Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis TI	
Belum optimalnya Kebijakan Pelayanan	Belum optimalnya Pelayanan Publik
Belum optimalnya Profesionalisme SDM	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-80

Belum optimalnya pemenuhan sarana dan Prasarana	
Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Publik	
Belum optimalnya Inovasi Pelayanan	
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Belum optimalnya pelayanan publik	
Belum terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.	
Belum optimalnya Pengendalian Internal dan pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.	Belum Optimalnya Pengendalian Internal Pemerintahan

Permasalahan terkait Aspek Pelayanan Umum Kabupaten TTU dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.**

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain:

- a. Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah;
- b. Rendahnya capaian Literasi dan Numerasi SD/Mi dan SMP/MTs;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan PAUD-HI.
- d. Belum meratanya distribusi tenaga guru PNS pada jenjang pendidikan SD dan SMP;
- e. Masih kurangnya tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- f. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik, baik SD maupun SMP;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain :

- a. Rendahnya Indeks Keluarga Sehat Kab.TTU.
- b. Rendahnya Kesehatan Ibu dan Anak.
- c. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker, Jantung).
- d. Belum optimalnya penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- e. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- f. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- g. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan.
- h. Belum mamadainya sarana dan prasarana Kesehatan.
- i. Belum optimalnya kualitas layanan publik, efisiensi pengelolaan, dan akuntabilitas BLUD.

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kab. TTU antara lain:

- a. Belum optimalnya akses rumah tangga terhadap air bersih dan air minum layak.



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-81

- b. Ruas jalan di Kab.TTU belum semuanya dalam kondisi baik.
- c. Belum semua Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten kondisinya baik.
- d. Belum optimalnya sistem drainase perkotaan karena banyak saluran drainase yang rusak atau tersumbat serta belum memiliki drainase.
- e. Rendahnya jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak (jamban sehat).
- f. Belum tersedianya fasilitas pengolah air limbah dan lumpur tinja.
- g. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum.

Urusan Pemerintah Bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan antara lain:

- a. Belum semua rumah tinggal memenuhi syarat rumah layak huni.
- b. Kurangnya Ruang Terbuka Publik.
- c. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh.
- d. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Tingginya Risiko Bencana Daerah dan rendahnya ketahanan daerah hadapi bencana.
- b. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah.
- c. Masih terjadinya kejadian kriminal.
- d. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Bidang Sosial antara lain :

- a. Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani dan Belum semua PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
- b. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan antara lain:

- a. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- b. Masih adanya sistem upah yang tidak sesuai standar.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan.
- d. Belum optimalnya cakupan kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan.



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-82

Urusan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan antara lain:

- Belum optimalnya ketersediaan dan pemenuhan pangan Masyarakat.
- Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin/rentan.

Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan antara lain:

- Masih adanya bidang tanah yang belum bersertifikat.
- Kurangnya koordinasi terkait pengelolaan tanah pemeintah.
- Belum optimalnya penyelesaian izin lokasi.

Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- Kualitas lingkungan hidup masih berklasifikasi sedang.
- Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan limbah B3.
- Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air.

Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

- Belum optimalnya pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan.

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- Belum optimalnya Pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat desa
- Belum optimalnya Pengelolaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih.
- Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi desa dan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu.

Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- Tingginya *Total Fertility Rate* dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten TTU.
- Masih belum optimalnya kesadaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB.
- Masih tingginya keluarga beresiko stunting.

Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan antara lain:

- Belum optimalnya konektivitas Desa, Kecamatan dan Kota.
- Belum optimalnya pemenuhan sarana atau fasilitas jalan.

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-83

- a. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah untuk pelaksanaan *e-government*.

Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Rendahnya koperasi aktif.
- b. Rendahnya cakupan dukungan manajemen UKM,
- c. Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.

Urusan Penanaman Modal

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Hal ini diindikasikan oleh minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).
- b. Belum optimalnya peran pemerintah dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- c. Kurangnya promosi potensi kepada calon investor.

Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- a. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten TTU.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet.
- c. Masih rendahnya jumlah pelatih yang bersertifikat
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan *event* olah raga
- e. Belum optimalnya peningkatan wirausaha muda.

Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Sampai saat ini penyajian data statistik dasar masih mengandalkan Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sehingga akan menjadi kendala yang berarti pada saat BPS tidak melakukan perhitungan terkait data tersebut. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik hanya mempublikasikan data statistik dan belum sampai pada analisis data untuk keperluan pembangunan.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Statistik antara lain:

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik sektoral sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.

Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Masalah yang terdapat dalam penyelenggaraan Bidang Persandian antara lain:

- a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten TTU dengan pusat dan provinsi.

Urusan Pemerintah Bidang kebudayaan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten TTU.
- b. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival.

Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain:

- a. Masih kurangnya minat baca di masyarakat.
- b. Tidak tersedianya perpustakaan digital.



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-84

Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan antara lain:

- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kearsipan.
- Terbatasnya SDM pengelolaan kearsipan.
- Belum optimalnya pengelolaan arsip statis dan dinamis.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintah Bidang Perikanan dan Kelautan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perikanan dan Kelautan antara lain:

- Rendahnya tingkat produksi perikanan.
- Belum memadainya sarana dan prasarana perikanan;
- Rendahnya pengawasan sumberdaya dan bantuan perikanan.

Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Beberapa pencapaian, masalah dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata antara lain:

- Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan.
- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata.
- Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat atau memenuhi standar kompetensi.
- Belum optimalnya pengembangan industri ekonomi kreatif.
- Kurangnya daya tarik wisata TTU.

Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Beberapa pencapaian, masalah dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pertanian antara lain:

- Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
- Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura, dan perkebunan.
- Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian potensial.
- Masih rendahnya SDM Petani dalam mengadopsi teknologi.
- Belum optimalnya kontinuitas produksi komoditi pertanian terutama produk unggulan daerah karena pertanian terbesar adalah lahan kering yang memproduksi sekali dalam setahun.
- Ketersediaan pakan ternak dengan populasi tidak seimbang.
- Belum optimalnya tingkat keberhasilan inseminasi buatan (IB).
- Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan antara lain:

- Belum tumbuh dan optimalnya pengelolaan sentra-sentra penjualan produk-produk hasil UMKM.
- Belum ada industri dengan skala besar yang mampu pengolah potensi unggulan sekaligus membuka peluang kerja.
- Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Masih belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten TTU.
- Belum optimalnya pengelolaan pasar.
- Belum optimalnya standardisasi dan perlindungan konsumen.

Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perindustrian antara lain:



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-85

- a. Rendahnya status IKM yang berijin.
- b. Belum optimalnya perkembangan industri kecil.
- c. Rendahnya kualitas dan mutu produk industri
- d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten.

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Transmigrasi antara lain:

- a. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat pada kawasan transmigrasi.

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Belum matangnya UKPBJ.
- b. Rendahnya Return on Assets dan Akses Keuangan Daerah.
- c. Belum optimalnya Pembangunan Hukum.
- d. Belum optimalnya kerjasama antar instansi pemerintahan.
- e. Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal Kab.TTU.
- f. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- g. Belum optimalnya penataan organisasi.
- h. Belum optimalnya penerapan *e-government*.
- i. Belum efektivnya Kebijakan Administrasi Pembangunan.

Sekretariat Dewan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan antara lain:

- a. Belum optimalnya penyusunan Peraturan Daerah inisiatif.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

- a. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan
- b. Masih lemahnya sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- c. Sinkronisasi perencanaan lintas sektor masih belum optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Keuangan antara lain:

- a. Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah.
- b. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
- c. Masih tingginya rasio ketergantungan APBD dari dana transfer pusat.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- a. Belum optimalnya profesionalitas ASN.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-86

- b. Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal.
- c. Belum optimalnya pengembangan karier pegawai dengan sistem merit.
- d. Belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja pegawai.

Urusan Pemerinthan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan ialah belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Pengelolaan Perbatasan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Pengelolaan Perbatasan ialah belum optimalnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan RI-RDTL.

URUSAN PENGAWASAN

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan bidang Pengawasan antara lain:

- a. Belum optimalnya integritas Pemerintah Daerah.
- b. Belum optimalnya kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- c. Belum optimalnya pengendalian internal pemerintahan.

UNSUR KEWILAYAHAN

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Kewilayahan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Desa.

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) ialah masih terjadinya konflik sosial di masyarakat.

2.3.2. Isu Strategis

A. Isu Strategis Global

Beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis pembangunan daerah, yaitu:

a) Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk.

b) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

c) Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-87

telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

d) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

e) Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

f) Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-88

kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

g) Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style).

h) Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i) Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan.

j) Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi.

B. Isu Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

a) Rendahnya Produktivitas



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-89

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Local Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022.

b) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

c) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja.

d) Kebutuhan Hidup Tinggi Pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e) Krisis Lingkungan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate mater 2,5 (World Health organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

II-90

hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

f) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

g) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya.

C. Isu Strategis Regional

a) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Isu strategis pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Kemiskinan

Kemiskinan di NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari Tahun ke Tahun. Jumlah penduduk miskin di NTT pada maret 2023 adalah sebesar 1,14 juta jiwa (19,96%), menurun dibandingkan dengan Maret 2022 sebesar 1,13 juta jiwa (20,05%). Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Secara kumulatif, persentase penduduk miskin di NTT pada maret 2023 menurun sebesar 8,23% dibandingkan Maret 2005 yang sebesar 28,19%. Sebaran penduduk miskin di NTT pada Maret 2023 masih didominasi wilayah pedesaan yaitu sebanyak 1,01 juta jiwa. Sementara penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 135,57 ribu jiwa.

2) Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal)

Wilayah Provinsi NTT saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,632. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-91

untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting.

- 3) Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada Tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2013) secara keseluruhan penduduk Nusa Tenggara Timur diproyeksikan pada Tahun 2035 sebanyak 6.829,1 dengan komposisi umur produktif yakni 15-64 % sebanyak 61,9% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 61.6% pada Tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023).

- 4) Tingginya Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Rendahnya Pemanfaatan Teknologi (Hilirisasi)

Struktur perekonomian NTT selama ini didominasi oleh sektor dengan nilai tambah rendah yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada Tahun 2022. Sementara sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya. Ini menjadi tantangan bagi Provinsi NTT untuk mengembangkan Sektor Industri Pengolahan sebagai langkah transformasi ekonomi dalam menunjang perekonomian daerah agar bisa menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia, seperti halnya provinsi provinsi maju di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) yang kontribusi sektor industri pengolahannya sangat besar terhadap ekonomi daerah.

- 5) Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata

Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dan pengembangan sentra komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan ekonomi wilayah. Nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi NTT masih jauh dari angka nasional. Nilai IPEI Provinsi NTT menduduki peringkat terendah ke-3 secara nasional disebabkan oleh pertumbuhan ekonominya masih belum dapat menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, serta belum dapat mengurangi kemiskinan.

- 6) Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan dimana akses terhadap sumber daya dapat diterima manfaatnya oleh generasi sekarang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan di masa depan.

- 7) Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana)
Utamanya energi, air, dan pangan menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (The Triple Planetary Crisis) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

II-92

mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

- 8) **Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan**
Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Kontribusi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber-sumber PAD yang ada tidak mampu membiayai beban belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan umum sekaligus pembangunan di daerah.
- 9) **Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan dan kepastian hukum**
Proses penegakan hukum memberikan jaminan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

b) Tela'ah RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara

Penataan ruang wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang Wilayah Daerah sebagai serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbudaya berbasis pertanian sebagai penggerak perekonomian wilayah yang aman, nyaman, adil, produktif dan berkelanjutan. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024-2043 terdapat kebijakan penataan ruang Kabupaten Timor Tengah Utara yang meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan perbatasan sebagai serambi depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan fungsi dan peran Daerah sebagai KSN Perbatasan;
- 2) Pengembangan Struktur Ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi wilayah sesuai dengan potensi yang selaras dengan Rencana Tata Ruang;
- 3) Pengembangan Kawasan Pertanian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing daerah;
- 4) Pengembangan Kawasan Perkebunan sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan sumberdaya dengan memperhatikan kearifan lokal dan daya dukung lingkungan; dan
- 5) Pengembangan Kawasan Pesisir sebagai upaya peningkatan perekonomian melalui kawasan terpadu dengan memperhatikan kearifan lokal dan daya dukung lingkungan.

c) Isu Strategis RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045

Isu strategis pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-93

- 1) Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia
 - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan formal dan nonformal (pelatihan/ pemagangan)
 - Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat
 - Masih tingginya angka kemiskinan
- 2) Belum optimalnya pembangunan ekonomi
 - Belum optimalnya pengelolaan pariwisata sebagai salah satu sumber ekonomi
 - Belum optimalnya pengelolaan nilai tambah sektor utama
 - Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Manusia lokal yang dibutuhkan pada bidang tertentu
 - Belum optimalnya digitalisasi
 - Belum optimalnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan pengembangan sentra komoditas unggulan
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan, pengadaan, pembangunan, dll) belum optimal
- 4) Penegakan hukum belum optimal
 - Belum mampu mempertautkan jarak antara *law in books* dan *law in action*
 - Upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan serta penciptaan keamanan wilayah belum optimal
 - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 5) Belum optimalnya resiliensi sosial budaya dan lingkungan hidup
 - Adanya pengaruh budaya luar dan kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya
 - Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak belum optimal
 - Perlu upaya peningkatan perlindungan lingkungan hidup dan ekosistem
 - Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sanitasi
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan
 - Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air
 - Belum meratanya akses pangan sehat masyarakat
 - Belum optimalnya efisiensi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan
 - Penanggulangan Bencana Yang Belum Optimal serta ancaman perubahan iklim
- 6) Masih belum optimalnya konektivitas antar wilayah
 - Masih adanya kesenjangan wilayah (kota-desa, dan daerah tertinggal)
- 7) Sarana dan prasarana belum terjangkau, merata dan saling terhubung bagi masyarakat
 - Belum optimalnya perencanaan pembangunan pemukiman
 - Belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi
- 8) Belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder lain
 - Belum memaksimalkan kerjasama swasta dalam berinvestasi
 - Investasi daerah yang terbatas

d) Isu Strategis KLHS Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2029

Dari hasil pelingkupan isu terhadap hasil sintesa isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan pada ketercapaian TPB, sintesa isu yang berasal dari dokumen perencanaan lainnya yang relevan, dan sintesa isu Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan kondisi lingkungan hidup serta ditambah dengan isu hasil kegiatan konsultasi public diperoleh 5 Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-94

yaitu 1) Masih tingginya angka kemiskinan; 2) Tata kelola pemerintahan belum optimal; 3) Pemerataan akses pelayanan dasar dan infrastruktur yang belum optimal; 4) Pertumbuhan ekonomi masih rendah dan 5) Bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 26
Pelingkupan Isu Strategis KLHS RPJMD Kab.TTU Tahun 2025 2029

No	Rangkuman Isu Strategis Dari Berbagai Sumber	No	Pelingkupan Isu Strategis KLHS RPJMD
1	Permasalahan sosial dan kemiskinan	1	Masih tingginya angka kemiskinan
2	Masih tingginya angka kemiskinan	2	Tata kelola pemerintahan belum optimal
3	Belum optimalnya sistem kelembagaan pemerintah		
4	Sistem Tata Kelola Pemerintah yang belum optimal		
5	Fungsi pengawasan pemerintah daerah masih rendah		
6	Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang masih rendah	3	Pemerataan akses pelayanan dasar dan infrastruktur yang belum optimal
7	layanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal		
8	Tingkat penyediaan infrastruktur yang rendah		
9	Pembangunan Infrastruktur dasar yang belum merata		
10	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal	4	Pertumbuhan ekonomi masih rendah
11	Pertumbuhan ekonomi wilayah yang rendah		
12	Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ketertinggalan daerah		
13	Resiko bencana dan kerusakan lingkungan hidup	5	Bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup
14	Tingginya Resiko Bencana dan Ancaman Kerusakan Lingkungan Hidup		
15	Ancaman keberlanjutan SDA		
16	Degredasi lingkungan hidup		
17	Tingginya resiko bencana dan perubahan iklim		
18	Kerawanan Bencana Alam		
19	Sumber daya air		

Sumber: Dok. KLHS RPJMD Kab.TTU 2025-2029

D. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pada berbagai aspek, telaah terhadap isu global, nasional dan regional, isu strategis jangka menengah Kabupaten Timor Tengah Utara dirumuskan melalui pengelompokan isu sebagai berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-95

Tabel 2. 27

Rumusan Kesimpulan Isu Strategis Kab.TTU Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
Terjangkaunya Fasilitas Pendidikan Angkatan Kerja yang banyak dapat didorong menjadi tenaga pendidik Pemanfaatan digitalisasi pendidikan	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan layanan perbankan Rendahnya Literasi dan Pendidikan keuangan Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah Rendahnya Harapan Lama Sekolah Rendahnya Persentase satuan pendidikan SD/Mi yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional Rendahnya Persentase satuan pendidikan SMP/MTs yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Belum optimalnya Pemerataan Layanan Perpustakaan Koleksi Buku Bacaan yang terbatas Kekurangan Tenaga Pustakawan Rendahnya Jumlah kunjungan Perpustakaan Rendahnya antusias masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi terkait Pembangunan Literasi Masyarakat Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah Rendahnya Harapan Lama Sekolah Belum optimalnya Sumber Daya Manusia	Rendahnya Inklusi Keuangan Daerah Rendahnya Indeks Pendidikan Kab.TTU Belum Optimalnya Hasil Pembelajaran Siswa/i Rendahnya Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia masih berklasifikasi sedang Belum optimalnya Daya Saing Daerah	Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Transformasi Sosial
Terjangkaunya Fasilitas Kesehatan Angkatan Kerja yang banyak dapat didorong menjadi tenaga kesehatan	Rendahnya debit air baku Belum optimalnya sambungan air minum layak ke masyarakat (SR)	Cakupan ketersediaan Air Baku yang masih rendah	Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Kesehatan yang berkualitas	



II-96

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
Pemanfaatan digitalisasi Kesehatan	Masih rendahnya Angka Harapan Hidup Rendahnya minat keluarga mengikuti dan mengaplikasikan Program KB Belum optimalnya Persalinan dan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Belum optimalnya Imunisasi Dasar Bayi Belum optimalnya Pemberian ASI Eksklusif Belum optimalnya pemantauan Pertumbuhan Balita Belum optimalnya Penanganan TBC Belum optimalnya penanganan kasus Hipertensi secara rutin Belum optimalnya penanganan Penderita gangguan jiwa terlantar dan mendapat pengobatan Tingginya angka perokok Masih terdapat Keluarga yang belum memiliki akses atau menggunakan jamban bersih Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis Meningkatnya Penemuan Kasus HIV/Aids Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik Keluarga Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi Keluarga Tingginya angka kematian Ibu Tingginya angka Kematian Balita Tingginya Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Belum Optimalnya Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda	Indeks Pembangunan Manusia masih berklasifikasi sedang Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat Meningkatnya Penemuan Kasus Tuberkulosis Meningkatnya Penemuan Kasus HIV/Aids Rendahnya Indeks Kualitas Keluarga Belum optimalnya kesehatan Ibu dan Anak Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Pemuda						
Rendahnya Angka Pengangguran	Tingginya Angka Kemiskinan Daerah	Rendahnya Indeks Ekonomi Inklusif	Tinggihnya Angka Kemiskinan	Demografi Global	Rendahnya Produktifitas	Kemiskinan	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-97

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
Bonus Demografi	Belum optimalnya upaya Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Rendahnya PDRB/Pendapatan Per Kapita Masyarakat	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU		Geopolitik dan Geoekonomi Kelas Menengah Urbanisasi Dunia	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Kebutuhan Hidup Tinggi Pada Usia Produktif	Kesenjangan dan Keteringgalan Daerah Tingginya Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Rendahnya Pemanfaatan Teknologi (Hilirisasi)	Perlindungan Sosial yang Adaptif	
Potensi Sumber Daya Alam	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Pertumbuhan ekonomi masih rendah	1. Geopolitik dan Geoekonomi	1. Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi
Bonus Demografi	Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi			2. Perdagangan internasional	2. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau		
Kemudahan akses informasi	Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Pantai Utara			3. Keuangan Internasional	Rendahnya Produktifitas	Tingginya Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Rendahnya Pemanfaatan Teknologi (Hilirisasi)		



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-98

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
	Rendahnya Sumber Daya Manusia yang terlatih dan terampil	Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat		Kelas Menengah		Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya		
	Belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Alam			Persaingan Sumber Daya Alam				
	Belum memadainya permodalan bagi pelaku perekonomian							
	Belum optimalnya penggunaan bank/layanan simpanan sebagai tempat menabung	Rendahnya Inklusi Keuangan Daerah						
	Rendahnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikrofinansial							
	Rendahnya kepersertaan asuransi sebagai perlindungan dari risiko finansial							
	Belum optimalnya Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi Keluarga	Rendahnya Indeks Kualitas Keluarga						
	Masih rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan						
	Rendahnya Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Rendahnya akses penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor formal						
	Belum optimalnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Rendahnya Indeks Ekonomi Inklusif						
	Belum Optimalnya Perluasan Akses dan Kesempatan guna meningkatkan Kapabilitas SDM							
	Rendahnya jumlah Lapangan Pekerjaan yang tersedia jika dibandingkan dengan Kualifikasi Pendidikan para pencari kerja							
	Jumlah Lapangan dan Kesempatan Kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerja (Fresh Graduated) sesuai bidang keahliannya	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Pemuda						
	Belum optimalnya pengendalian Anti monopoli sumber daya ekonomi,	Belum Optimalnya Peningkatan Demokrasi Kab TTU						
	Belum stabilnya ekonomi makro daerah	Belum optimalnya Daya Saing Daerah						
	Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Pasar							



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-99

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
	Belum optimalnya Kesetaraan kesempatan kerja Rendahnya Jumlah Kewirausahaan Daerah yang dapat bertahan dalam dunia usaha Minimnya permodalan usaha guna pengembangan usaha Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Menurunnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Rendahnya/Belum Terukurnya Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Rendahnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah Rendahnya Persentase Koperasi Aktif Belum optimalnya pengelolaan BumDes Rendahnya Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi Rendahnya Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian Menengah Tinggi	Belum Optimalnya Peningkatan Demokrasi Kab TTU Rendahnya Rasio Kewirausahaan Daerah Belum optimalnya Pengelolaan Pariwisata dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat untuk tujuan Komersial Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja						
Potensi Sumber Daya Alam	Belum optimalnya Pengelolaan Kawasan Industri dan Kerajinan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Pemerataan akses pelayanan dasar dan infrastruktur yang belum optimal	Urbanisasi Dunia		Kesenjangan dan Keteringgalan Daerah	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Industri, Inovasi dan Infrastruktur guna mendukung Perekonomian	
Bonus Demografi	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Transportasi							
Kemudahan akses informasi	Rendahnya Ilmu Pengetahuan Masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong peningkatan usaha	Belum optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat						



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-100

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
	Belum Optimalnya Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) Belum Optimalnya Akses ke layanan keuangan melalui teknologi finansial (fintech) Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur dasar dan ekonomi manusia Minimnya Pengetahuan dan pengetahuan pengusaha tentang Pemanfaatan digital sebagai pengembangan usaha	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU Rendahnya Inklusi Keuangan Daerah Rendahnya Indeks Ekonomi Inklusif Rendahnya Rasio Kewirausahaan Daerah						
Letak strategis daerah pada kawasan perbatasan	Belum Optimalnya Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Pemerataan akses pelayanan dasar dan infrastruktur yang belum optimal	Demografi Global Rendahnya	Rendahnya Produktifitas	Kesenjangan dan Keteringgalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal)	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Kota dan Desa yang maju, inklusif dan Berkelanjutan	Transformasi Sosial dan Ekonomi
Bonus Demografi	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman secara terpusat		Pertumbuhan ekonomi masih rendah	Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemiskinan		
Potensi Sumber Daya Alam	Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW		Tinggihnya Angka Kemiskinan	1. Geopolitik dan Geoekonomi	1. Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kerosotan Nilai-Nilai Budaya		
	Belum Optimalnya Kontribusi PDRB Kab.TTU terhadap PDRB Prov.NTT Belum Optimalnya penerimaan Pajak Daerah jika dibandingkan dengan PDRB Infrastruktur Pendidikan	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU Belum optimalnya ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Daerah guna mendukung Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Pertumbuhan ekonomi masih rendah	2. Perdagangan internasional 3. Keuangan Internasional	2. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau Tingginya Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Rendahnya Pemanfaatan Teknologi (Hilirisasi) Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata		



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-101

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
	Fasilitas Pendidikan belum sepenuhnya dalam kondisi Baik Rendahnya Cakupan pemenuhan Fasilitas Pendidikan Infrastruktur Kesehatan Fasilitas Kesehatan yang belum sepenuhnya dalam kondisi Baik Pemenuhan Fasilitas Kesehatan yang belum memadai Infrastruktur Pekerjaan Umum Jaringan Irigasi Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik Lahan Pertanian di Kab.TTU belum sepenuhnya dialiri atau dibangun jaringan irigasi Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses Sanitasi Layak Jalan Kabupaten belum sepenuhnya dalam Kondisi Baik Rendahnya Ketaatan Terhadap RTRW Infrastruktur Perumahan Rakyat Belum optimalnya pemenuhan Rumah Layak Huni Belum optimalnya pengembangan Kawasan Permukiman Rendahnya Kecakapan masyarakat dalam bekerja menggunakan Teknologi Belum optimalnya pemenuhan jaringan Internet Belum adanya Desa Mandiri	Rendahnya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna mendukung Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Belum adanya Desa Mandiri						
Integrasi Tata kelola pemerintahan	Rendahnya/Belum Terukurnya Return on Aset (ROA) BUMD	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes	Belum optimalnya tata kelola pemerintah				Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Integrasi Proses Bisnis	Transformasi Tata Kelola
Kemudahan akses informasi	Rendahnya Aset Dana Pensiun	Rendahnya Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan	Pertumbuhan ekonomi masih rendah	1. Geopolitik dan Geoekonomi	1. Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi		



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-102

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
Bonus Demografi	Rendahnya Total Dana Pihak Ketiga			2. Perdagangan internasional	2. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Biru dan Ekonomi Hijau Tingginya Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Rendahnya Pemanfaatan Teknologi (Hilirisasi)		
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Rendahnya Nilai Transaksi Saham Kabupaten Rendahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto Rendahnya/Belum Adanya Ekspor Barang dan Jasa			3. Keuangan Internasional	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan dan kepastian hukum		
IPTEKIN dalam Tata Kelola Pemerintahan	Minimnya pengetahuan dasar masyarakat tentang lanskap digital secara utuh, termasuk internet dan dunia maya.	Rendahnya Indeks Literasi Digital	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Disrupsi Teknologi	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kerosotan Nilai-Nilai Budaya	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Digitalisasi	
Kemudahan akses informasi	Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital oleh masyarakat.			Geopolitik dan Geoekonomi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan		
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Rendahnya penerapan pengguna beretika ketika berada di internet termasuk saat menggunakan media sosial. Rendahnya pengetahuan dasar mengenai proteksi identitas digital dan data pribadi secara online, mengingat praktik kejahatan siber yang kian marak dapat sangat merugikan masyarakat.							
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Belum optimalnya Akses masyarakat terhadap informasi publik	Belum Optimalnya Peningkatan Demokrasi Kab TTU	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Pemerintahan dan Regulasi Kebijakan	
IPTEKIN dalam Tata Kelola Pemerintahan	Masih adanya perilaku Bullying di masyarakat			Disrupsi Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin		



II-103

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
	Belum optimalnya penerapan Demokrasi Indonesia Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas Lembaga Demokrasi Belum optimalnya harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Belum optimalnya reregulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Daerah mengikuti perkembangan jaman. Belum optimalnya penyederhanaan regulasi Belum optimalnya kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Daerah (legal drafter) daerah. Belum optimalnya Kebijakan Pelayanan Belum optimalnya Profesionalisme SDM Belum optimalnya pemenuhan sarana dan Prasarana Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Publik Belum optimalnya Inovasi Pelayanan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Belum optimalnya pelayanan public Belum terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Belum optimalnya Pengendalian Internal dan pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Belum optimalnya ekosistem inovasi Kab.TTU	Rendahnya/Belum terukurnya Indeks Reformasi Hukum Belum optimalnya Pelayanan Publik Belum optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Masih Rendahnya/Belum terukurnya Indeks Integritas Nasional Belum optimalnya Daya Saing Daerah				Keadilan dan kepastian hukum		



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-104

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
Bonus Demografi	Rendahnya kepatuhan terhadap hukum	Masih rendahnya/Belum terukurnya Indeks Pembangunan Hukum	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Pembangunan Hukum	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Kemudahan akses informasi	Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pengaduan Layanan Penanganan Perkara Berbasis TI			Disrupsi Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan		
Kemudahan akses informasi	Belum optimalnya penanganan keamanan dan kesiapsiagaan Bencana	Rendahnya atau belum terukurnya Indeks Rasa Aman	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum		
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya pemenuhan terhadap kebutuhan Biologis dan Fisiologis serta Pemenuhan terhadap Kebutuhan Sosial dan Pengembangan Diri Belum optimalnya perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan termasuk Kebebasan Politik dan Pemikiran, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari Diskriminasi Belum optimalnya kebebasan dari kekerasan fisik Rendahnya Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Persentase penyelesaian potensi konflik sosial Masih adanya perilaku Bullying di masyarakat Belum optimalnya peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP	Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban		Disrupsi Teknologi	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Keamanan dan Ketertiban	
Potensi Sumber Daya Alam	Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tinggihnya Angka Kemiskinan	Demografi Global Rendahnya	Produktivitas	Kemiskinan	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-105

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
Bonus Demografi	Belum optimalnya Dimensi Kualitas dan Struktur Keluarga	Rendahnya Indeks Kualitas Keluarga	Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerossotan Nilai-Nilai Budaya	dan Masyarakat Inklusif	
Kemudahan akses informasi	Belum optimalnya Hak Sipil dan Kebebasan Anak Lingkungan Keluarga yang Kurang Kondusif dan pola pengasuhan alternatif Belum optimalnya penerapan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak Belum Optimalnya Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Belum optimalnya perlindungan khusus terhadap anak Adanya Diskriminasi Gender (Angka Perkawinan Anak)	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Perlindungan Anak Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Pemuda						
Potensi Sumber Daya Alam	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan	Persaingan Sumber Daya Alam	Krisis Lingkungan	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Lingkungan Hidup	
Pemanfaatan IPTEKIN dalam Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Konversi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan potensi pengembangan wilayah Belum optimalnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Belum adanya Jaringan Persampahan dari hulu ke hilir Belum adanya Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang Sampah Rendahnya Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum berklasifikasi Sangat Baik Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan penanganan Persampahan dan Air Limbah		Demografi Global Perubahan Iklim				



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-106

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
	Belum adanya Jaringan dan pengelolaan Air Limbah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang belum berklasifikasi Sangat Baik	Masih rendahnya/belum terukurnya Indeks Ekonomi Hijau						
Potensi Sumber Daya Alam	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertanian	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan	Ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan	Persaingan Sumber Daya Alam	Krisis Lingkungan	Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi)	Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Ketahanan Ekonomi	
Bonus Demografi	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Peternakan			Perubahan Iklim	Kebutuhan Hidup Tinggi Pada Usia Produktif	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya		
	Belum optimalnya Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto Kab.TTU	Pertumbuhan ekonomi masih rendah	1. Geopolitik dan Geoekonomi	1. Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau		
	Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian	Masih rendahnya/belum terukurnya Indeks Ekonomi Hijau		2. Perdagangan internasional	2. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			
	Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja Industri dan Jasa Belum optimalnya Produktivitas Pertanian	Rendahnya Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Usaha Petani		3. Keuangan Internasional				
	Nilai jual hasil pertanian yang fluktuatif Hasil Pertanian yang bersifat musiman Belum optimalnya Produktivitas Nelayan Nilai jual hasil perikanan yang fluktuatif	Rendahnya Nilai Tukar Nelayan						
Potensi Sumber Daya Alam	Rendahnya Ketersediaan protein per kapita	Menurunnya Ketahanan Pangan Daerah	Tinggihnya Angka Kemiskinan	Demografi Global Rendahnya	Produktivitas	Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya	Penguatan Fondasi ketahanan Pangan	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

II-107

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS	FONDASI TRANSFORMASI
	AKAR MASALAH	MASALAH POKOK		ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	REGIONAL (PROVINSI NTT)		
Bonus Demografi Lingkungan Hidup dalam kondisi Baik	Rendahnya Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		Ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan	Persaingan Sumber Daya Alam Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	industri pengolahan (hilirisasi) Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana		
Pemafaatan Energi Potensi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dalam kondisi Baik	Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan Energi Belum adanya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Belum optimalnya Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita (kWh) Belum optimalnya EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah/Kawasan Masih rendahnya/belum terukurnya Indeks Ekonomi Hijau Belum Optimalnya Ketahanan Energi	Ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan	Persaingan Sumber Daya Alam Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana	Penguatan Fondasi Ketahanan Energi	
Potensi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dalam kondisi Baik	Tingginya kasus orang yang terpapar Kekeringan Belum adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana Tingginya kasus orang yang terpapar Cuaca Ektrim Belum terukurnya Emisi Gas Emisi Rumah Kaca	Masih tingginya Risiko Bencana Daerah dan Rendahnya Indeks Ketahanan Daerah Belum terukurnya Emisi Gas Emisi Rumah Kaca	Ancaman bencana alam dan kerusakan lingkungan	Persaingan Sumber Daya Alam Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana	Penguatan Fondasi Ketahanan Bencana	
Adat Istiadat Daerah Bonus Demografi	Belum optimalnya ketahanan sosial budaya termasuk di dalamnya perlindungan Warisan dan Ekspresi Budaya serta Budaya Literasi	Rendahnya atau Belum Terukurnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	Belum optimalnya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	Urbanisasi dunia	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kerosotan Nilai-Nilai Budaya	Penguatan Fondasi Kebudayaan	

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU Kab,TTU 2025-2029



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-1

**BAB III
VISI, MISI DAN
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 ialah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TTU YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Formula Visi ini sinkron dengan rumusan:

Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
“Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”
Visi Jangka Menengah Nasional
"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"
Visi Jangka Menengah Provinsi
“NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Sebagai satu kesatuan antar jenjang pemerintahan yang selaras dan harmonis untuk mewujudkan Indonesia Emas secara bertahap terdapat 3 (tiga) kata kunci yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

- “Sejahtera”** kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mencakup Aspek Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan dan Layanan sosial.
- “Maju”** suatu keadaan progresif untuk menatap masa depan TTU lebih cerah yang diindikasikan oleh tingkat inovasi yang semakin baik dalam berbagai segi, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, pengembangan infrastruktur yang menjangkau semua lapisan masyarakat serta mampu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.
- “Berdaya Saing”** menunjukkan keunggulan dan tingkat kemapanan TTU sebagai beranda depan Indonesia yang bermartabat di mata asing, diindikasikan oleh kondisi perekonomian daerah yang maju, SDM yang handal, fasilitas atau infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif (keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta kerukunan antar umat beragama).

Sasaran visi merupakan variabel penilaian umum yang digambarkan untuk ketercapaian dari sebuah visi yang direncanakan. Visi tersebut tersusun dari sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara yang meningkat;
2. Kabupaten Timor Tengah Utara menuju kemiskinan di bawah 20% dan ketimpangan berkurang;
3. Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara Meningkat;



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

III-2

4. Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara Berkualitas Unggul; dan
5. Kabupaten Timor Tengah Utara menuju Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan.

Sasaran visi tersebut terdapat penyertaan indikator untuk mengukur capaian Visi sebagai berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-3

Tabel 3. 1

Sasaran Visi Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2029

NO	SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara yang meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	3,27	3,35	3,42	3,64	4,00	4,50	5,50
		PDRB per Kapita (Rp Juta)	18,72	18,85	18,97	19,35	19,74	20,53	21
		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	40,35	40,52	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1,23	1,23	1,29	1,36	1,42	1,49	1,55
2	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju kemiskinan di bawah 20% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	3,27	3,35	3,42	3,64	4,00	4,50	5,50
		Rasio Gini	0,316	0,315	0,315	0,314	0,313	0,312	0,310
3	Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,42	3,49	3,55	3,62	3,68	3,77
		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)*	3,760	3,764	3,769	3,775	3,782	3,789	3,803
4	Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara Berkualitas Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,27	67,48	67,69	68,15	68,61	69,08	70,00
5	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,32	77,82	77,99	78,17	78,34	78,51	79,68

Sumber : Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

III-4

Misi Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2029

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan **“Sapta Cita”** misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2045.

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.

Misi meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan adalah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, berbagai kajian dan inovasi perekonomian terus dilakukan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi terdistribusi secara adil dan merata.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing

Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovatif, dan berdaya saing adalah kunci untuk kemajuan bangsa. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, menciptakan budaya inovasi, serta memastikan adanya kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berkembang. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, Timor Tengah Utara dapat mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, dan berdaya saing, yang akan menjadi motor penggerak kemajuan daerah di masa depan.

3. Meningkatkan Akses Layanan Sosial

Misi "Meningkatkan Akses Layanan Sosial" memastikan bahwa semua anggota masyarakat terutama mereka yang membutuhkan dukungan baik secara ekonomi maupun moril, mendapatkan layanan sosial yang adaptif. Hal ini merupakan upaya preventif guna mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Timor Tengah Utara.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkemampuan adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, serta memiliki kemampuan dalam melayani masyarakat dengan memegang teguh *core value* BerAKHLAH (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan slogan “Bangga Melayani Bangsa”. Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan diharapkan adanya reformasi birokrasi, penegakan hukum yang adil, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan nilai-nilai etika dan moralitas.

5. Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Misi untuk meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur dapat dirumuskan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai sektor, dengan tujuan meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Perumahan dan infrastruktur lainnya serta memastikan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan merata.

6. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoin Meto

Melestarikan lingkungan hidup dan kebudayaan Atoin Meto merupakan upaya penting untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya dan



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-5

kelestarian alam di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Melestarikan lingkungan hidup mencakup berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Hal ini melibatkan perencanaan lingkungan yang efektif, ekonomi hijau, penegakan hukum lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik di bidang lingkungan. Kebudayaan Atoin Meto, yang kaya akan kearifan lokal, memiliki hubungan erat dengan alam, dan praktik-praktik tradisionalnya sering kali mencerminkan pemahaman mendalam tentang ekologi. “Atoin Meto” memandang alam sebagai satu kesatuan yang hidup, dengan batu sebagai tulang, tanah sebagai daging, dan air sebagai darah. Dengan upaya bersama, budaya dan lingkungan hidup Atoin Meto dapat terjaga kelestariannya, memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang

7. Membangun Kawasan Strategis Daerah

Membangun Kawasan Strategis Daerah adalah upaya untuk mengembangkan wilayah yang memiliki potensi strategis dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, pembangunan kawasan strategis dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 diturunkan (*Cascading*) serta dijabarkan melalui Tujuan dan Sasaran yang dapat menjawab Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN I

“Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara

Dijabarkan melalui sasaran:

- Sasaran I.1 Meningkatkan Kontribusi Produk Domestik Bruto Daerah Sektor Prioritas
- Sasaran I.2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Sasaran I.3 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah

TUJUAN II

“Meningkatnya Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara”

Dijabarkan melalui sasaran:

- Sasaran II.1 Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

TUJUAN III

“Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Maju, Inovatif dan Berdaya Saing”

Dijabarkan melalui sasaran:

- Sasaran III.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan
- Sasaran III.2 Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat
- Sasaran III.3 Meningkatkan eksistensi dan pengamalan budaya “Atoin Meto”
- Sasaran III.4 Meningkatkan ketercukupan Pangan dan Gizi Masyarakat
- Sasaran III.5 Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak untuk terciptanya TTU Emas 2045

TUJUAN IV

“Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat”

Dijabarkan melalui sasaran:



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

III-6

- Sasaran IV.1 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat serta mengurangi kesenjangan
Sasaran IV.2 Meningkatnya peran Perempuan dalam perekonomian keluarga
Sasaran IV.3 Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat

TUJUAN V

“Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan”

Dijabarkan melalui sasaran:

- Sasaran V.1 Meningkatnya integritas tata Kelola pemerintahan
Sasaran V.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran V.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Sasaran V.4 Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

TUJUAN VI

“Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah”

Dijabarkan melalui sasaran:

- Sasaran VI.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran VI.2 Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara visi dan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga 5 (lima) tahun kedepan dijabarkan pada tabel berikut:

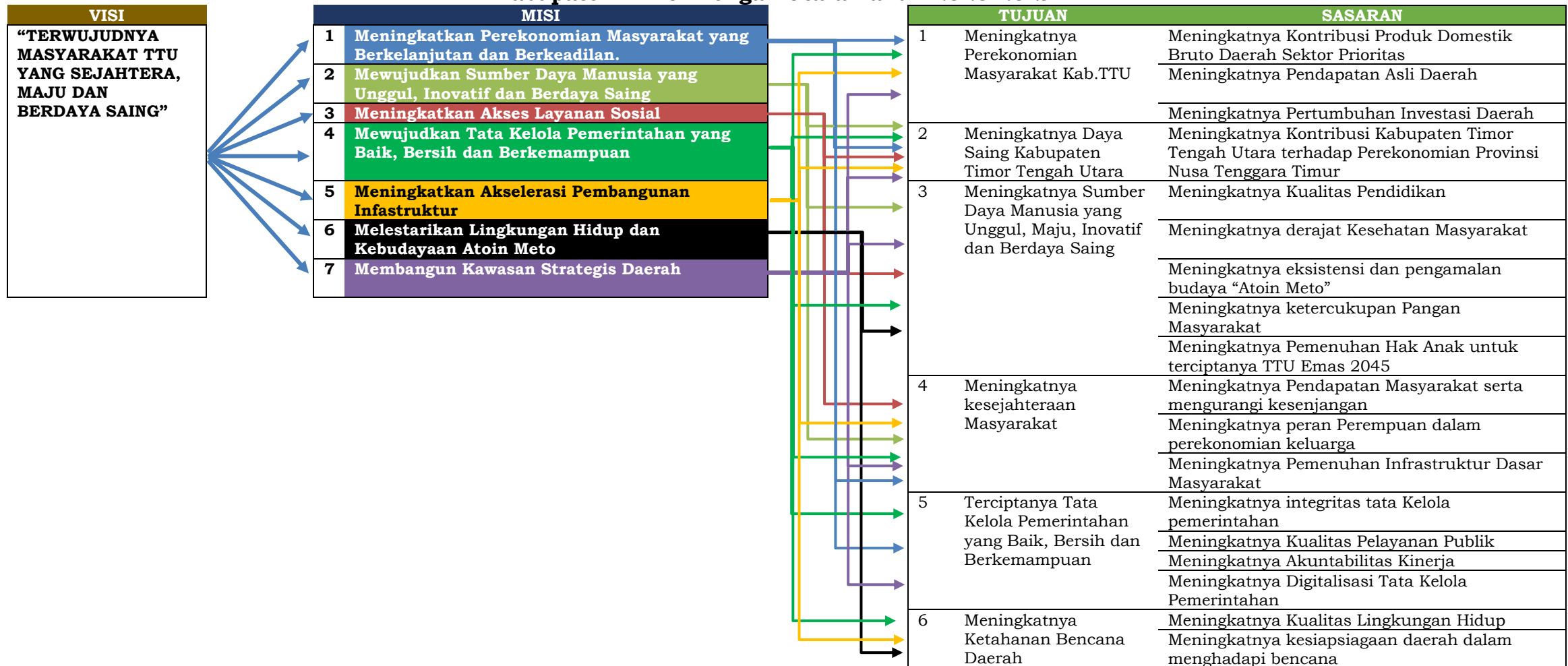


**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-7

Gambar 3. 1

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**



Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-8

Tabel 3. 2

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						(8)
VISI	"Terwujudnya Masyarakat TTU yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"											
MISI	1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. 2.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing 3.Meningkatkan Akses Layanan Sosial 4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan 5.Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Catatan: Merupakan penjabaran dari Misi III "Meningkatkan Akses Layanan Sosial " 6.Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoni Meto	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kab.TTU		Pertumbuhan Ekonomi	3,27	3,35	3,42	3,64	4,00	4,50	5,50	
			Meningkatnya Kontribusi Produk Domestik Bruto Daerah Sektor Prioritas	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	1,75	2,69	2,71	2,76	2,81	2,86	2,91	
				Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,74	8,14	8,54	8,94	9,34	9,74	10,14	
				Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	3,760	3,764	3,769	3,775	3,782	3,789	3,803	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	-5,05	2,00	2,56	3,19	5,84	5,85	5,87
			Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi	4,65	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		Meningkatnya Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara		Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,42	3,49	3,55	3,62	3,68	3,77	
			Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	0,51	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Maju, Inovatif dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,27	67,48	67,69	68,15	68,61	69,08	70,00	
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	10,77	10,78	10,86	10,96	11,06	11,16	11,26	
			Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,02	71,52	72,02	72,42	72,82	73,22	73,62	
			Meningkatnya eksistensi dan pengamalan budaya “Atoin Meto”	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,70	51,27	51,85	52,42	52,99	53,57	54,14	
			Meningkatnya ketercukupan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	73,61	73,81	74,45	75,60	77,54	78,11	80,00	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak untuk terciptanya TTU Emas 2045	Indeks Perlindungan Anak	50,46	50,60	50,74	50,88	51,02	51,16	51,30	
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	20,89	20,29	19,68	19,20	18,71	18,23	17,27	
				Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)	2,28	2,08	1,88	1,68	1,48	1,28	1,08	
				Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)	5,70	5,75	5,80	5,85	5,90	5,95	6,00	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-9

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						(8)
	Catatan: Kebudayaan Atoin Meto merupakan Penjabaran dari Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing" 7.Membangun Kawasan Strategis Daerah		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat serta mengurangi kesenjangan	Rasio Gini	0,316	0,315	0,315	0,314	0,313	0,312	0,310	
			Meningkatnya peran Perempuan dalam perekonomian keluarga	Indeks Ketimpangan Gender	0,440	0,440	0,440	0,430	0,420	0,410	0,400	
			Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Indeks Infrastruktur	62,75	63,33	64,09	64,54	64,99	65,45	65,90	
		Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan		Indeks Reformasi Birokrasi	60,16	61,41	62,66	63,91	65,16	66,41	67,66	
			Meningkatnya integritas tata Kelola pemerintahan	Maturitas SPIP	2,40	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,00	
				Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	-	-	1,49	3,51	4,48	7,46	10,45	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	91,82	92,07	92,32	92,57	92,82	93,07	93,32	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	SAKIP	60,31	60,78	61,25	62,19	63,12	64,06	65,00	
			Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	2,43	2,49	2,54	2,66	2,77	2,89	3,00	
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	130,92	127,00	125,00	110,00	100,00	95,00	90,00	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,32	77,82	77,99	78,17	78,34	78,51	79,68	
			Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

III-10

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

a. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan Program Prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/Sasaran. Strategi berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kab.TTU Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Strategi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

VISI	MISI	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING"	MISI I "MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN"	Landasan Pembangunan Ekonomi Daerah serta Penyiapan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang berdaya saing
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD
		Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif
		Meningkatkan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan pekerja
	MISI II "MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERDAYA SAING"	Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun pra sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar)
		Pembangunan Literasi Masyarakat
		Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan HIV/Aids)
		Keluarga Bahagia dan Sejahtera
	MISI III "MENINGKATKAN AKSES LAYANAN SOSIAL"	Pemuda-Pemudi Kab.TTU Berkualitas dan masyarakat TTU gemar berolahraga
		Penuntasan Kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan Perlindungan Sosial Adaptif terintegritas
		Perlindungan Anak serta Kesetaraan Gender
	MISI IV "MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERKEMAMPUAN"	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
		Transformasi manajemen ASN, Pemberantasan Korupsi serta Layanan Kemasyarakatan
	MISI V "MENINGKATKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR "	Integrasi Pemerintahan kabupaten dan Desa
		Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat
	MISI VI "MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBUDAYAAN ATOIN METO"	Melestarikan Lingkungan Hidup sebagai Paru-Paru Kabupaten
		Ketahanan dan Pengendalian Bencana Alam dan Non Alam
	MISI VII "MEMBANGUN KAWASAN STRATEGIS DAERAH"	Penguatan Karakter dan Jati Diri Daerah
		Menjadikan Kota Kefamenanu sebagai Kota BERADAT
		Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perekonomian Kawasan Strategis Daerah

b. Penahapan Pembangunan

Penahapan Pembangunan adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan RPJMD Kab.TTU dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan Pembangunan Daerah selama 5 tahun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-11

bertahap. Setiap tahapan akan memiliki program spesifik untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab.TTU.

Penahapan Pembangunan RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Penahapan Pembangunan RPJMD Kab.TTU Tahun 2025-2029

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
TEMA PEMBANGUNAN	“PENGUATAN LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH I MENUJU TTU EMAS”	“PENGUATAN LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH II MENUJU TTU EMAS”	“PENGUATAN LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH III MENUJU TTU EMAS”	“PENGUATAN LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH IV MENUJU TTU EMAS”	“PENGUATAN LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH V MENUJU TTU EMAS”
Tahapan Pembangunan	Perumusan dan Penyiapan Landasan Pembangunan Daerah berbasis potensi dan karakteristik wilayah secara terpadu dan kolaborasi	Pembangunan Daerah berbasis potensi dan karekteristik wilayah secara terpadu dan kolaborasi	Pengaplikasian hasil Evaluasi dan rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pembangunan Landasan Daerah secara komprehensif	Terciptanya Landasan Transformasi Daerah

c. Lokus Pembangunan Daerah

Pengembangan kewilayahan didasarkan pada karakteristik wilayah dan potensi wilayah seperti yang termuat dalam Bab II dokumen RPJMD Kab.TTU tahun 2025-2029. Terdapat 15 lokus pengembangan wilayah sebagaimana yang termuat dalam tabel berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-12

**Tabel 3. 5
Lokus Pengembangan Daerah**

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERBATASAN DAN PKSN	KAWASAN HUTAN PRODUKSI	PERKEBUNAN RAKYAT	TANAMAN PANGAN	BUAH- BUAHAN	TANAMAN SAYUR	BIOFARMAKA	PETERNAKAN	PERTAM BANGAN DAN ENERGI	PANTAI UTARA	KAWASAN INDUSTRI	DAYA TARIK WISATA DAERAH	KAWASAN PERMUKIMAN	KAWASAN KONSERVASI	KAWASAN CAGAR BUDAYA
1	Miomaffo Barat	1	1	5	5	4	9	4	5	1		7	1			
2	Miomaffo Tengah		1	3	5	5	2	3	4	1		3				
3	Musi	1	1		5	7	4		3			6				
4	Mutis	1			5	7	13		6			1	2			2
5	Miomaffo Timur				5	7	8		8	1		9	2			
6	Noemuti		1	7	1	1	2	4	3	1		9	2			
7	Bikomi Selatan	1	1		1		7		4	1		8				
8	Bikomi Tengah	1					1		1	1		2				
9	Bikomi Nilulat	1	1		5	7	10	4	6	1		1				
10	Bikomi Utara	1			5	7			4	1		22	1			
11	Naibenu	1	1		6	7	2		4			1				
12	Noemuti Timur		1	7	1		2		3			4				
13	Kota Kefamenanu	2	1		5	7	5		2	1		65	2			2
14	Insana		1	7	2		1		2	1		2	2			1
15	Insana Utara	1	1	7	6	7	3		7	1	1	15	3			
16	Insana Barat		1	7	1	6	3		4			9				1
17	Insana Tengah		1	7		6	4		4			1				1
18	Insana Fafinesu		1	7	5	7	2		5			2				
19	Biboki Selatan		1		6	7	2	4	8			2	1			3
20	Biboki Tanpah		1		7		2		3	1		1				
21	Biboki Moenleu	1	1	1	1	7	5	4	4	1	1	9	1			
22	Biboki Utara		1		1	7	5		3			2				
23	Biboki Anleu	1	2	7	2	7	7		7	1	1	23	1			
24	Biboki Feotleu		1		6		3	4	5	1		1				

Sumber: Dok. RPJPD Kab.TTU Tahun 2025-2045



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-13

PKSN dan Perbatasan

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden RI No. 179 Tahun 2014, Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi:

- 1. Percepatan Pengembangan Pusat Pelayanan Utama
- 2. Percepatan pengembangan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang
- 3. Pengembangan dan/atau peningkatan Sistem Jaringan Energi
- 4. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
- 5. Pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air
- 6. Pengembangan dan/atau Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

Kawasan Hutan Produksi

Tabel 3. 6
Kawasan Hutan Produksi menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	KAWASAN HUTAN PRODUKSI	NO	KECAMATAN	KAWASAN HUTAN PRODUKSI
1	Miomaffo Barat		13	Kota Kefamenanu	
2	Miomaffo Tengah		14	Insana	
3	Musi		15	Insana Utara	
4	Mutis		16	Insana Barat	
5	Miomaffo Timur		17	Insana Tengah	
6	Noemuti		18	Insana Fafinesu	
7	Bikomi Selatan		19	Biboki Selatan	
8	Bikomi Tengah		20	Biboki Tanpah	
9	Bikomi Nilulat		21	Biboki Moenleu	
10	Bikomi Utara		22	Biboki Utara	
11	Naibenu		23	Biboki Anleu	
12	Noemuti Timur		24	Biboki Feotleu	

Sumber: Dok.RPJPD Kab.TTU Kab.TTU Tahun 2025-2045 dan RTRW Kab.TTU

	Kawasan Hutan Produksi Terbatas
	Kawasan Hutan Produksi Tetap
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Tetap

Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi terdiri atas:

- a. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
- b. Pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
- d. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
- e. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah;
- f. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; serta
- g. Mengarahkan di setiap kawasan hutan produksi tetap untuk membentuk hutan kota.

Kawasan Perkebunan Rakyat

Tabel 3. 7
Potensi Pengembangan Komoditi Perkebunan

NO	KECAMATAN	METE	KELAPA	PINANG	KOPI	KAKAO	KEMIRI	KAPUK
1	Miomaffo Barat							
2	Miomaffo Tengah							
3	Musi							
4	Mutis							
5	Miomaffo Timur							



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-14

NO	KECAMATAN	METE	KELAPA	PINANG	KOPI	KAKAO	KEMIRI	KAPUK
6	Noemuti							
7	Bikomi Selatan							
8	Bikomi Tengah							
9	Bikomi Nilulat							
10	Bikomi Utara							
11	Naibenu							
12	Noemuti Timur							
13	Kota Kefamenanu							
14	Insana							
15	Insana Utara							
16	Insana Barat							
17	Insana Tengah							
18	Insana Fafinesu							
19	Biboki Selatan							
20	Biboki Tanpah							
21	Biboki Moenleu							
22	Biboki Utara							
23	Biboki Anleu							
24	Biboki Feotleu							

Sumber: Dok.RPJPD Kab.TTU Kab.TTU Tahun 2025-2045
Ket: Kolom yang berwarna merupakan kawasan berpotensi

- Pengembangan perkebunan rakyat terutama pada area yang telah mengalami kerusakan dan mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan. Arahkan pengembangan kawasan perkebunan rakyat yaitu:
- a. Memperbaiki dan mengembangkan prasarana dan sarana infrastruktur ke lokasi pertanaman serta untuk pengolahan dan pemasaran.
 - b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi/asosiasi petani.
 - c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha.
 - d. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan wilayah lain yang mengembangkan komoditas perkebunan yang sama dalam menyusun strategi pengembangan perkebunan secara bersama, termasuk di dalamnya dalam kerjasama penelitian guna pengembangan produk perkebunan.
 - e. Menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha perkebunan.

Selanjutnya langkah yang sangat relevan dalam pembangunan perkebunan rakyat ke depan adalah menerapkan pengembangan konsep *Corporate Community Relationship*, melalui pengembangan konsep ini diharapkan pengusaha perkebunan rakyat atau masyarakat di sekitar perkebunan dapat berperan di dalam pengelolaan perkebunan. Pengusaha perkebunan besar dengan segala kelebihan yang dimilikinya dapat berperan membantu meningkatkan produktivitas dan mutu hasil perkebunan rakyat, baik melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, maupun deversifikasi usaha perkebunan rakyat.

Kawasan Pertanian

Komoditi tanaman pangan yang tersedia di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 3. 8
Potensi Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan

NO	KECAMATAN	PADI SAWAH	PADI LADANG	JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	KACANG HIJAU
1	Miomaffo Barat							
2	Miomaffo Tengah							
3	Musi							
4	Mutis							
5	Miomaffo Timur							



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-15

NO	KECAMATAN	PADI SAWAH	PADI LADANG	JAGUNG	UBI KAYU	UBI JALAR	KACANG TANAH	KACANG HIJAU
6	Noemuti							
7	Bikomi Selatan							
8	Bikomi Tengah							
9	Bikomi Nilulat							
10	Bikomi Utara							
11	Naibenu							
12	Noemuti Timur							
13	Kota Kefamenanu							
14	Insana							
15	Insana Utara							
16	Insana Barat							
17	Insana Tengah							
18	Insana Fafinesu							
19	Biboki Selatan							
20	Biboki Tanpah							
21	Biboki Moenleu							
22	Biboki Utara							
23	Biboki Anleu							
24	Biboki Feotleu							

Sumber: Dok.RPJPD Kab.TTU Kab.TTU Tahun 2025-2045
Ket: Kolom yang berwarna merupakan kawasan berpotensi

Komoditi buah-buahan di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari Mangga, Jeruk Siam, Pisang, Pepaya, Salak, Alpukat dan Nenas.

Tabel 3. 9
Potensi Pengembangan Komoditi Tanaman Buah-Buahan

NO	KECAMATAN	MANGGA	JERUK	PISANG	PEPAYA	SALAK	ALPUKAT	NANAS
1	Miomaffo Barat							
2	Miomaffo Tengah							
3	Musi							
4	Mutis							
5	Miomaffo Timur							
6	Noemuti							
7	Bikomi Selatan							
8	Bikomi Tengah							
9	Bikomi Nilulat							
10	Bikomi Utara							
11	Naibenu							
12	Noemuti Timur							
13	Kota Kefamenanu							
14	Insana							
15	Insana Utara							
16	Insana Barat							
17	Insana Tengah							
18	Insana Fafinesu							
19	Biboki Selatan							
20	Biboki Tanpah							
21	Biboki Moenleu							
22	Biboki Utara							
23	Biboki Anleu							
24	Biboki Feotleu							

Sumber: Dok.RPJPD Kab.TTU Kab.TTU Tahun 2025-2045
Ket: Kolom yang berwarna merupakan kawasan berpotensi

Komoditi tanaman sayur di Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain Bawang Merah, Cabai Merah, Cabe Keriting, Cabe Rawit, Kentang Kubis, Tomat, Bawang Putih, Petsai, Dan Kacang Panjang.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-16

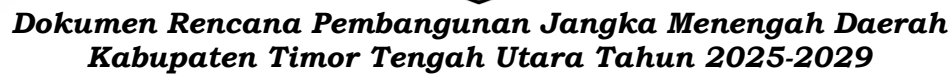
Tabel 3. 10

Potensi Pengembangan Komoditi Tanaman Sayur

NO	KECAMATAN	BAWANG MERAH	BAWANG PUTIH	KENTANG	KOL/ KUBIS	SAWI	WORTEL	KACANG MERAH	KACANG PANJANG	CABAI	TOMAT	BUNCIS	TERONG	KETIMUN	LABU SIAM	KANGKUNG	BAYAM	PETSAI
1	Miomaffo Barat																	
2	Miomaffo Tengah																	
3	Musi																	
4	Mutis																	
5	Miomaffo Timur																	
6	Noemuti																	
7	Bikomi Selatan																	
8	Bikomi Tengah																	
9	Bikomi Nilulat																	
10	Bikomi Utara																	
11	Naibenu																	
12	Noemuti Timur																	
13	Kota Kefamenanu																	
14	Insana																	
15	Insana Utara																	
16	Insana Barat																	
17	Insana Tengah																	
18	Insana Fafinesu																	
19	Biboki Selatan																	
20	Biboki Tanpah																	
21	Biboki Moenleu																	
22	Biboki Utara																	
23	Biboki Anleu																	
24	Biboki Feotleu																	

Sumber: Dok.RPJPD Kab.TTU Kab.TTU Tahun 2025-2045

Ket: Kolom yang berwarna merupakan kawasan berpotensi



Komoditi tanaman biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari Jahe, Laos, dan Kencur.

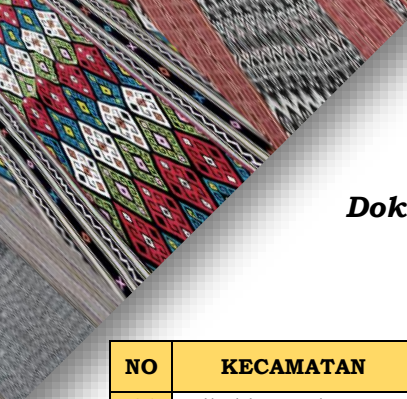
Tabel 3. 11

Sumber: Dok.RPJPD Kab.TTU Kab.TTU Tahun 2025-2045
Ket: Kolom yang berwarna merupakan kawasan berpotensi

Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan meliputi:

- Pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
- Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian non irigasi tanpa mengganggu produktivitas peternakan; dan
- Aktivitas pendukung peternakan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan dan perluasan areal Pakan ternak.

Tabel 3. 12[illegible]



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-18

NO	KECAMATAN	SAPI	KERBAU	KUDA	KAMBING	DOMBA	BABI	AYAM KAMPUNG	AYAM PEDAGING	ITIK/ BEBEK
21	Biboki Moenleu									
22	Biboki Utara									
23	Biboki Anleu									
24	Biboki Feotleu									

Sumber: Dok.RPJPD Kab.TTU Kab.TTU Tahun 2025-2045
Ket: Kolom yang berwarna merupakan kawasan berpotensi

Kawasan Pertambangan Dan Energi

Arah pengembangan pertambangan diarahkan:

- a. Perlu adanya usaha penggalian dan pengembangan jenis pertambangan yang mempunyai prospek untuk dikembangkan (usaha eksploitasi). Untuk pertambangan skala besar, pemerintah diupayakan memberi intensif dan desisentif bagi investor yang akan menanamkan modalnya.
- b. Pengembangan pertambangan dengan melibatkan masyarakat sekitar, yaitu pemilik lahan sebagai mitra usaha.
- c. Tidak merusak kondisi lingkungan di sekitar penambangan dan atau jika kegiatan pertambangan dihentikan atau sudah habis, maka perlu dilakukan perbaikan lingkungan.
- d. Kawasan pertambangan termasuk dalam kawasan pengendalian ketat, sehingga didalam pengembanganya perlu didukung dengan Perda tentang pertambangan dan didukung dengan AMDAL.

Dalam pengembangan, perlu didukung dengan sistem Pengelolaan Kawasan Pertambangan. Dengan tetap memelihara sumber daya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Adapun kriteria penetapan kawasan pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan pertambangan serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan.
- b. Kawasan yang apabila digunakan untuk pengembangan kawasan pertambangan secara ruang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - Meningkatkan produksi pertambangan.
 - Meningkatkan kegiatan sektor dan ekonomi di kawasan sekitarnya.
 - Tidak mengganggu fungsi lindung serta tidak mengganggu upaya kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam disekitarnya.
 - Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya, pendapatan wilayah dan pendapatan nasional.
- c. Meningkatkan kesempatan kerja dan nilai ekspor.

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Perikanan dan Penggaraman

Kawasan Pantai Utara di Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki sumberdaya perikanan dan pergaraman yang potensial. Kawasan Pantai Utara terdiri dari Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Monleu dan Kecamatan Biboki Anleu. Perikanan tangkap dan pergaraman perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan yang memadai serta rencana pengembangan kawasan peruntukan Industri garam.

Kawasan Ekosistem Magrove

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 168 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu dan Kecamatan Insana Utara. Strategi untuk menjaga agar keseimbangan antara sumberdaya alam yang tersedia dengan kebutuhan yang terus meningkat, yaitu



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-19

- a. Memanfaatkan sumberdaya alam yang didasarkan atas dasar kelestarian sumber daya alam, peningkatan manfaat ekonomi maupun ekologi agar kesejahteraan manusia juga meningkat.
- b. Meningkatkan pengelolaan hutan mangrove agar diperoleh nilai lingkungan dan nilai ekonomi yang seimbang,
- c. Mengupayakan rehabilitasi hutan yang telah rusak sebagai prioritas utama.
- d. Reboisasi sebagai upaya rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak, pada dasarnya adalah untuk memulihkan fungsi ekologis ekosistem mangrove yang sangat besar artinya bagi kehidupan biota laut dan juga bagi manusia. Dalam pelaksanaan reboisasi selain bertujuan untuk memulihkan peran dan fungsi mangrove, proyek tersebut juga diharapkan agar masyarakat setempat yang terlibat memperoleh penghasilan, sehingga dapat menanggulangi masalah ekonomi keluarganya.

Kawasan Industri

Kegiatan industri di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengalami perkembangan yaitu Industri Kecil Menengah (IKM). Perkembangan tersebut terjadi karena IKM dibangun menggunakan modal relatif kecil-besar, penggunaan teknologi yang masih terbatas, tenaga kerja berkisar 10-200 orang, pemasaran hanya skala lokal dan skal regional. Persebaran IKM di Kab.TTU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13

Data Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	Jenis IKM Pangan	Jenis IKM Non Pangan
1	Kecamatan Kota Kefamenanu	Aneka Kripik, Aneka Cemilan, Aneka Kue, Aneka Kue Basah, Instan Kunyit, Abon Dendeng,Roti, Beras, Tahu,Tempe, Garam Yudium, Manisan, Tengtent, Donat dan Kacang, Kripik KCG Telur, Aneka Ceke, Kua Bahan Lokal, Emping Jagung, Gula Merah, Ferm Anggur Pisang, Sambal Lu'at, Kua Rambut, Abon, Cuka Apel, VCO, Abon Ikan, Pangan, Kacang Gurih, Air Isi Ulang, Minuman, Instan Kunyit	Beti, Tais, Selendang, Menjahit, Rajutan, Batu Bata, Mebel, Lemari, Tempat Tidur, Peti Jenasah, Acesoris Batu Permata, Merangkai Bunga, Batu Aki, Dekorasi/Eo,Pakan Ternak, Balok, Meubel, , Kaset VCD,Sopi
2	Kecamatan Miomaffo Timur	Garam Yudium, Aneka Kripik, VCO, Instan Kunyit	Beti,Tais, Selendang, Menjahit, Minyak Gosok, Tasbeh Rosario
3	Kecamatan Noemuti	Garam Yudium, Manisan Asam, Beras, Anggur Pisang	Beti, Tais, Selendang, Tas, Tanasak, Niru, Sopi
4	Kecamatan Miomaffo Barat	Keripik Talas, Aneka Kripik, Mutisqua	Beti,Tais,Selendang,Tas, Dompel,Accessories,Kain Meja, Gorden, Minyak Gosok, Pakan Ternak
5	Kecamatan Insana	Garam Yudium, Kripik Pisang, Anggur Pisang	Beti, Tais, Selendang, Fashion,Minyak Rambut, Minyak Gosok, Genteng, Mebel, Batu Aki, Sopi
6	Kecamatan Insana Utara	Garam Yudium, Abon Ikan, Beras, Krupuk Jagung, Aneka Cemilan	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih Sopi
7	Kecamatan Biboki Selatan	Beras, Keripik	Kain Meja, Gorden, Instan Kunyit, Terali, Sopi
8	Kecamatan Biboki Utara	Keripik Pisang	Beti, Tais, Selendang, Batu Akik
9	Kecamatan Biboki Anleu	Garam Yudium, Beras, Krupuk Jagung, Aneka Kripik	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih Sopi, Minyak Atsiri VCO
10	Kecamatan Bikomi Utara	Aneka Keripik, Rempeyek Cemilan, Instan Kunyit	Sopi, Beti, Tais, Selendang, Pakan Ternak
11	Bikomi Selatan	Beras, Aneka Keripik, Stik Jagung, Kopi, VCO, Porang	Sopi, Beti, Tais, Selendang
12	Bikomi Nilulat	Teh Kelor	Beti, Tais, Selendang, Minyak Kayu Putih
13	Kecamatan Bikomi Tengah	Aneka Kripik	Beti, Tais, Selendang, Minyak Sereh
14	Kecamatan Naibenu	Jamu Kelor	Beti, Tais, Selendang
15	Kecamatan Miomaffo Tengah	Dodol Asam, Keripik Pisang	Sopi, Acesoris,Batu Aji, Pakan Ternak
16	Kecamatan Musi	Aneka Kripik, Kacang-kacangan	Anggur Pisang, Beti Tais, Selendang, Tas, Tanasak, Niru
17	Kecamatan Mutis		Beti, Tais, Selendang



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-20

No	Kecamatan	Jenis IKM Pangan	Jenis IKM Non Pangan
18	Kecamatan Noemuti Timur	Beras	Beti, Tais, Selendang, Sepatu, Sendal, Kain Meja, Gorden,
19	Kecamatan Insana Barat	Stik Jagung, Aneka Kripik, Tortila, Jamu Kelor, Instan Mengkudu, Instan Kunyit	Sopi, Terali, Menjahit, Beti, Tais, Selendang
20	Kecamatan Insana Tengah	Gula Merah, Beras	Sopi, Beti, Tais, Selendang, Balok, Minyak Kayu Putih
21	Kecamatan Insana Fafinesu	Aneka Keripik	Sopi, Beti, Tais, Selendang
22	Kecamatan Biboki Moenleu	Beras, Dendeng Ikan	Beti, Tais, Selendang
23	Kecamatan Biboki Tanpah	Pangan	Beti, Tais, Selendang
24	Kecamatan Biboki Feotleu		Beti, Tais, Selendang
Jumlah			

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Timor Tengah Utara, 2025

Kawasan Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2021 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2025. Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara, telah ditetapkan 2 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), 2 Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD), dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). Dalam PERDA RIPPARDA Kabupaten Timor Tengah Utara juga menjabarkan tentang Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) yang terdiri atas DTWD alam, DTWD budaya dan DTWD buatan manusia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14
Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah (DTWD) di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Objek Wisata	Kecamatan	Jenis DTWD
1	Air Terjun Pah Koto	Mutis	DTWD Alam
2	Air Mutis Babnain	Mutis	DTWD Alam
3	Puncak Tunnoer	Miomaffo Timur	DTWD Alam
4	Pantai Tanjung Bastian	Insana Utara	DTWD Alam
5	Pantai Oebubun	Biboki Moenleu	DTWD Alam
6	Faularan	Biboki Anleu	DTWD Alam
7	Perbukitan Manufonu	Insana Utara	DTWD Alam
8	Kampung Adat Maslete	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
9	Taman Doa Bukit Neonbat	Kota Kefamenanu	DTWD Budaya
10	Upacara Kure Neomuti	Noemuti	DTWD Budaya
11	Wisata Sejarah Kota Kefamenanu di Noetoko	Miomaffo Barat	DTWD Budaya
12	Gua Maria Bitauini	Insana	DTWD Budaya
13	Istana Raja Oelolok	Insana	DTWD Budaya
14	Kampung Adat Tamkesi	Biboki Selatan	DTWD Budaya
15	Pos Lintas Batas Negara Wini	Insana Utara	DTWD Buatan Manusia
16	Perlindungan Batas Napan	Bikomi Utara	DTWD Buatan Manusia
17	Kolam Renang Taekas	Miomaffo Timur	DTWD Buatan Manusia
18	Kolam Renang Oeluan	Noemuti	DTWD Buatan Manusia

Sumber: PERDA No. 9 Tahun 2021 tentang RIPPARDA Kabupaten TTU Tahun 2022-2025

Kawasan Permukiman

Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut:

- a. Permukiman perkotaan menengah merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsisebagai PKW dan PKL. Permukiman tersebut dapat dikembangkan di Perkotaan Kefamenanu Dengan berkembangnya kawasan permukiman tersebut akan membentuk pusat pertumbuhan skala wilayah/regional. Berkembangnya area terbangun tersebut akan



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-21

berdampak terhadap skala pelayanan di tingkat regional bahkan akan dapat menghubungkan atau berinteraksi dengan Kota besar di luar wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan perkotaan kecil lainnya.

- b. Permukiman perkotaan kecil merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Perkembangan permukiman perkotaan kecil terdapat di Perkotaan Eban, Perkotaan Oeluan dan Perkotaan Bitauni. Perkotaan Napan, Perkotaan Oenenu Utara, Perkotaan Oesena, Perkotaan Oepuah Selatan, Perkotaan Ponu, Perkotaan Bakitolas, Perkotaan Maubesi, Perkotaan Fanifesu, Perkotaan Bijaepasu, Perkotaan Nilulat, Perkotaan Oeolo, Perkotaan Naekake, Perkotaan Teba Timur, Perkotaan Boronubaen, Perkotaan Manumean, Perkotaan Haekto, Perkotaan Naiola dan Perkotaan Upfaon. Perkembangan permukiman perkotaan kecil ini perlu dibatasi terutama bagi kecamatan yang memiliki lahan dengan tingkat produktifitas lahan tinggi.
- c. Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisi bangunannya.
- d. Penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan permukiman perkotaan.

Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan

Pengembangan pada Kawasan Permukiman Perdesaan dapat dilakukan pada:

- a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan secara umum terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Musi, Kecamatan Mutis, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Noemuti, dan Kecamatan Noemuti Timur.
- b. Pengembangan kawasan permukiman transmigrasi lokal di wilayah Pantai Utara dengan pusat di Ponu meliputi Kecamatan Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Insana Tengah, Insana Utara, Insana dan Naibenu.

Kebijakan pengembangan kawasan permukiman desa adalah:

- a. Mengembangkan desa-desa maju sebagai pusat permukiman perdesaan atau desa pusat pertumbuhan, dengan meningkatkan aksesibilitas dan sarana-prasarana.
- b. Pengembangan desa sentra produksi pertanian, khususnya bagi desa-desa yang berpotensi komoditas tertentu.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan fasilitas sosial ekonomi, meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan pembangunan infrastruktur jalan dan komunikasi di seluruh desa.
- d. Integrasi dengan daerah kota yang berdekatan, baik dalam pelayanan, produksi, dan distribusi, sehingga terjalin keterkaitan yang erat.
- e. Khusus perkampungan-perkampungan pedesaan pada kawasan yang rawan terhadap bencana longsor, perlu relokasi penduduk.
- f. Memproteksi lahan yang telah dibebaskan sampai nanti siap untuk digunakan bagi pembangunan.
- g. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas, instansi, lembaga lainnya dalam melakukan tugas pembebasan lahan.



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

III-22

Kawasan Konservasi

Penetapan kawasan suaka alam yaitu cagar alam ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, bahwasannya luas cagar alam di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 2.426 Ha terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat dan Kecamatan Mutis.

Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, meliputi:

- Rehabilitasi kawasan bekerjasama dengan dinas terkait.
- Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami ahli fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
- Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
- Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan
- Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya *outbond*, *camping*).

Kawasan Cagar Budaya

Beberapa potensi wisata budaya yang sudah ditetapkan melalui PERDA RIPPARDA, SK Bupati dan daftar Inventarisasi KEMENDIKBUD antara lain:

- Kampung Adat Maslete di Kecamatan Kota Kefamenanu;
- Kampung Adat Tamkesi Kecamatan Biboki Selatan;
- Komplek Tau Leu Sal Neno di Kecamatan Biboki Selatan;
- Rumah Adat Manumuti Kempah di Kecamatan Biboki Selatan;
- Rumah Adat Sonaf Bikomi di Kecamatan Kota Kefamenanu;
- Rumah Adat Sonaf Thaal Aplal di Kecamatan Mutis;
- Rumah Adat Kloepose di Kecamatan Mutis.
- Rumah Adat Kolo Eba di Kecamatan Insana Barat.
- Rumah Raja/Sonaf Maubesi di Kecamatan Insana Tengah.
- Rumah Raja Insana (Sonaf Oelolok) di Kecamatan Insana.

Arahan rencana pengembangan kawasan konservasi budaya dan sejarah ini mencakup pelestarian kawasan yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mengembalikan wajah obyek konservasi
- Memanfaatkan obyek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini
- Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang tercermin dalam obyek pelestarian
- Menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota dalam wujud tiga dimensi.
- Arahan konservasi kawasan atau bangunan budaya dan sejarah, dengan cara:
- Mempertahankan budaya atau sejarah kawasan tersebut.
- Menjamin terwujudnya keragaman bangunan pada suatu kawasan sebagai tuntutan aspek estetis serta keanekaragaman budaya masyarakat setempat.
- Motivasi simbolis yang merupakan manifestasi fisik dari identitas berkelompok masyarakat tertentu yang pernah menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan kawasan.
- Kawasan cagar budaya merupakan kawasan pertampalan yang pengaturannya diatur dalam ketentuan umum zonasi.

Kawasan Transmigrasi Ponu

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kawasan Transmigrasi diarahkan menjadi pusat pertumbuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

III-23

penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil. Selain itu, pengembangan kawasan transmigrasi dilakukan melalui peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, pengembangan tenaga terampil dan pengembangan sistem permukiman yang memiliki kemampuan saling belajar untuk berkembang dan hidup bersama

d. Arah Kebijakan

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan berisikan rangkaian kerja penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-24

Tabel 3. 15

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

VISI "Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
MISI I	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN	Landasan Pembangunan Ekonomi Daerah serta Penyiapan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang berdaya saing	Grand Desain Pembangunan Ekonomi Daerah disertai Kebijakan Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah					
			Mendorong Inovasi sektor perekonomian Daerah					
			Penelitian berbasis asas manfaat dan keberlanjutan perekonomian					
			Pilot Project serta Penetapan Produk Unggulan Daerah dengan memperhatikan Karakteristik wilayah					
			Pengembangan Bawang Putih Lokal sebagai Produk Unggulan Provinsi NTT					
			Penyediaan Data Perekonomian yang Komperhensif					
			Membangun Kerjasama dan Jaringan Pemasaran Produk					
			Menyiapkan skema Permodalan bagi pelaku perekonomian					
			Sinkronisasi dan meningkatkan Perekonomian Desa dan Keaktifan BUMDes					
			Meningkatkan Produktivitas serta menjaga eksistensi UMKM dan Koperasi yang dapat berkontribusi bagi perekonomian Daerah					
			Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya serta memperhatikan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Perikanan					
			Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Kebudayaan dan Karakteristik Wilayah					
			Terciptanya Swasembada Pangan Daerah					
			Meningkatkan Produksi Pertanian dan pengembangan Produk Pertanian dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai					
			Meningkatkan Kualitas dan Populasi Ternak					
			Perdagangan Daerah yang kondusif dan stabilitas harga					
			Meningkatkan Produksi Industri dengan penggunaan bahan lokal primer daerah (Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan)					
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD	Regulasi dan kebijakan terkait Peningkatan Pendapatan Daerah melalui PDRD dan Return of Asset					
			Administrasi Pendapatan atas dasar asas Equality dan Efficiency					
			Memaksimalkan sumber-sumber PAD serta kajian dan analisis penghitungan Komprehensif atas Objek Pajak yang sudah tidak relevan					
		Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif	Melakukan evaluasi dan pemeriksaan secara rutin terkait Laporan Laba-Rugi Perangkat Daerah Pengampuh PAD serta tindak lanjut atas Kerugian yang dialami					
			Peningkatan pemerataan, Akselerasi hilirisasi dan Pemanfaatan potensi daerah melalui Investasi Daerah					
			Kemudahan Layanan Perizinan					
			Menjadikan Koperasi Merah Putih Sebagai Salah satu Investasi Desa					
			Iklim Investasi yang kondusif serta kemudahan Berinvestasi					



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-25

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
				2026	2027	2028	2029	2030	
MISI II	"MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERDAYA SAING"	Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun pra sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar)	Membangun Kemitraan Investasi yang dapat menunjang keberlanjutan Perekonomian serta layanan perizinan dengan berlandaskan Asas Efisiensi dan Keadilan						
			Desain Pendidikan Gratis yang dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki						
			Kajian dan Pemenuhan Tenaga Pendidikan serta Fasilitas Pendidikan yang memadai						
			Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik daerah						
			Menjalin kerjasama dengan pihak lainnya yang dapat memberikan pengalaman praktis kepada siswa/I tentang pentingnya pendidikan sebagai salah satu jalan menuju kesuksesan.						
			Peningkatan Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Siswa/i						
			Meningkatkan Indeks Pendidikan serta Hasil dan Implementasi Pembelajaran Siswa/i.						
			Mewujudkan Siswa/I yang berkarakter, bermoral dan menjunjung tinggi adat istiadat						
			Meningkatkan Penduduk dengan kualifikasi Pendidikan Menengah dan Tinggi						
			Edukasi Pendidikan berbasis digital						
		Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan minat baca Masyarakat						
			Menyediakan Perpustakaan Digital Daerah						
			Publikasi dan Pengarsipan secara Digital						
		Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan HIV/Aids)	Desain Kesehatan Gratis yang dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki						
			Kajian dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan yang memadai						
			100% UHC dan 100% kepemilikan BPJS Kesehatan						
			Penangan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
			Edukasi Kesehatan berbasis digital						
			Meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Prevalensi Stunting, Balita Gizi Buruk dan Kurang						
			Penanganan penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan HIV/Aids)						
			Peningkatan layanan, akses dan keberhasilan pengobatan di Fasilitas Kesehatan						
			Peningkatan Fasilitas Kesehatan						
			Adanya Gerakan Peduli Kesehatan dan						
			Digitalisasi Kesehatan						
			Keluarga Bahagia dan Sejahtera	Landasan Keluarga Bahagia dan Sejahtera					
				Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Sejahtera					
		Menjadikan Kab.TTU menjadi Kabupaten Layak Anak							
		Pemuda-Pemudi Kab.TTU Berkualitas dan masyarakat TTU gemar berolahraga	Pengembangan potensi pemuda, peningkatan kualitas hidup, dan pembentukan karakter Pemuda/i						
			Meningkatkan Prestasi Olahraga Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olahraga						
		Ketahanan Pangan	Pilot Project Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan berbasis karakteristik kewilayahan						
			Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam, stabilitas harga pangan, dan penguatan tata kelola pangan						



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-26

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				2026	2027	2028	2029	2030
MISI III	"MENINGKATKAN AKSES LAYANAN SOSIAL"	Penuntasan Kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan Perlindungan Sosial Adaptif terintegritas	Desain Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.					
			Bantuan sosial dengan tujuan kesejahteraan keluarga miskin dan miskin ekstrim					
			Meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan miskin ekstrim melalui Bantuan Duka					
			Menilai dan Mengevaluasi keberhasilan Bantuan Sosial dapat menurunkan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim berdasarkan data terpadu terkini.					
		Perlindungan Gender	Mengurangi ketimpangan Gender, Meningkatkan Pembangunan Gender serta menjadikan Perempuan Produktif secara Finansial					
		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	100% Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten					
		Peningkatan Kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan pekerja	Kolaborasi Pelatihan guna tercapainya Hilirisasi Pelatihan Tenaga Kerja Siap berpenghasilan					
			Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan					
			Pengembangan Program dan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi					
			Digitalisasi Ketenagakerjaan					
			Kolaborasi Pemerintahan, Dunia Usaha dan Industri guna memastikan relevansi pelatihan dengan kebutuhan lapangan kerja sehingga terciptanya tenaga kerja siap pakai.					
			Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					
			Pengembangan Wirausaha Muda dan Daerah					
			Persiapan dan Pelatihan bagi Pemuda Daerah dan Kaum Disabilitas guna mendapatkan tempat pada Pekerjaan Sektor Formal					
MISI IV	"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERKEMAMPUAN"	Transformasi manajemen ASN, Pemberantasan Korupsi serta Layanan Kemasyarakatan	Meningkatkan etos dan budaya kerja ASN sebagai pelayan, menata sistem karier dengan mengutamakan kemampuan dan keahlian serta kelembagaan daerah					
			Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi					
			Memperkuat Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
			Digitalisasi Pemerintahan					
			Meningkatkan Layanan Adminstrasi					
			Tertib Perencanaan serta efisiensi dan efektifitas penganggaran daerah					
			Perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan masyarakat, menjaga stabilitas sosial dan Menegakkan Keadilan					
			Memberikan Rasa Aman dan Nyaman kepada masyarakat Kab.TTU dalam menjalankan aktivitasnya					
			Meningkatkan kerjasama guna tercapainya pembangunan daerah					
		Integrasi Pemerintahan kabupaten dan Desa	Penguatan Pemerintahan Kecamatan dan Desa					
			Sinkroniasi Perencanaan dan Pembangunan Desa, Kecamatan dan Kabupaten					
			Pembangunan bersifat Buttom Up					
			Grand Desain Pembangunan Infrastruktur Dasar Daerah					
		MISI V						



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-27

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN							
				2026	2027	2028	2029	2030		
	"MENINGKATKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR "	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Kajian kebutuhan dan kebijakan pemenuhan Infrastruktur Daerah							
			Pembebasan dan pemanfaatan Lahan Pemerintah Kabupaten							
			Pemenuhan Infrastruktur Pendidikan Daerah (Ruang Kelas dalam kondisi baik)							
			Pemenuhan Infrastruktur Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik)							
			Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pendukungnya							
			Pemenuhan Infrastruktur Perumahan Rakyat (Pembangunan Rumah Layak Huni dengan sasaran KK Miskin, Miskin Ekstrem dan Korban Bencana)							
			MISI VI	"MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBUDAYAAN ATOIN METO"	Melestarikan Lingkungan Hidup sebagai Paru-Paru Kabupaten	Dokumen Induk Lingkungan Hidup				
Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										
Pengisolasian dan Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
Pilot Project Pengolahan Limbah Industri										
Meningkatkan Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah										
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										
Meningkatnya Luas Wilayah yang tertutup pepohonan pada musim kemarau										
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca										
Ketahanan dan Pengendalian Bencana Alam dan Non Alam	Tersedianya Dokumen Induk Kebencanaan									
	Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana guna mengurangi Risiko Bencana									
	Mengurangi Luas Wilayah yang terdampak Bencana									
	Meningkatkan Ketahanan Daerah									
	Penanggulangan Bencana Kekeringan									
	Penyediaan Makanan dan Sandang kepada korban bencana									
	Rehabilitasi Sosial Korban Bencana									
	Penguatan Karakter dan Jati Diri Daerah	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah (Mulok Bahasa Daerah, Budaya Daerah, Inventarisasi Kekayaan Budaya dan Sejarah Kabupaten)								
Insentif Rumah Adat										
Pengarsipan Naskah Kuno Daerah (Digital)										
Adanya Publikasi Sejarah Kab.TTU dan Kepemimpinan Daerah dari masa Kolonial sampai dengan saat ini										
Penyediaan Referensi Literasi Bahasa Dawan										
Membangun kerjasama untuk memberikan layanan sosial di bidang keagamaan dan Pendidikan										
Pencegahan Dini Potensi konflik SARA										
Parade Kebudayaan Rutin serta Pelestarian Prosesi Adat										
MISI VII		"MEMBANGUN KAWASAN STRATEGIS DAERAH"			Menjadikan Kota Kefamenanu sebagai Kota BERADAT	Grand Desain Kota Kefamenanu sebagai Kota BERADAT				
	Pengembangan perwujudan Kota Kefamenanu sebagai Kota BERADAT									
	INFRASTRUKTUR:									
	Meningkatkan Jalan Perkotaan dalam Kondisi Baik									



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-28

MISI		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatkan Lampu Penerangan Jalan terpasang					
			Meningkatkan Ruang Terbuka Publik dalam Kota Kefamenanu					
			SOSIAL DAN EKONOMI:					
			Meningkatnya UMKM dan IKM dalam Kota					
			Meningkatnya Penyelenggaraan Event/Festival dalam Kota Kefamenanu					
			Meningkatnya Penataan dan Pengelolaan Pasar dalam Kota Kefamenanu					
			BERSIH:					
			Meningkatnya Rumah yang terlayani Persampahan					
			AGAMIS/ ADAT ISTIADAT					
			Meningkatnya Jumlah Event Keagamaan Terselenggara					
			Meningkatnya Prosesi Adat Rutin dilaksanakan					
			Meningkatnya Bantuan Keagamaan					
			DAMAI:					
			Menurunkan Angka Kriminalitas dalam Kota					
			AMAN DAN TENTRAM :					
			Penduduk yang merasa Aman yang berjalan di Kawasan Kota Kefamenanu					
		Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Perekonomian Kawasan Strategis Daerah	Penetapan dan Desain Kawasan Strategis Daerah					
			Penyiapan Dokumen Pendukung dan RC terkait pengembangan Kawasan Strategis Daerah					
			Dimensi Infrastruktur					
			Pemenuhan Infrastruktur Pendidikan Daerah (Ruang Kelas dalam kondisi baik) di Kawasan Strategis Daerah					
			Pemenuhan Infrastruktur Kesehatan (Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik) di Kawasan Strategis Daerah					
			Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Air Bersih, Sanitasi, Elektrifikasi dan Konektivitas) di Kawasan Strategis Daerah					
			Pemenuhan Infrastruktur Perumahan Rakyat (Pembangunan Rumah Layak Huni dengan sasaran KK Miskin, Miskin Ekstrem dan Korban Bencana) di Kawasan Strategis Daerah					
			Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu					
			Dimensi Perekonomian					
			Pemanfaatan Pasar pada Kawasan Strategis Daerah sebagai pusat perekonomian Kecamatan					
			Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jangung) pada Kawasan Perbatasan					
			Meningkatkan Jumlah Kunjungan Objek Wisata di Kawasan Perbatasan					
			Meningkatkan IKM dan UMKM aktif pada Kawasan Perbatasan					
			Meningkatkan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan					
			Meningkatkan Jumlah Kunjungan Objek Wisata Bahari di Kawasan Pantai Utara					
			Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu					

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

III-29

3.2.2. Program Prioritas Daerah

Program Prioritas adalah *cascading* kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai Instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Program prioritas bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.

Untuk menjaga sinergitas antara Program Prioritas Kepala dan Wakil Kepala Daerah dengan Program Urusan Pemerintahan Daerah, maka ditetapkan 23 Tagline Program Prioritas yang diturunkan (*Cascading*) pada Urusan Pemerintahan Daerah. Program Prioritas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-30

Tabel 3. 16

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VISI	"Terwujudnya Masyarakat TTU yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"						
MISI	1.Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan 2.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing 3.Meningkatkan Akses Layanan Sosial 4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan 5.Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Catatan: Merupakan penjabaran dari Misi III "Meningkatkan Akses Layanan Sosial" 6.Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoni Meto Catatan: Kebudayaan Atoni Meto merupakan penjabaran dari Misi "Mewujudkan Sumber	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kab.TTU			Pertumbuhan Ekonomi		
			Meningkatnya Kontribusi Produk Domestik Bruto Daerah Sektor Prioritas		Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)		EKONOMI MASYARAKAT MERAKYAT
					Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		PRODUK UNGGULAN DAERAH IDENTITAS DAERAH
					Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)		PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DESA
				Meningkatnya pemenuhan Prasarana Pertanian Masyarakat	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Petani	URUSAN PERTANIAN	
					Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi	URUSAN PERTANIAN	
					Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung	URUSAN PERTANIAN	
				Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Peternak/Nilai Tukar Usaha Peternak	URUSAN PERTANIAN (Sub Sektor Peternakan)	
					Luasan Hijauan Pakan Ternak	URUSAN PERTANIAN (Sub Sektor Peternakan)	
				Meningkatnya Produktivitas dan Kesejahteraan Nelayan serta Pembudidaya Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Meningkatnya Produktivitas Industri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (Miliar)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
					Proporsi IKM Non Pangan pada Level Kabupaten	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
				Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-31

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing" 7.Membangun Kawasan Strategis Daerah				Net Ekspor Barang dan Jasa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
				Meningkatnya Keaktifan UMKM, Koperasi dan Wirausaha	Persentase UMKM Aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
					Rasio Kewirausahaan Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
					Persentase Koperasi Aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
				Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Miliar)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
					PDRB Ekonomi Kreatif (Juta)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
				Meningkatnya Inklusi Keuangan Daerah	Indeks Akses Keuangan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Ekonomi)	
					Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * Laju Inflasi		
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Pertumbuhan PAD		PENINGKATAN PAD
				Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Rasio PAD terhadap APBD	URUSAN KEUANGAN DAN PENGAMPUH PAD	
					Urusan Pengampuh PAD		
					Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD	SEMUA URUSAN PENGAMPUH PAD	
			Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah		Return on Aset (ROA) BUMD (%)	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Ekonomi)	PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH
					Pertumbuhan Nilai Investasi		
					Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	URUSAN PENANAMAN MODAL	
				Mewujudkan Iklim Investasi yang aman dan kondusif	Total Kredit/PDRB (%)	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Ekonomi)	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-32

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara		Meningkatnya Investasi Desa	Persentase BumDes Aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Indeks Daya Saing Daerah		
			Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Daerah		Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan		PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
							KOTA KEFAMENANU SEBAGAI KOTA BERADAT
				Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan Dasar Pada Kawasan Perbatasan	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Kawasan Perbatasan)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Infrastruktur Kesehatan Dasar Pada Kawasan Perbatasan	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit) (Kawasan Perbatasan)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dasar Pada Kawasan Perbatasan	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%) (Kawasan Perbatasan)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Rumah Layak Huni Pada Kawasan Perbatasan	Persentase Rumah Layak Huni pada Kawasan Perbatasan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya Keaktifan Pasar Pada Kawasan Perbatasan	Persentase Kecamatan di Kawasan Perbatasan yang memiliki pasar Aktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
				Meningkatnya Produktivitas IKM Pada Kawasan Perbatasan	Pertumbuhan Produktivitas IKM aktif pada Kawasan Perbatasan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
				Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan Pada Kawasan Perbatasan	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi pada Kawasan Perbatasan	URUSAN PERTANIAN	
					Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung pada Kawasan Perbatasan	URUSAN PERTANIAN	
				Meningkatnya Produktivitas UMKM Pada Kawasan Perbatasan	Pertumbuhan Produktivitas UMKM aktif pada Kawasan Perbatasan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-33

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Produksi Nelayan	Pertumbuhan Produksi Nelayan	URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN	
				Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
				Meningkatnya Jalan dalam Kota Kondisi baik	Jalan dalam Kota Kondisi baik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya penyediaan Lampu Penerangan Jalan	Lampu Penerangan Jalan terpasang (Target 90 Lampu terpasang)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
				Meningkatnya Ruang Terbuka Publik dalam Kota	Ruang Terbuka Publik dalam Kota terbangun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya UMKM dalam Kota Terbina	Persentase UMKM dalam Kota Terbina	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
				Meningkatnya IKM dalam Kota Terbina	Persentase IKM dalam Kota Terbina	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
				Meningkatnya Pengembangan Pasar dalam Kota Kefamenanu	Persentase Pengembangan Pasar dalam Kota Kefamenanu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Event/Festival dalam Kota	Jumlah Event/Festival dalam Kota yang terselenggarakan (Minimal 12 Event atau Festival)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
				Meningkatnya Rumah Tangga (RT) Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Proporsi Rumah Tangga (RT) Perkotaan dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya Kerukunan antar umat beragama	Jumlah Event Keagamaan terselenggara	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Daerah	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Meningkatnya Bantuan Keagamaan	Jumlah Bantuan Keagamaan Tersalurkan	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Kesra)	
				Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kota	Jumlah Angka Kriminalitas dalam Kota	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Sub Sektor Polisi Pamong Praja)	
					Proporsi Penduduk yang merasa Aman yang berjalan di Kawasan Kota Kefamenanu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-34

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						MASYARAKAT (Sub Sektor Polisi Pamong Praja)	
				Meningkatnya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Jumlah Kerjasama Antar Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Persentase fasilitasi pemasangan Pilar Batas Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
					Jumlah Kerjasama Antar Daerah (Kumulatif)	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pemerintahan)	
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Maju, Inovatif dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Indeks Pendidikan		PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DAN LITERASI MASYARAKAT
				Meningkatnya Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
					Rata-Rata Lama Sekolah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Hasil Pembelajaran Siswa/i	i) Literasi Membaca (SD/Mi)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
					ii) Numerasi (SD/Mi)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
					i) Literasi Membaca (SMP/MTs)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
					ii) Numerasi (SMP/MTs)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
					Persentase satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Distribusi Tenaga Pendidikan di Kab.TTU	Indeks Pemerataan Guru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kab.TTU	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
				Meningkatnya Kecapakanan Teknologi Informasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-35

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup		PROGRAM KESEHATAN GRATIS DAN KELUARGA SEHAT BAHAGIA
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
					Cakupan penemuan dan pengobatan Kasus HIV/AIDS (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Jaminan Kesehatan Nasional secara gratis	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	<i>Total fertility rate</i>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Meningkatnya Pelayanan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Maturitas BLUD	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (Sub Sektor Rumah Sakit)	
				Meningkatnya Prestasi dalam Bidang Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga (Cabang Olahraga)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Meningkatnya kecukupan Pangan dan Gizi Masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan		PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAERAH



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-36

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau (Nabati dan Hewani)	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	URUSAN KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KELAUTAN PERIKANAN	
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	URUSAN KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KELAUTAN PERIKANAN	
					Ketersediaan Protein Perkpita	URUSAN KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KELAUTAN PERIKANAN	
			Meningkatnya eksistensi dan pengamalan budaya “Atoin Meto”		Indeks Pembangunan Kebudayaan		PROGRAM KEBUDAYAAN ATOIN METO
				Meningkatnya Eksistensi Kebudayaan Atoin Meto	Jumlah Warisan Budaya Atoin Meto yang dilestarikan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
				Meningkatnya Pengamalan Nilai Budaya Atoin Meto	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Indeks Demokrasi Indonesia	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Jumlah Konflik Sosial	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
					Indeks Rasa Aman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Sub Sektor Polisi Pamong Praja)	
					Indeks Ketentraman dan Ketertiban	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Sub Sektor Polisi Pamong Praja)	
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak untuk		Indeks Perlindungan Anak		PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK MENUJU TTU EMAS 2045



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-37

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	terciptanya TTU Emas 2045				
				Menjadikan Kabupaten TTU menjadi Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Layak Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
					Tingkat Kemiskinan		
					Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)		
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat serta mengurangi kesenjangan		Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)		PROGRAM TENAGA KERJA TERAMPIL, UNGGUL DAN BERDAYA SAING
					Rasio Gini		PROGRAM PEMBANGUNAN PEMUDA
							PROGRAM TULUS (banTuan duka Untuk keLUarga miSkin) DAN BANTUAN SOSIAL
				Menurunnya Angka Pengangguran serta memberdayakan masyarakat usia non produktif dan kesempatan kerja bagi kaum disabilitas	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
					Tingkat Pengangguran Terbuka	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
					Rasio Penduduk yang bekerja (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
					Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Tenaga Kerja dengan Kualifikasi Keahlian Menengah dan Tinggi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
					Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-38

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
					Indeks Pembangunan Pemuda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
				Meningkatnya Layanan Sosial bagi Masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
			Meningkatnya peran Perempuan dalam perekonomian keluarga		Indeks Ketimpangan Gender		PROGRAM PEMBANGUNAN PEREMPUAN
				Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan serta Pembangunan Gender	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	URUSAN TENAGA KERJA DAN	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
					Indeks Pembangunan Gender	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat		Indeks Infrastruktur		PROGRAM PEMENUHAN INFRASTRUKTUR DASAR MASYARAKAT
				Meningkatnya Ruang Kelas dalam kondisi baik	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
				Meningkatnya Fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik	Persentase Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit dalam kondisi baik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Infrastruktur Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-39

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Rasio Elektrifikasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Persentase Akses Sanitasi Layak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
					Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya konektivitas antar daerah (Trayek) serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung lalu lintas	Rasio Konektivitas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
					Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
				Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya Tanah Pemerintah Bersertifikat	Persentase Tanah Pemda Bersertifikat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
		Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan			Indeks Reformasi Birokrasi		
			Meningkatnya integritas tata Kelola pemerintahan		Maturitas SPIP		PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
					Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas		
				Meningkatnya Kinerja dan Pertanggungjawaban Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan	URUSAN KEUANGAN	
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	URUSAN KEUANGAN	
					Indeks Integritas Nasional	URUSAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya Integritas dan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-40

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA dan KECAMATAN	
				Meningkatnya tata kelola pengadaan yang baik, transparan, dan akuntabel	Tingkat Kematangan UKPBJ	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik		PROGRAM PELAYANAN PUBLIK TANPA PUNGUTAN
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Organisasi)	
				Meningkatnya Layanan Pencatatan Kependudukan	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
				Meningkatnya jaminan setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar minimal dengan kualitas yang sama	Capaian SPM Kab.TTU	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Tata Pemerintahan)	
				Meningkatnya Pelayanan DPRD	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja DPRD	URUSAN SEKRETARIAT DEWAN	
				Menciptakan Kepastian Hukum kepada masyarakat	Persentase Penegakan Perda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Sub Sektor Polisi Pamong Praja)	
					Pembentukan dan Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (%)	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Hukum)	
					Indeks Pembangunan Hukum	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Hukum)	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		SAKIP		PROGRAM OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-41

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada publik	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Akuntabilitas tepat waktu (LKJIP)	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Organisasi)	
				Meningkatnya Manajemen dan efektifitas ASN	Indeks Merit Sistem	URUSAN KEPEGAWAIAN	
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	URUSAN KEPEGAWAIAN	
					Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematis)	SEMUA URUSAN	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perangkat Daerah	SEMUA URUSAN	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	PERENCANAAN	
				Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
					Indeks Inovasi Daerah	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
			Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks SPBE		PROGRAM DIGITALISASI PEMERINTAHAN
				Tersedianya Publikasi Kinerja dan Kondisi Eksisting secara Digital	Indeks Pembangunan Statistik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
					Persentase Data Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
				Meningkatnya Pengarsipan Naskah Pemerintahan secara baku	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-42

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	URUSAN	TAGLINE PROGRAM PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
					Persentase Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah		
				Meningkatnya Layanan terhadap Aduan Masyarakat melalui Call center	Persentase Aduan Masyarakat melalui Call Center yang tangani	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah			Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		PROGRAM PEDULI LINGKUNGAN HIDUP
				Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana		Indeks Ketahanan Daerah		DAERAH SIAP HADAPI BENCANA
				Menurunnya Risiko Bencana dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Persentase Desa/Kelurahan yang terdampak Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Sub Sektor Bencana)	

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

III-43

3.2.3. Keselarasan Asta Cita Nasional, Dasa Cita Prov.NTT dan Sapta Cita Kab.TTU

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dan indikator kinerja merupakan upaya dalam rangka menangani permasalahan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara serta memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah serta untuk mendukung kebijakan nasional dan kebijakan provinsi NTT Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut maka keselarasan Asta Cita Nasional, Dasa Cita Prov. NTT dan Sapta Cita Kab.TTU sebagai berikut:



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-44

Tabel 3. 17

Keterkaitan SAPTA CITA (Kab. TTU), DASA CITA (Prov. NTT) dan ASTA CITA Nasional

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
MENINGKATNYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT KAB.TTU			1.Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.	Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
				Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri.
				Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin.	Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
	Ekonomi Masyarakat Rakyat	Pertumbuhan Ekonomi			
	Produk Unggulan Daerah Identitas Daerah	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)			
	Pengembangan Perekonomian Desa	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)			
	Peningkatan PAD	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)			
	Pengembangan Investasi Daerah	Pertumbuhan PAD			
		Pertumbuhan Nilai Investasi			
MENINGKATNYA DAYA SAING KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA				Dari Ladang dan Laut ke Pasar:	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-45

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Membangun Kawasan Strategis Daerah	Efisien, Modern dan Aman.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
				Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal.	
	Pengembangan Kawasan Perbatasan	Indeks Daya Saing Daerah			
	Kota Kefamenanu Sebagai Kota BERADAT	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan			
MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, MAJU, INOVATIF DAN BERDAYA SAING			2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing	Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
			6. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoin Meto	Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting.	Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
				Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Daerah.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-46

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pendidikan Gratis dan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	Program Kesehatan Gratis dan Keluarga Sehat Bahagia	Indeks Pendidikan			
	Program Kebudayaan Atoin Meto	Usia Harapan Hidup			
	Program Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan			
	Program Perlindungan Anak Menuju TTU EMAS 2045	Indeks Ketahanan Pangan			
		Indeks Perlindungan Anak			
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			3. Meningkatkan Akses Layanan Sosial	Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
			5. Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur	Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
				Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni: Mewujudkan NTT yang Sejahtera.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
	Program Tenaga Kerja Terampil, Unggul dan Berdaya Saing	Tingkat Kemiskinan			
	Program Pembangunan Pemuda	Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)			
	Program TULUS (banTuan duka Untuk keLUarga miSkin) dan Bantuan Sosial	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)			



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

III-47

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pembangunan Perempuan	Rasio Gini			
	Program Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender			
		Indeks Infrastruktur			
TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERKEMAMPUAN			4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan	Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
				Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.	Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
					Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
					Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
	Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi			
	Program Pelayanan Publik Tanpa Pungutan	Maturitas SPIP			
	Program Optimalisasi Kinerja Pegawai	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas			
	Program Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik			



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

III-48

TAGLINE PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG	SAPTA CITA KAB.TTU	MENDUKUNG DASA CITA PROVINSI NTT	MENDUKUNG ASTA CITA NASIONAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		SAKIP			
		Indeks SPBE			
MENINGKATNYA KETAHANAN BENCANA DAERAH			6. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoin Meto	Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.	Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
	Program Peduli Lingkungan Hidup	Indeks Risiko Bencana			
	Daerah Siap Hadapi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
		Indeks Ketahanan Daerah			

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2025



***Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029***

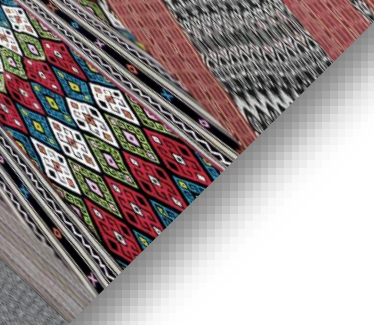
IV-1

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.1.1. PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan Kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja Pembangunan Daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan Perencanaan. Program dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:



IV-2

Program dan Pendanaan Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN /PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Gaji dan Tunjangan ASN Kab.TTU									717.825.415.274,00		725.552.102.774,00		733.394.690.586,50	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					702.712.915.274,00		710.212.915.274,00		54.278.970.000,00		54.389.590.000,00		54.502.030.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	527.891.000,00	100	528.420.000,00	100	528.420.000,00	100	528.420.000,00	100	530.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100			
	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Angka	92,19	92,37	51.939.198.023,14	92,47	52.043.080.000,00	92,56	53.543.080.000,00	92,65	53.650.160.000,00	92,74	53.757.460.000,00
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 (SD/SMP)	Angka	99,18	99,38		99,48		99,58		99,68		99,78	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Angka	74,32	74,47		74,54		74,62		74,69		74,77	
		Meningkatnya Kemampuan Peserta Didik	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	43,12	48,12		51,22		54,32		57,42		60,52	
			Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	42,35	48,15		51,35		54,55		57,75		60,95	
			Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	56,45	58,65		60,15		61,65		63,15		64,65	
			Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Skor	55,49	58,49		59,99		61,49		62,99		64,49	
			Meningkatnya Fasilitas Pendidikan dalam Koondisi Baik	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Ruang Kelas)	%	39,35	39,42		39,45		39,48		39,51		39,54
		Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)		%	22,6	39,42		39,45		39,48		39,51		39,54	
		Meningkatnya Kesadaran Siswa akan Pentingnya Iklim Keberagaman, Iklim Keamanan dan Iklim Inklusifitas	Iklim Kebhinekaan SD	%	66,64	68,64		69,64		70,64		71,64		72,64	
			Iklim Kebhinekaan SMP	%	70,35	72,35		73,35		74,35		75,35		76,35	
			Iklim Keamanan SD	%	67,78	68,58		70,48		71,38		72,28		73,18	
			Iklim Keamanan SMP	%	67,35	70,35		71,85		73,35		74,85		76,35	
			Iklim Inklusivitas SD	%	52,99	57,99		60,49		62,99		65,49		67,99	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-3

BIDANG URUSAN / PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Berbasis Kearifan Lokal	Iklim Inklusivitas SMP	%	54,24	59,04		61,44		63,84		66,24		68,64	
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100		100	25.000.000,00	100	26.000.000,00	100	27.000.000,00	100	28.000.000,00
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/Mi	%	100	100		100		100		100		100	
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	100	100		100		100		100		100	
		Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	100	100		100		100		100		100	
PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Indeks		0,5	137.400.000,00	0,6	138.430.000,00	0,7	139.470.000,00	0,8	140.510.000,00	0,9	141.570.000,00
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%		80		85		90		95		100	
PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	95	95		100	15.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00
PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100	100	25.000.000,00	100	25.500.000,00	100	26.000.000,00	100	26.500.000,00	100	27.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KEBUDAYAAN				345.000.000,00		360.750.000,00		384.510.000,00		392.780.000,00		399.070.000,00
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%		25	155.000.000,00	26	158.000.000,00	27	161.000.000,00	28	164.000.000,00	29	167.000.000,00
PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	100	100	50.000.000,00	100	50.750.000,00	100	51.510.000,00	100	52.280.000,00	100	53.070.000,00
PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	Jumlah	-	-		1	10.000.000,00	2	12.000.000,00	3	14.500.000,00	4	15.000.000,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100	100	140.000.000,00	100	142.000.000,00	100	160.000.000,00	100	162.000.000,00	100	164.000.000,00
		Persentase Warisan Budaya Tak Benda Dilestarikan	%	100	100		100		100		100		100	
2	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KESEHATAN				82.920.170.000,00		82.154.460.000,00		83.709.360.000,00		84.014.760.000,00		84.320.390.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-4

BIDANG URUSAN /PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	309.200.000,00	100	310.650.000,00	100	312.100.000,00	100	313.550.000,00	100	315.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak	Indeks keluarga Sehat	Indeks	0,096	0,096	77.070.110.000,00	0,097	76.250.000.000,00	0,097	77.750.000.000,00	0,098	78.000.000.000,00	0,098	78.250.000.000,00
			Kesehatan Ibu dan Anak												
			Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	188,75	100		90		80		70		60	
			Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	8,8	6,19		5,47		4,97		4,47		3,97	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	47,30	41,20		38,50		36,00		33,7		31,5	
			Prevalensi Wasting	%	12,30	11,50		11,20		10,90		10,6		10,3	
		Meningkatnya Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan penemuan dan pengobatan Kasus HIV/AIDS (%)	%	92,06	94,06		94,31		94,56		94,81		95,06	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	54	61		64,5		68		71,5		75	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	89,9	>95		>95		>95		100		100	
		Meningkatnya Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit Daerah	Maturitas BLUD	Skor	74,06	76,37		77,53		78,69		79,84		81,00	
		Meningkatnya Fasilitas Kesehatan dalam Kondisi Baik	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit)	%	74,4	75,52		76,64		77,76		78,88		80	
			Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit) (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	74,4	75,52		76,64		77,76		78,88		80	



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-5

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Meningkatnya akreditasi pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Paripurna)	%	26,67	33,33		40		46,67		53,33		60	
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (STR dan SIP)	%	80	85	4.819.760.000,00	90	4.867.960.000,00	95	4.916.640.000,00	100	4.965.810.000,00	100	5.015.460.000,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Alat Kesehatan	%	90	92	270.250.000,00	94	272.750.000,00	96	275.250.000,00	98	277.750.000,00	100	280.000.000,00
			Persentase Cakupan Sediaan Farmasi	%	90	92		94		96		98		100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Integrasi Layanan Primer)	%	2,07	2,76	450.850.000,00	3,45	453.100.000,00	4,15	455.370.000,00	4,84	457.650.000,00	5,53	459.930.000,00
SUB UNIT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						32.067.970.000,00		28.558.990.000,00		28.987.380.000,00		29.422.190.000,00		29.861.740.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	227.800.000,00	100	231.220.000,00	100	234.690.000,00	100	238.210.000,00	100	240.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD	Maturitas BLUD	Skor	74,06	76,37	25.840.170.000,00	77,53	26.227.770.000,00	78,69	26.621.190.000,00	79,84	27.020.510.000,00	81	27.425.810.000,00
	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Masyarakat	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	188,75	100		90	100.000.000,00	80	101.500.000,00	70	103.020.000,00	60	104.570.000,00
			Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	8,8	6,19		5,47		4,97		4,47		3,97	
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	42,7	46,7	6.000.000.000,00	48,7	2.000.000.000,00	50,7	2.030.000.000,00	52,7	2.060.450.000,00	54,7	2.091.360.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					67.787.050.000,00		67.665.410.000,00		68.124.380.000,00		68.536.050.000,00		68.950.721.600,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	288.960.000,00	100	290.000.000,00	100	293.000.000,00	100	296.000.000,00	100	300.000.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-6

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100	100		100		100		100	0,00
PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	83,85	84,5	9.854.890.000,00	84,7	8.904.160.000,00	84,9	8.948.680.000,00	85,1	8.993.420.000,00	85,3	9.038.390.000,00
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum	%	21,31	22,82	10.364.590.000,00	23,19	10.500.000.000,00	23,57	10.600.000.000,00	23,94	10.700.000.000,00	24,32	10.800.000.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGLOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	-			5	200.000.000,00	5	204.000.000,00	5	208.080.000,00	5	212.241.600,00
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	80,84	81,4	6.364.610.000,00	81,7	6.396.430.000,00	82	6.428.410.000,00	82,3	6.460.550.000,00	82,6	6.492.860.000,00
PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	-	-		-	500.000.000,00	-	507.500.000,00	-	515.110.000,00	-	522.840.000,00
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	74,08	77,84		78,3	500.000.000,00	78,75	507.500.000,00	79,21	515.110.000,00	79,66	522.840.000,00
PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemda dalam Kondisi Baik	%	-	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	50.000.000,00
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%		100	650.000.000,00	100	659.750.000,00	100	669.650.000,00	100	679.690.000,00	100	689.890.000,00
PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	%	46,2	47,7	40.214.000.000,00	48,39	39.615.070.000,00	49,09	39.813.140.000,00	49,78	40.012.210.000,00	50,48	40.212.270.000,00
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	-	-		-		-	50.000.000,00	-	50.750.000,00	-	51.510.000,00
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah	%	-	0,8		0,81	50.000.000,00	0,82	52.500.000,00	0,83	55.130.000,00	0,84	57.880.000,00
5	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.938.360.000,00		6.507.630.000,00		6.593.790.000,00		6.676.010.000,00		6.764.290.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	273.380.000,00	100	275.000.000,00	100	285.000.000,00	100	290.000.000,00	100	300.000.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-7

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya		100	100		100		100		100		100	
PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun bagi Warga Negara Korban Bencana	Rumah		3	779.970.000,00	3	791.670.000,00	3	803.550.000,00	3	815.600.000,00	3	827.830.000,00
		2. Jumlah Rumah yang Layak Huni yang dibangun bagi warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten	Rumah		3		3		3		3		3	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%		15	1.133.120.000,00	20	1.150.110.000,00	25	1.167.360.000,00	30	1.184.880.000,00	35	1.202.650.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	%	63,73	65,02	2.519.960.000,00	66,3	2.557.760.000,00	67,59	2.596.130.000,00	68,87	2.635.070.000,00	70,16	2.674.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%		10,00	231.930.000,00	15,00	1.733.090.000,00	20,00	1.741.750.000,00	25,00	1.750.460.000,00	30,00	1.759.210.000,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.250.000.000,00		1.256.420.000,00		1.262.830.000,00		1.269.310.000,00		1.275.810.000,00
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%		100	20.000.000,00	100	20.100.000,00	100	20.200.000,00	100	20.300.000,00	100	20.400.000,00
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%		100	35.000.000,00	100	35.180.000,00	100	35.350.000,00	100	35.530.000,00	100	35.710.000,00
REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ASENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%		100	1.050.000.000,00	100	1.055.410.000,00	100	1.060.830.000,00	100	1.066.290.000,00	100	1.071.780.000,00
PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	%		100	45.000.000,00	100	45.230.000,00	100	45.450.000,00	100	45.680.000,00	100	45.910.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya Izin Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Pemda yang dikelola Pihak Lain	%		100	30.000.000,00	100	30.150.000,00	100	30.300.000,00	100	30.450.000,00	100	30.600.000,00
PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	%		100	70.000.000,00	100	70.350.000,00	100	70.700.000,00	100	71.060.000,00	100	71.410.000,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					2.465.380.000,00		2.512.030.000,00		2.548.460.000,00		2.584.860.000,00		2.626.720.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-8

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	SUB SEKTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					1.312.980.000,00		1.345.530.000,00		1.367.260.000,00		1.389.250.000,00		1.416.490.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	213.930.000,00	100	230.000.000,00	100	235.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	25	32	1.049.050.000,00	42	1.064.780.000,00	52	1.080.750.000,00	62	1.096.970.000,00	72	1.113.420.000,00
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	20	32		42		52		62		72	
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	20	32		42		52		62		72	
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%		5		10		15		20		25	
	PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%		100	50.000.000,00	100	50.750.000,00	100	51.510.000,00	100	52.280.000,00	100	53.070.000,00
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%		100		100		100		100		100	
	SUB SEKTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					1.152.400.000,00		1.166.500.000,00		1.181.200.000,00		1.195.610.000,00		1.210.230.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	252.400.000,00	100	253.000.000,00	100	254.000.000,00	100	254.500.000,00	100	255.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-9

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%		100	900.000.000,00	100	913.500.000,00	100	927.200.000,00	100	941.110.000,00	100	955.230.000,00
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%		100		100		100		100		100	
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.517.400.000,00		7.738.200.000,00		7.852.890.000,00		7.967.610.000,00		8.082.400.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	212.450.000,00	100	220.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	0,00
	PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat pendapatannya	%	100	100	6.699.780.000,00	100	6.800.000.000,00	100	6.900.000.000,00	100	7.000.000.000,00	100	7.100.000.000,00
	PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Warga Negara	3	6		9	100.000.000,00	12	101.500.000,00	15	103.020.000,00	18	104.570.000,00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti yang ditangani	%	50	50,2	241.450.000,00	50,4	242.660.000,00	50,6	243.870.000,00	50,8	245.090.000,00	60	246.310.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial	%	50	50,2	45.720.000,00	50,4	45.950.000,00	50,6	46.180.000,00	50,8	46.410.000,00	60	46.650.000,00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	70	75	318.000.000,00	80	319.590.000,00	85	321.190.000,00	90	322.790.000,00	95	324.410.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Presentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola dengan baik	%	100	100		100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5.530.410.000,00		6.080.120.000,00		6.251.080.000,00		6.423.000.000,00		6.595.900.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-10

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	230.410.000,00	100	235.000.000,00	100	240.000.000,00	100	245.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	0,00
	PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	8.500.000,00	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	18.000.000,00
	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%			1.050.000.000,00		1.500.000.000,00		1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00
	PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%			175.000.000,00		177.620.000,00		180.290.000,00		182.990.000,00		185.730.000,00
	HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Tenaga Kerja	54.701	74.001	4.066.500.000,00	74.001	4.152.500.000,00	74.001	4.214.790.000,00	74.001	4.278.010.000,00	74.001	4.342.170.000,00
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					200.000.000,00		203.000.000,00		206.040.000,00		209.130.000,00		212.270.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	%	52,63	65		67		69		71		73	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	75	80	90.000.000,00	82	91.350.000,00	84	92.720.000,00	86	94.110.000,00	88	95.520.000,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	50	60	110.000.000,00	63	111.650.000,00	66	113.320.000,00	69	115.020.000,00	72	116.750.000,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.183.850.000,00		1.266.040.000,00		1.323.780.000,00		1.374.140.000,00		1.424.610.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	208.370.000,00	100	220.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	78,52	80,52	350.000.000,00	83,02	375.000.000,00	83,52	400.000.000,00	84,02	425.000.000,00	84,52	450.000.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-11

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	87	89	348.560.000,00	91	353.790.000,00	93	359.100.000,00	95	364.490.000,00	97	369.950.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Indeks	0	-	150.000.000,00	1	152.250.000,00	1	154.530.000,00	2	156.850.000,00	2	159.200.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	100		100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	44,53	46,53		48,53	25.000.000,00	50,53	30.000.000,00	52,53	32.500.000,00	54,53	35.000.000,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	51,07	52,07	126.920.000,00	53,07	130.000.000,00	54,07	140.000.000,00	55,07	145.000.000,00	56,07	150.000.000,00
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						941.950.000,00		956.080.000,00		1.013.930.000,00		1.085.940.000,00		1.102.980.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	215.950.000,00	100	219.190.000,00	100	230.000.000,00	100	245.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	5,49	5,72	90.750.000,00	5,78	92.110.000,00	6,15	100.000.000,00	6,2	105.000.000,00	6,25	110.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	80,1	80,3	505.250.000,00	80,4	512.830.000,00	80,5	550.000.000,00	80,6	600.000.000,00	80,7	605.000.000,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,1	3,35	30.000.000,00	3,33	30.450.000,00	3,29	30.910.000,00	3,27	31.370.000,00	3,18	31.840.000,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	98	100	100.000.000,00	100	101.500.000,00	100	103.020.000,00	100	104.570.000,00	100	106.140.000,00
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						2.601.400.000,00		2.675.420.000,00		2.730.000.000,00		3.051.240.000,00		2.880.700.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-12

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	251.520.000,00	100	255.290.000,00	100	259.120.000,00	100	263.010.000,00	100	275.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%							100	250.000.000,00			
	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	Indeks	71,70	72,10	457.890.000,00	72,30	464.760.000,00	72,50	480.000.000,00	72,70	490.000.000,00	72,90	500.000.000,00
			2. Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,51	94,55		94,57		94,59		94,61		94,63	
	PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	%		30	135.000.000,00	31	137.030.000,00	32	139.080.000,00	33	141.170.000,00	34	143.280.000,00
	PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%		78,2	92.000.000,00	79,22	93.380.000,00	80,42	94.780.000,00	81,62	96.200.000,00	88,82	97.640.000,00
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	29	30	15.000.000,00	32	15.220.000,00	34	15.450.000,00	36	15.680.000,00	38	15.920.000,00
	PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	-	-		10		10		10		10	
	PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	-	-	199.990.000,00	1,2	202.990.000,00	2,4	206.040.000,00	3,6	209.130.000,00	4,8	212.260.000,00
	PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100	100		100	15.000.000,00	100	15.230.000,00	100	15.450.000,00	100	15.690.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-13

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	%	100	100		100	20.000.000,00	100	20.300.000,00	100	20.600.000,00	100	20.910.000,00
	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	29,78	32,18	1.450.000.000,00	33,38	1.471.750.000,00	34,58	1.500.000.000,00	35,78	1.550.000.000,00	36,98	1.600.000.000,00
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.108.200.000,00		533.910.000,00		549.570.000,00		565.230.000,00		580.920.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	857.070.000,00	100	250.000.000,00	100	255.000.000,00	100	260.000.000,00	100	265.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	%	1,05	1,60	157.760.000,00	2,10	175.000.000,00	2,60	180.000.000,00	3,10	185.000.000,00	3,60	190.000.000,00
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	36,28	41,28		43,78		46,29		48,79		51,29
				Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,16	98,26		98,31		98,36		98,41		98,46
				Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	Rasio	0,980	0,983		0,983		0,984		0,984		0,985
				Cakupan Pelayanan Kartu Keluarga	%	97,46	99,59		98,47		98,98		99,49		100
	PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100	59.960.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	100		100		100		100		100
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100		100		100		100		
				Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	70,32	78,32		82,32		86,32		90,32		94,32
				Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,58	0,69		0,74		0,79		0,84		0,89
				Kepemilikan Akta Kelahiran	%	61,65	63,15		64,15		65,15		66,15		67,15



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-14

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	0,82	2,05	33.410.000,00	3,05	33.910.000,00	4,05	34.420.000,00	6,05	34.930.000,00	41,91	35.460.000,00
	PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100		100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						226.441.380.000,00		230.425.000.000,00		231.182.250.000,00		231.944.530.000,00		232.456.840.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	239.200.000,00	100	275.000.000,00	100	280.000.000,00	100	290.000.000,00	100	300.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Jumlah Usulan Penataan Desa yang difasilitasi	Usulan	11	11		5	50.000.000,00	5	50.750.000,00	5	51.510.000,00	5	52.280.000,00
	PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Jumlah BumDesma yang terbentuk	Bumdesma		6		11	50.000.000,00	16	50.750.000,00	21	51.510.000,00	23	52.280.000,00
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Desa	182	182		182	50.000.000,00	182	50.750.000,00	182	51.510.000,00	182	52.280.000,00
			Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	45	60		68		77		86		100	
			Persentase Desa yang menggunakan Siskeudes Online	%		60		70		80		90		100	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	%	100	100		100		100		100		100	
			Jumlah Desa yang memiliki Peta Batas hasil Fasilitasi	Desa	11	11		5		5		5		5	
			Jumlah Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPDes) yang disampaikan tepat waktu	Desa	182	182		182		182		182		182	
			Persentase Data SDGs Desa yang telah diverifikasi dan Validasi	%	100	100		100		100		100		100	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-15

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	100	805	226.202.180.000,00	805	230.000.000.000,00	805	230.750.000.000,00	805	231.500.000.000,00	805	232.000.000.000,00
			Jumlah Desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali setahun	Desa	90	118		138		149		169		182	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						9.994.640.000,00		10.145.100.000,00		10.298.760.000,00		10.454.640.000,00		10.612.780.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	230.990.000,00	100	235.000.000,00	100	240.000.000,00	100	245.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,71	2,67	365.800.000,00	2,64	371.290.000,00	2,6	376.860.000,00	2,57	382.510.000,00	2,55	388.250.000,00
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	24,3	23		22,5		22		21,7		21,5	
			Persentase Kehamilan tidak direncanakan	%		16		15		14		13		12	
			Presentase Kampung KB Mandiri Berkelanjutan	%	2,59	21,82		26,82		31,82		36,82		46,82	
	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	61,2	63,2	6.711.710.000,00	63,2	6.812.380.000,00	63,2	6.914.570.000,00	63,2	7.018.290.000,00	63,2	7.123.560.000,00
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	16,54	15,54		14,54		13,54		12,54		11,54	
			Presentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		40,54	42,54		44,54		46,54		48,54		50,54	
	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,81	60,16	2.686.140.000,00	60,67	2.726.430.000,00	61,17	2.767.330.000,00	61,66	2.808.840.000,00	69,66	2.850.970.000,00
		Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	80,6	83,42		84,67		85,83		86,9		88,00		
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						1.762.800.000,00		2.098.320.000,00		2.202.790.000,00		2.257.330.000,00		2.286.940.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-16

BIDANG URUSAN /PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematis)	%	100	100	262.810.000,00	100	266.750.000,00	100	270.750.000,00	100	274.810.000,00	100	278.930.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	%	100	100		100		100		100		100	
	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	% %	50,00 100	53,00 100	1.468.890.000,00	54,50 100	1.800.000.000,00	56,00 100	1.900.000.000,00	57,50 100	1.950.000.000,00	59,00 100	1.975.000.000,00
	PENGLOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	%	50,00	53,00	31.100.000,00	54,50	31.570.000,00	56,00	32.040.000,00	57,50	32.520.000,00	59,00	33.010.000,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.177.100.000,00		1.214.690.000,00		1.233.500.000,00		1.256.500.000,00		1.280.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematis)	%	100	100	221.370.000,00	100	224.690.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	%	100	100		100		100		100		100	
	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%		90	668.140.000,00	90	700.000.000,00	90	710.000.000,00	90	720.000.000,00	90	730.000.000,00
	PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Indeks	2,43	2,54	287.590.000,00	2,66	290.000.000,00	2,77	293.500.000,00	2,89	296.500.000,00	3	300.000.000,00
19	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG STATISTIK					60.000.000,00		60.900.000,00		61.810.000,00		62.740.000,00		63.680.000,00
	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,11	2,65	60.000.000,00	2,9	60.900.000,00	3,15	61.810.000,00	3,4	62.740.000,00	3,65	63.680.000,00
20	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERSANDIAN					27.250.000,00		27.650.000,00		28.070.000,00		28.490.000,00		28.920.000,00
	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Nilai	2	2	27.250.000,00	2	27.650.000,00	2	28.070.000,00	3	28.490.000,00	3	28.920.000,00
21	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					848.000.000,00		870.200.000,00		904.950.000,00		930.580.000,00		951.280.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematis)	%	100	100	213.400.000,00	100	216.600.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	%	100	100		100		100		100		100	
	PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%		5	500.000,00	5	10.000.000,00	5	10.150.000,00	5	10.300.000,00	5	10.460.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-17

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	31,25	31,25	80.790.000,00	36,27	82.000.000,00	41,29	83.230.000,00	46,31	84.480.000,00	51,33	85.750.000,00
	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	40,62	59,38	67.270.000,00	68,75	68.280.000,00	79,69	69.310.000,00	90,63	70.350.000,00	100,00	71.400.000,00
	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	36,08	46,88	95.540.000,00	56,88	96.970.000,00	66,88	98.420.000,00	76,88	99.900.000,00	86,88	101.400.000,00
	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	3,13	39,06	47.500.000,00	45,07	48.210.000,00	60,08	48.940.000,00	75,09	49.670.000,00	90,1	50.410.000,00
	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%		5	280.000.000,00	5	284.200.000,00	5	300.000.000,00	5	310.000.000,00	5	315.000.000,00
			2.Pertumbuhan Wirausaha	Rasio	0,006	0,010		0,012		0,014		0,016		0,018	
	PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor	%			60.000.000,00		60.900.000,00		61.810.000,00		62.740.000,00		63.680.000,00
	PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	40,21	41,24	3.000.000,00	42,27	3.040.000,00	43,3	3.090.000,00	44,33	3.140.000,00	45,36	3.180.000,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						874.400.000,00		887.510.000,00		922.110.000,00		960.730.000,00		999.420.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100,00	100,00	224.400.000,00	100,00	227.770.000,00	100,00	230.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	80	100	415.000.000,00	100	421.220.000,00	100	450.000.000,00	100	475.000.000,00	100	500.000.000,00
	PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	-	2	90.000.000,00	2	91.350.000,00	3	92.720.000,00	3	94.110.000,00	4	95.520.000,00
	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	85.000.000,00	100	86.270.000,00	100	87.570.000,00	100	88.880.000,00	100	90.220.000,00
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	57.500.000,00	100	58.360.000,00	100	59.240.000,00	100	60.130.000,00	100	61.030.000,00
	PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	2.500.000,00	100	2.540.000,00	100	2.580.000,00	100	2.610.000,00	100	2.650.000,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3.397.410.000,00		3.461.970.000,00		3.574.000.000,00		3.657.510.000,00		3.741.070.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	228.230.000,00	100	231.650.000,00	100	240.000.000,00	100	245.000.000,00	100	250.000.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-18

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	0,001	0,002	886.490.000,00	0,003	899.780.000,00	0,004	950.000.000,00	0,005	975.000.000,00	0,006	1.000.000.000,00
	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda	Jumlah	-	2	2.055.550.000,00	4	2.100.000.000,00	6	2.150.000.000,00	8	2.200.000.000,00	10	2.250.000.000,00
			Jumlah Pelatih yang bersertifikat pada satuan pendidikan jalur formal , non formal dan informal	Jumlah	201	203		204		205		206		207	
			Jumlah Wasit yang bersertifikat pada satuan pendidikan jalur formal , non formal dan informal	Jumlah	1	2		3		4		5		6	
	PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Partisipasi Pemuda Pelajar dalam Kegiatan Kepramukaan	%	25	27	227.140.000,00	29	230.540.000,00	31	234.000.000,00	33	237.510.000,00	35	241.070.000,00
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.011.020.000,00		1.029.320.000,00		1.051.450.000,00		1.073.780.000,00		1.096.280.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	213.670.000,00	100	220.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	74,81	76,00	772.510.000,00	77,00	784.100.000,00	78,00	795.860.000,00	79,00	807.800.000,00	80,00	819.910.000,00
	PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%		0,05	24.840.000,00	0,07	25.220.000,00	0,10	25.590.000,00	0,12	25.980.000,00	0,15	26.370.000,00
	AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Perpustakaan	%	-	0,20		0,30		0,40		0,50		0,60	
	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					147.180.000,00		149.390.000,00		151.630.000,00		153.910.000,00		156.210.000,00
	PENGLOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	75,94	76,94	137.180.000,00	77,44	139.240.000,00	77,94	141.330.000,00	78,44	143.450.000,00	78,94	145.600.000,00
	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	39,00	40,00	10.000.000,00	40,00	10.150.000,00	60,00	10.300.000,00	60,00	10.460.000,00	80,00	10.610.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-19

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
	PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%		2	3		4		5		6	
	AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	%	-	25	25		37,5		37,5		37,5	
26	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.075.780.000,00	1.117.670.000,00		1.365.380.000,00		1.430.760.000,00		1.471.140.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	100	230.790.000,00	100	240.000.000,00	100	245.000.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	%	100	100	100		100		100		100	
	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan Produksi Nelayan	%	-7,64	1,00	1,00	300.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	450.000.000,00	1,00	475.000.000,00
	PENGLOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Pertumbuhan Produksi Pembudidaya Perikanan	%	4,00	4,00	4,00	544.990.000,00	4,00	712.880.000,00	4,00	720.760.000,00	4,00	728.640.000,00
	PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman hayati	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diawasi	%		50	100	10.000.000,00	100	12.500.000,00	100	15.000.000,00	100	17.500.000,00
27	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PARIWISATA				1.587.600.286,00	1.607.920.000,00		2.002.660.000,00		2.110.920.000,00		2.168.340.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	100	237.670.000,00	100	243.600.000,00	100	247.250.000,00	100	250.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi	%	100	100	100		100		100		100	
	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%		5	5	399.940.742,00	5	650.000.000,00	5	700.000.000,00	5	725.000.000,00
	PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%		45,00	55,00	224.999.710,00	65,00	227.260.000,00	75,00	228.390.000,00	85,00	229.530.000,00
	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%		0,1	0,2	499.990.105,00	0,3	650.000.000,00	0,4	700.000.000,00	0,5	725.000.000,00
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%		62,00	65,00	224.999.729,00	68,00	231.800.000,00	71,00	235.280.000,00	74,00	238.810.000,00
28	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERTANIAN				6.195.190.000,00	5.254.090.000,00		9.349.850.000,00		10.136.590.000,00		10.720.480.000,00	
	PERTANIAN					3.937.000.000,00	2.962.020.000,00		4.382.460.000,00		4.903.200.000,00		5.120.830.000,00	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-20

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	300.000.000,00	100	304.500.000,00	100	309.070.000,00	100	313.710.000,00	100	315.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%		5,00	1.293.050.000,00	5,00	800.000.000,00	5,00	1.500.000.000,00	5,00	1.750.000.000,00	5,00	1.850.000.000,00
			2. Peningkatan Produksi Hortikultura	%		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	0,00
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	-	50,50	1.302.050.000,00	51,00	800.000.000,00	51,50	1.500.000.000,00	52,00	1.750.000.000,00	52,50	1.850.000.000,00
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%		100	101.600.000,00	100	103.120.000,00	100	104.670.000,00	100	106.240.000,00	100	107.830.000,00
			2.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%		100		100		100		100		100	0,00
PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%		100	940.300.000,00	100	954.400.000,00	100	968.720.000,00	100	983.250.000,00	100	998.000.000,00	
PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya perizinan Usaha Pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%		100		100		100		100		100		
	PETERNAKAN						2.258.190.000,00		2.292.070.000,00		4.967.390.000,00		5.233.400.000,00		5.599.650.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	308.070.000,00	100	312.700.000,00	100	317.390.000,00	100	322.150.000,00	100	326.980.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Komoditas Peternakan (Sapi, Kambing dan Babi)	Ekor	351.031	366.646	494.620.000,00	374.713	502.040.000,00	382.956	3.000.000.000,00	391.381	3.200.000.000,00	399.992	3.500.000.000,00
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Area Hijauan Pakan Ternak	Ha	1.465	1.773	585.000.000,00	1.950	593.770.000,00	2.145	750.000.000,00	2.359	761.250.000,00	2.595	772.670.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-21

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	15,00	14,00	870.500.000,00	13,00	883.560.000,00	12,00	900.000.000,00	11,00	950.000.000,00	10,00	1.000.000.000,00
			2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	2,00	2,00		3,00		3,00		3,00		4,00	
29	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERDAGANGAN					780.900.000,00		817.600.000,00		1.687.610.000,00		2.203.410.000,00		2.246.820.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	371.400.000,00	100	376.970.000,00	100	382.630.000,00	100	388.370.000,00	100	394.190.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	33,01	42,72	7.500.000,00	47,57	7.610.000,00	52,43	10.000.000,00	57,28	12.500.000,00	62,14	15.000.000,00
	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0	4,17	237.000.000,00	8,33	240.550.000,00	12,5	1.000.000.000,00	16,67	1.500.000.000,00	20,83	1.522.500.000,00
	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100	45.000.000,00	100	45.670.000,00	100	46.360.000,00	100	47.060.000,00	100	47.760.000,00
	PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Miliar	77	79	20.000.000,00	81	20.300.000,00	83	20.600.000,00	85	20.910.000,00	87	21.230.000,00
	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100	100	100.000.000,00	100	101.500.000,00	100	103.020.000,00	100	104.570.000,00	100	106.140.000,00
	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	-	3,00		5,00	25.000.000,00	5,00	125.000.000,00	6,00	130.000.000,00	7,00	140.000.000,00
30	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PERINDUSTRIAN					500.000.000,00		557.500.000,00		565.870.000,00		574.360.000,00		1.706.820.000,00
	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%		100		100	25.000.000,00	100	25.380.000,00	100	25.760.000,00	100	1.150.000.000,00
	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	100	100		100	25.000.000,00	100	25.380.000,00	100	25.760.000,00	100	26.140.000,00
	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Data	47	72	500.000.000,00	97	507.500.000,00	122	515.110.000,00	147	522.840.000,00	172	530.680.000,00
31	SEKRETARIAT DAERAH						24.040.300.000,00		22.332.890.000,00		22.580.070.000,00		22.822.860.000,00		23.056.900.000,00
	Bagian Umum						13.696.350.000,00		8.768.830.000,00		8.841.680.000,00		8.914.880.000,00		8.988.460.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-22

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	13.696.350.000,00	100	8.768.830.000,00	100	8.841.680.000,00	100	8.914.880.000,00	100	8.988.460.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	0,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						701.610.000,00		733.620.000,00		742.380.000,00		751.260.000,00		760.280.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	126.610.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPEJ	Level	3	3	575.000.000,00	3	583.620.000,00	3	592.380.000,00	3	601.260.000,00	3	610.280.000,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat						6.057.800.000,00		8.595.120.000,00		8.637.340.000,00		8.679.780.000,00		8.722.430.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	112.680.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%		100	5.945.120.000,00	100	8.445.120.000,00	100	8.487.340.000,00	100	8.529.780.000,00	100	8.572.430.000,00
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia						765.800.000,00		1.150.000.000,00		1.200.000.000,00		1.250.000.000,00		1.300.000.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-23

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	115.750.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%		100	650.050.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.150.000.000,00
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						917.000.000,00		1.000.000.000,00		1.015.000.000,00		1.030.230.000,00		1.045.680.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	917.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.015.000.000,00	100	1.030.230.000,00	100	1.045.680.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	Bagian Hukum						497.800.000,00		449.440.000,00		490.000.000,00		525.000.000,00		550.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	202.780.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (Perbup dan Perda)	Peraturan	73	60	295.020.000,00	60	299.440.000,00	60	340.000.000,00	60	375.000.000,00	60	400.000.000,00
	Bagian Pemerintahan						540.560.000,00		581.380.000,00		587.850.000,00		594.410.000,00		601.080.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-24

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	100	115.560.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otononi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	%		100	425.000.000,00	100	431.380.000,00	100	437.850.000,00	100	444.410.000,00	100	451.080.000,00
			2. Indeks LPPD	Indeks	2,6	2,74		2,81		2,88		2,95		3,02	
	Bagian Organisasi					428.800.000,00		600.000.000,00		606.750.000,00		613.600.000,00		620.560.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	378.750.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks					450.000.000,00		456.750.000,00		463.600.000,00		470.560.000,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						50.050.000,00							0,00	
	Bagian Administrasi Pembangunan					434.580.000,00		454.500.000,00		459.070.000,00		463.700.000,00		468.410.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	134.580.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-25

BIDANG URUSAN /PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan administari pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	80	85	300.000.000,00	86	304.500.000,00	87	309.070.000,00	88	313.700.000,00	90	318.410.000,00
32	SEKRETARIAT DPRD						10.653.800.000,00		11.013.610.000,00		11.178.820.000,00		11.346.490.000,00		11.516.690.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	3.164.290.000,00	100	3.211.750.000,00	100	3.259.930.000,00	100	3.308.820.000,00	100	3.358.460.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%		100	7.489.510.000,00	100	7.801.860.000,00	100	7.918.890.000,00	100	8.037.670.000,00	100	8.158.230.000,00
			2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%		100		100		100		100		100	
			3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		100		100		100		100		100	
33	PERENCANAAN						4.062.043.084,00		3.273.000.000,00		3.322.090.000,00		3.606.290.000,00		3.737.880.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	1.920.103.084,00	100	1.098.940.000,00	100	1.115.420.000,00	100	1.132.150.000,00	100	1.149.130.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	1.210.350.000,00	100	1.228.500.000,00	100	1.246.930.000,00	100	1.500.000.000,00	100	1.600.000.000,00
			2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100		100		100		100		100	
			3. Persentase Capaian Program Perangkat Daerah 90s	%	100	100		100		100		100		100	
	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	931.590.000,00	100	945.560.000,00	100	959.740.000,00	100	974.140.000,00	100	988.750.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-26

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100		100		100		100	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100		100		100		100	
34	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					657.920.000,00		867.790.000,00		880.800.000,00		894.020.000,00		907.430.000,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan dan penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	100	100	681.440.000,00	100	691.660.000,00	100	702.040.000,00	100	712.570.000,00
			Persentase Bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100	100	100		100		100		100	
	RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	100	100	100	134.330.000,00	100	186.350.000,00	100	189.140.000,00	100	194.860.000,00
35	KEUANGAN					18.645.400.000,00		19.727.430.000,00	-	19.971.120.000,00	-	20.085.640.000,00	-	20.250.500.000,00
	(Sub Sektor) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					16.750.000.000,00		17.803.600.000,00		17.862.460.000,00		17.921.600.000,00		17.981.000.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	100	11.087.320.000,00	100	11.109.490.000,00	100	11.131.710.000,00	100	11.176.280.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100	100		100		100		100	#VALUE!
	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%		5.350.700.000,00		6.377.450.000,00		6.409.340.000,00		6.441.390.000,00		6.473.590.000,00
			2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%										
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%		100	100		100		100		100	
			2. Persentase Penurunan SILPA	%	-37,41	76,69	100		100		100		100	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-27

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100	
	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Data Aset Daerah/BMD yang akurat sesuai pemanfaatan dan peruntukan	%	- 1,58	- 1,56	311.980.000,00	- 1,55	316.660.000,00	- 1,54	321.410.000,00	- 1,53	326.240.000,00	- 1,52	331.130.000,00
	(Sub Sektor) BADAN PENDAPATAN DAERAH						1.895.400.000,00		1.923.830.000,00		2.108.660.000,00		2.164.040.000,00		2.269.500.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	348.140.000,00	100	353.360.000,00	100	358.660.000,00	100	364.040.000,00	100	369.500.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	4,29	5,64	1.547.260.000,00	5,79	1.570.470.000,00	5,94	1.750.000.000,00	6,09	1.800.000.000,00	6,24	1.900.000.000,00
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%		100		100		100		100		100	
							2.019.290.000,00		2.032.760.000,00		2.046.340.000,00		2.060.050.000,00		2.073.870.000,00
36	KEPEGAWAIAN						2.019.290.000,00		2.032.760.000,00		2.046.340.000,00		2.060.050.000,00		2.073.870.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	337.000.000,00	100	342.060.000,00	100	347.190.000,00	100	352.400.000,00	100	357.680.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%		100	1.682.290.000,00	100	1.690.700.000,00	100	1.699.150.000,00	100	1.707.650.000,00	100	1.716.190.000,00
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	11,67	11,87		12,11		12,25		12,67		12,87	



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-28

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	85,00	86		87		88		89		90	
37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						817.710.000,00		829.970.000,00		1.250.000.000,00		1.268.750.000,00		1.287.780.000,00
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar,kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%		10	817.710.000,00	10	829.970.000,00	10	1.250.000.000,00	10	1.268.750.000,00	10	1.287.780.000,00
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan,perancangan,pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%		100		100		100		100		100	
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%		70		70		70		70		70	
38	PENGELOLAAN PERBATASAN						818.400.000,00		841.340.000,00		853.960.000,00		866.770.000,00		879.770.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	360.920.000,00	100	366.340.000,00	100	371.830.000,00	100	377.410.000,00	100	383.070.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENGLOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks	0,51	0,52	457.480.000,00	0,53	475.000.000,00	0,54	482.130.000,00	0,54	489.360.000,00	0,55	496.700.000,00
39	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						1.622.000.000,00		1.646.330.000,00		1.725.760.000,00		1.751.650.000,00		1.777.920.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	580.370.000,00	100	589.080.000,00	100	597.920.000,00	100	606.890.000,00	100	615.990.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100	100	997.690.000,00	100	1.012.650.000,00	100	1.027.840.000,00	100	1.043.260.000,00	100	1.058.910.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-29

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027		2028		2029		2030		
						PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	PERUMUSAN KEBLAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,4	2,5	43.940.000,00	2,6	44.600.000,00	2,7	100.000.000,00	2,9	101.500.000,00	3	103.020.000,00
			2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3		3		3		3		3	
40	KECAMATAN						12.035.600.000,00		12.180.560.000,00	-	12.327.600.000,00	-	12.476.930.000,00	-	12.628.150.000,00
	Kecamatan Kota Kefamenanu						3.632.000.000,00		3.650.870.000,00		3.670.090.000,00		3.689.440.000,00		3.708.890.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	594.940.000,00	100	597.910.000,00	100	600.900.000,00	100	603.910.000,00	100	606.930.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	32.200.000,00	90	32.360.000,00	90	32.520.000,00	90	32.690.000,00	90	32.850.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	2.868.040.000,00	100	2.882.380.000,00	100	2.896.790.000,00	100	2.911.280.000,00	100	2.925.840.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	41.190.000,00	100	41.400.000,00	100	41.600.000,00	100	41.810.000,00	100	42.020.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	24.140.000,00	100	24.260.000,00	100	24.630.000,00	100	24.990.000,00	100	25.370.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	Desa	100	100	71.490.000,00	100	72.560.000,00	100	73.650.000,00	100	74.760.000,00	100	75.880.000,00
	Kecamatan Miomaffo Timur						398.310.000,00		404.270.000,00		410.330.000,00		416.500.000,00		422.740.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	207.110.000,00	100	210.210.000,00	100	213.360.000,00	100	216.570.000,00	100	219.810.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-30

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	11.500.000,00	90	11.670.000,00	90	11.850.000,00	90	12.030.000,00	90	12.210.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	53.430.000,00	100	54.230.000,00	100	55.040.000,00	100	55.870.000,00	100	56.710.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	16.000.000,00	100	16.240.000,00	100	16.480.000,00	100	16.730.000,00	100	16.980.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	64.470.000,00	100	65.430.000,00	100	66.410.000,00	100	67.410.000,00	100	68.420.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	45.800.000,00	100	46.490.000,00	100	47.190.000,00	100	47.890.000,00	100	48.610.000,00
Kecamatan Noemuti						358.000.000,00		363.370.000,00		368.820.000,00		374.350.000,00		379.960.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	150.580.000,00	100	152.840.000,00	100	155.130.000,00	100	157.460.000,00	100	159.820.000,00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	72.600.000,00	90	73.690.000,00	90	74.790.000,00	90	75.920.000,00	90	77.050.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	15.400.000,00	100	15.630.000,00	100	15.870.000,00	100	16.100.000,00	100	16.340.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	11.830.000,00	100	12.010.000,00	100	12.190.000,00	100	12.370.000,00	100	12.560.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-31

BIDANG URUSAN /PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	46.090.000,00	100	46.780.000,00	100	47.480.000,00	100	48.190.000,00	100	48.920.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	61.500.000,00	100	62.420.000,00	100	63.360.000,00	100	64.310.000,00	100	65.270.000,00
	Kecamatan Miomaffo Barat						368.750.000,00		374.280.000,00		379.900.000,00		385.600.000,00		391.370.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	218.750.000,00	100	222.030.000,00	100	225.360.000,00	100	228.740.000,00	100	232.170.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	40.000.000,00	90	40.600.000,00	90	41.210.000,00	90	41.830.000,00	90	42.450.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	26.000.000,00	100	26.390.000,00	100	26.790.000,00	100	27.190.000,00	100	27.600.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00	100	10.610.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	44.000.000,00	100	44.660.000,00	100	45.330.000,00	100	46.010.000,00	100	46.700.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	30.000.000,00	100	30.450.000,00	100	30.910.000,00	100	31.370.000,00	100	31.840.000,00
	Kecamatan Insana						670.000.000,00		680.050.000,00		690.250.000,00		700.610.000,00		711.110.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	288.500.000,00	100	292.830.000,00	100	297.220.000,00	100	301.680.000,00	100	306.200.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-32

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100	100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	52.250.000,00	90	53.030.000,00	90	53.830.000,00	90	54.640.000,00	90	55.460.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	218.750.000,00	100	222.030.000,00	100	225.360.000,00	100	228.740.000,00	100	232.170.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00	100	10.610.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	49.500.000,00	100	50.240.000,00	100	51.000.000,00	100	51.760.000,00	100	52.540.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	51.000.000,00	100	51.770.000,00	100	52.540.000,00	100	53.330.000,00	100	54.130.000,00
Kecamatan Insana Utara						348.300.000,00		353.520.000,00		358.820.000,00		364.200.000,00		369.680.000,00
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	211.100.000,00	100	214.270.000,00	100	217.480.000,00	100	220.750.000,00	100	224.060.000,00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	18.500.000,00	90	18.770.000,00	90	19.060.000,00	90	19.340.000,00	90	19.630.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	41.000.000,00	100	41.610.000,00	100	42.240.000,00	100	42.870.000,00	100	43.520.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	6.000.000,00	100	6.090.000,00	100	6.180.000,00	100	6.270.000,00	100	6.370.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-33

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	40.500.000,00	100	41.110.000,00	100	41.720.000,00	100	42.350.000,00	100	42.990.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	31.200.000,00	100	31.670.000,00	100	32.140.000,00	100	32.620.000,00	100	33.110.000,00
	Kecamatan Biboki Selatan						343.000.000,00		348.150.000,00		353.360.000,00		358.670.000,00		364.040.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	222.000.000,00	100	225.330.000,00	100	228.710.000,00	100	232.140.000,00	100	235.620.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	45.000.000,00	90	45.680.000,00	90	46.360.000,00	90	47.060.000,00	90	47.760.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100	0,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	8.000.000,00	100	8.120.000,00	100	8.240.000,00	100	8.370.000,00	100	8.490.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	42.500.000,00	100	43.140.000,00	100	43.780.000,00	100	44.440.000,00	100	45.110.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	25.500.000,00	100	25.880.000,00	100	26.270.000,00	100	26.660.000,00	100	27.060.000,00
	Kecamatan Biboki Utara						617.150.000,00		626.410.000,00		635.810.000,00		645.340.000,00		655.020.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	263.370.000,00	100	267.320.000,00	100	271.330.000,00	100	275.400.000,00	100	279.530.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-34

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	37.030.000,00	90	37.580.000,00	90	38.150.000,00	90	38.720.000,00	90	39.300.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	210.000.000,00	100	213.150.000,00	100	216.350.000,00	100	219.590.000,00	100	222.890.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	15.000.000,00	100	15.230.000,00	100	15.450.000,00	100	15.690.000,00	100	15.920.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	43.190.000,00	100	43.840.000,00	100	44.500.000,00	100	45.160.000,00	100	45.840.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	48.560.000,00	100	49.290.000,00	100	50.030.000,00	100	50.780.000,00	100	51.540.000,00
	Kecamatan Biboki Anleu					376.300.000,00		381.930.000,00		387.670.000,00		393.490.000,00		399.400.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	226.490.000,00	100	229.880.000,00	100	233.330.000,00	100	236.830.000,00	100	240.390.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	84.260.000,00	90	85.520.000,00	90	86.810.000,00	90	88.110.000,00	90	89.430.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	14.450.000,00	100	14.660.000,00	100	14.880.000,00	100	15.110.000,00	100	15.330.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	2.380.000,00	100	2.420.000,00	100	2.450.000,00	100	2.490.000,00	100	2.530.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-35

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	26.000.000,00	100	26.390.000,00	100	26.790.000,00	100	27.190.000,00	100	27.600.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	22.720.000,00	100	23.060.000,00	100	23.410.000,00	100	23.760.000,00	100	24.120.000,00
	Kecamatan Bikomi Utara						322.400.000,00		327.250.000,00		332.130.000,00		337.120.000,00		342.170.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	157.230.000,00	100	159.590.000,00	100	161.980.000,00	100	164.410.000,00	100	166.880.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	40.140.000,00	90	40.740.000,00	90	41.350.000,00	90	41.970.000,00	90	42.600.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	29.860.000,00	100	30.310.000,00	100	30.760.000,00	100	31.220.000,00	100	31.690.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00	100	10.610.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	30.170.000,00	100	30.630.000,00	100	31.080.000,00	100	31.550.000,00	100	32.020.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	55.000.000,00	100	55.830.000,00	100	56.660.000,00	100	57.510.000,00	100	58.370.000,00
	Kecamatan Bikomi Selatan						320.500.000,00		325.300.000,00		330.170.000,00		335.150.000,00		340.170.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	178.780.000,00	100	181.460.000,00	100	184.180.000,00	100	186.950.000,00	100	189.750.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-36

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	50.000.000,00	90	50.750.000,00	90	51.510.000,00	90	52.280.000,00	90	53.070.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00	100	10.610.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	12.000.000,00	100	12.180.000,00	100	12.360.000,00	100	12.550.000,00	100	12.740.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	28.220.000,00	100	28.640.000,00	100	29.070.000,00	100	29.510.000,00	100	29.950.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	41.500.000,00	100	42.120.000,00	100	42.750.000,00	100	43.400.000,00	100	44.050.000,00
	Kecamatan Bikomi Nilulat					325.000.000,00		329.880.000,00		334.830.000,00		339.840.000,00		344.950.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	186.550.000,00	100	189.350.000,00	100	192.190.000,00	100	195.070.000,00	100	198.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	26.000.000,00	90	26.390.000,00	90	26.790.000,00	90	27.190.000,00	90	27.600.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	25.000.000,00	100	25.380.000,00	100	25.760.000,00	100	26.140.000,00	100	26.530.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	7.500.000,00	100	7.610.000,00	100	7.730.000,00	100	7.840.000,00	100	7.960.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-37

BIDANG URUSAN /PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	46.700.000,00	100	47.400.000,00	100	48.110.000,00	100	48.830.000,00	100	49.570.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	33.250.000,00	100	33.750.000,00	100	34.250.000,00	100	34.770.000,00	100	35.290.000,00
	Kecamatan Bikomi Tengah						328.000.000,00		332.930.000,00		337.910.000,00		342.990.000,00		348.130.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	219.120.000,00	100	222.410.000,00	100	225.740.000,00	100	229.130.000,00	100	232.570.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	27.080.000,00	90	27.490.000,00	90	27.900.000,00	90	28.320.000,00	90	28.740.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	15.000.000,00	100	15.230.000,00	100	15.450.000,00	100	15.690.000,00	100	15.920.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	7.500.000,00	100	7.610.000,00	100	7.730.000,00	100	7.840.000,00	100	7.960.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	23.800.000,00	100	24.160.000,00	100	24.520.000,00	100	24.890.000,00	100	25.260.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	35.500.000,00	100	36.030.000,00	100	36.570.000,00	100	37.120.000,00	100	37.680.000,00
	Kecamatan Naibenu						312.000.000,00		316.690.000,00		321.430.000,00		326.250.000,00		331.150.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	176.500.000,00	100	179.150.000,00	100	181.830.000,00	100	184.560.000,00	100	187.330.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-38

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100	100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	34.000.000,00	90	34.510.000,00	90	35.030.000,00	90	35.550.000,00	90	36.090.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	19.000.000,00	100	19.290.000,00	100	19.570.000,00	100	19.870.000,00	100	20.170.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	7.500.000,00	100	7.610.000,00	100	7.730.000,00	100	7.840.000,00	100	7.960.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	38.000.000,00	100	38.570.000,00	100	39.150.000,00	100	39.740.000,00	100	40.330.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	37.000.000,00	100	37.560.000,00	100	38.120.000,00	100	38.690.000,00	100	39.270.000,00
Kecamatan Miomaffo Tengah						323.000.000,00		327.840.000,00		332.750.000,00		337.740.000,00		342.830.000,00
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	201.240.000,00	100	204.260.000,00	100	207.320.000,00	100	210.430.000,00	100	213.590.000,00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	16.270.000,00	90	16.510.000,00	90	16.760.000,00	90	17.010.000,00	90	17.270.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	10.710.000,00	100	10.870.000,00	100	11.030.000,00	100	11.200.000,00	100	11.370.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	4.250.000,00	100	4.310.000,00	100	4.380.000,00	100	4.440.000,00	100	4.510.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-39

BIDANG URUSAN /PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	48.030.000,00	100	48.750.000,00	100	49.480.000,00	100	50.220.000,00	100	50.980.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	42.500.000,00	100	43.140.000,00	100	43.780.000,00	100	44.440.000,00	100	45.110.000,00
	Kecamatan Musi						305.000.000,00		309.560.000,00		314.210.000,00		318.940.000,00		323.720.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	193.250.000,00	100	196.150.000,00	100	199.090.000,00	100	202.080.000,00	100	205.110.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	19.000.000,00	90	19.280.000,00	90	19.570.000,00	90	19.870.000,00	90	20.170.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	14.000.000,00	100	14.210.000,00	100	14.420.000,00	100	14.640.000,00	100	14.860.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	7.000.000,00	100	7.100.000,00	100	7.210.000,00	100	7.320.000,00	100	7.430.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	30.200.000,00	100	30.650.000,00	100	31.110.000,00	100	31.580.000,00	100	32.050.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	41.550.000,00	100	42.170.000,00	100	42.810.000,00	100	43.450.000,00	100	44.100.000,00
	Kecamatan Mutis						341.000.000,00		346.120.000,00		351.320.000,00		356.580.000,00		361.910.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	214.500.000,00	100	217.720.000,00	100	220.980.000,00	100	224.300.000,00	100	227.660.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-40

BIDANG URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026 TARGET	PAGU	2027 TARGET	PAGU	2028 TARGET	PAGU	2029 TARGET	PAGU	2030 TARGET	PAGU
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100	100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	24.000.000,00	90	24.360.000,00	90	24.730.000,00	90	25.100.000,00	90	25.470.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	25.000.000,00	100	25.380.000,00	100	25.760.000,00	100	26.140.000,00	100	26.530.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	9.500.000,00	100	9.640.000,00	100	9.790.000,00	100	9.930.000,00	100	10.080.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	38.000.000,00	100	38.570.000,00	100	39.150.000,00	100	39.740.000,00	100	40.330.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	30.000.000,00	100	30.450.000,00	100	30.910.000,00	100	31.370.000,00	100	31.840.000,00
Kecamatan Noemuti Timur						320.410.000,00		325.220.000,00		330.070.000,00		335.040.000,00		340.070.000,00
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	175.150.000,00	100	177.780.000,00	100	180.440.000,00	100	183.150.000,00	100	185.900.000,00
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	42.010.000,00	90	42.640.000,00	90	43.280.000,00	90	43.930.000,00	90	44.590.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	18.700.000,00	100	18.980.000,00	100	19.260.000,00	100	19.550.000,00	100	19.850.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	8.750.000,00	100	8.880.000,00	100	9.010.000,00	100	9.150.000,00	100	9.280.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-41

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	29.990.000,00	100	30.440.000,00	100	30.890.000,00	100	31.360.000,00	100	31.830.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	45.810.000,00	100	46.500.000,00	100	47.190.000,00	100	47.900.000,00	100	48.620.000,00
	Kecamatan Insana Barat						346.000.000,00		351.200.000,00		356.450.000,00		361.810.000,00		367.220.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	206.530.000,00	100	209.630.000,00	100	212.770.000,00	100	215.960.000,00	100	219.200.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	22.500.000,00	90	22.840.000,00	90	23.180.000,00	90	23.530.000,00	90	23.880.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	18.000.000,00	100	18.270.000,00	100	18.540.000,00	100	18.820.000,00	100	19.100.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	8.000.000,00	100	8.120.000,00	100	8.240.000,00	100	8.370.000,00	100	8.490.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	53.970.000,00	100	54.780.000,00	100	55.600.000,00	100	56.440.000,00	100	57.280.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	37.000.000,00	100	37.560.000,00	100	38.120.000,00	100	38.690.000,00	100	39.270.000,00
	Kecamatan Insana Tengah						340.300.000,00		345.420.000,00		350.590.000,00		355.860.000,00		361.190.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	233.930.000,00	100	237.440.000,00	100	241.000.000,00	100	244.620.000,00	100	248.290.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-42

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	20.500.000,00	90	20.810.000,00	90	21.120.000,00	90	21.440.000,00	90	21.760.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	23.000.000,00	100	23.350.000,00	100	23.700.000,00	100	24.050.000,00	100	24.410.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	10.000.000,00	100	10.150.000,00	100	10.300.000,00	100	10.460.000,00	100	10.610.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	32.370.000,00	100	32.860.000,00	100	33.350.000,00	100	33.850.000,00	100	34.360.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	20.500.000,00	100	20.810.000,00	100	21.120.000,00	100	21.440.000,00	100	21.760.000,00
	Kecamatan Insana Fafinesu						311.000.000,00		315.660.000,00		320.390.000,00		325.200.000,00		330.080.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	192.000.000,00	100	194.880.000,00	100	197.800.000,00	100	200.770.000,00	100	203.780.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	20.000.000,00	90	20.300.000,00	90	20.600.000,00	90	20.910.000,00	90	21.230.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	20.000.000,00	100	20.300.000,00	100	20.600.000,00	100	20.910.000,00	100	21.230.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	9.500.000,00	100	9.640.000,00	100	9.790.000,00	100	9.930.000,00	100	10.080.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-43

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	38.000.000,00	100	38.570.000,00	100	39.150.000,00	100	39.740.000,00	100	40.330.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	31.500.000,00	100	31.970.000,00	100	32.450.000,00	100	32.940.000,00	100	33.430.000,00
	Kecamatan Biboki Moenleu						345.980.000,00		351.200.000,00		356.460.000,00		361.800.000,00		367.230.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	201.780.000,00	100	204.810.000,00	100	207.880.000,00	100	211.000.000,00	100	214.170.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	25.580.000,00	90	25.970.000,00	90	26.360.000,00	90	26.750.000,00	90	27.150.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	20.080.000,00	100	20.390.000,00	100	20.690.000,00	100	21.000.000,00	100	21.320.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	13.090.000,00	100	13.290.000,00	100	13.490.000,00	100	13.690.000,00	100	13.890.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	39.190.000,00	100	39.780.000,00	100	40.380.000,00	100	40.990.000,00	100	41.600.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	46.260.000,00	100	46.960.000,00	100	47.660.000,00	100	48.370.000,00	100	49.100.000,00
	Kecamatan Biboki Tanpah						328.300.000,00		333.220.000,00		338.220.000,00		343.300.000,00		348.440.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	217.160.000,00	100	220.410.000,00	100	223.720.000,00	100	227.080.000,00	100	230.480.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-44

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	23.490.000,00	90	23.850.000,00	90	24.200.000,00	90	24.570.000,00	90	24.930.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	14.000.000,00	100	14.210.000,00	100	14.420.000,00	100	14.640.000,00	100	14.860.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	6.000.000,00	100	6.090.000,00	100	6.180.000,00	100	6.270.000,00	100	6.370.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	29.650.000,00	100	30.090.000,00	100	30.550.000,00	100	31.000.000,00	100	31.470.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	38.000.000,00	100	38.570.000,00	100	39.150.000,00	100	39.740.000,00	100	40.330.000,00
	Kecamatan Biboki Feotleu						354.900.000,00		360.220.000,00		365.620.000,00		371.110.000,00		376.680.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	237.260.000,00	100	240.820.000,00	100	244.430.000,00	100	248.100.000,00	100	251.820.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	#VALUE!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90	90	23.200.000,00	90	23.550.000,00	90	23.900.000,00	90	24.260.000,00	90	24.620.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang melakukan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	15.100.000,00	1	15.330.000,00	1	15.560.000,00	1	15.790.000,00	1	16.030.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibumlinmas yang ditangani	%	100	100	7.500.000,00	1	7.610.000,00	1	7.730.000,00	1	7.840.000,00	1	7.960.000,00



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-45

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026 TARGET	2027 PAGU		2028 PAGU		2029 PAGU		2030 PAGU		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Data Kecamatan yang tersedia (Mengacu kepada data profil kecamatan)	%	100	100	28.340.000,00	1	28.760.000,00	1	29.190.000,00	1	29.630.000,00	1	30.080.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes, APBDes dan Pertanggungjawaban tepat waktu	%	100	100	43.500.000,00	1	44.150.000,00	1	44.810.000,00	1	45.490.000,00	1	46.170.000,00
41	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.431.390.000,00		2.467.860.000,00		2.504.870.000,00		2.538.190.000,00		2.573.780.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dok. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang ditetapkan sesuai ketentuan (Tepat Waktu dan Sesuai Sistematika)	%	100	100	289.060.000,00	100	293.390.000,00	100	297.790.000,00	100	298.000.000,00	100	300.000.000,00
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Perangkat Daerah Lainnya	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi (Selain bagian Perencanaan, Penganggaran, Kepegawaian, Pendapatan dan Data Informasi PD)	%	100	100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	639.380.000,00	100	648.970.000,00	100	658.710.000,00	100	668.590.000,00	100	678.620.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	784.190.000,00	100	795.960.000,00	100	807.900.000,00	100	820.010.000,00	100	832.310.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	15.040.000,00	100	15.270.000,00	100	15.490.000,00	100	15.730.000,00	100	15.960.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	17.390.000,00	100	17.650.000,00	100	17.910.000,00	100	18.180.000,00	100	18.450.000,00



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-46

BIDANG URUSAN / PROGRAM		OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
						2026	2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	686.330.000,00	100	696.620.000,00	100	707.070.000,00	100	717.680.000,00	100	728.440.000,00
ANGGARAN POKIR							5.300.000.000,00		5.406.000.000,00		5.514.120.000,00		5.624.400.000,00		5.736.890.000,00
TAMBAHAN ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS									12.299.987.154,73		19.946.056.837,27		19.946.863.981,08		12.447.797.517,22
TOTAL BELANJA							1.299.884.047 .667,14		1.326.101.162 .428,73		1.354.326.682 .111,27		1.368.039.626 .755,08		1.373.837 .619.703,72

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-47

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

4.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA								
NO	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET
(1)	(2)	(3)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,27	3,35	3,42	3,64	4,00	4,50	5,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,27	67,48	67,69	68,15	68,61	69,08	70,00
3	Tingkat Kemiskinan	20,89	20,29	19,68	19,20	18,71	18,23	17,27
4	Tingkat kemiskinan Ekstrim (Desil 1)	2,28	2,08	1,88	1,68	1,48	1,28	1,08
5	Indeks Reformasi Birokrasi	60,16	61,41	62,66	63,91	65,16	66,41	67,66
6	Indeks Risiko Bencana	130,92	127,00	125,00	110,00	100,00	95,00	90,00
7	Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,42	3,49	3,55	3,62	3,68	3,77
8	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	1,75	2,69	2,71	2,76	2,81	2,86	2,91
9	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,74	8,14	8,54	8,94	9,34	9,74	10,14
10	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)	5,70	5,75	5,80	5,85	5,90	5,95	6,00
11	Rasio Gini	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,32	77,82	77,99	78,17	78,34	78,51	79,68
13	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	3,755	3,764	3,769	3,775	3,782	3,789	3,803

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025

4.2.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Daerah

INDIKATOR KINERJA DAERAH									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	Ketahanan Energi, Air dan Pangan								
1	Rasio elektrifikasi	%	96,91	96,93	96,95	96,97	96,99	97,01	97,03
2	Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	%	92,51	92,71	93,01	93,3	93,59	93,88	94,17
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,61	73,81	74,45	75,6	77,54	78,11	80
	Lingkungan Hidup Berkualitas								
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,32	77,82	77,99	78,17	78,34	78,51	79,68
5	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	80,84	81,12	81,40	81,70	82,00	82,30	82,60
6	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	29,78	30,98	32,18	33,38	34,58	35,78	36,98



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-48

INDIKATOR KINERJA DAERAH									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim								
7	Persentase Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	%	-	-	60	55	50	45	40
8	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	130,92	127	125	110	100	95	90
9	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,35	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48
	Demografi								
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,57	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Kesejahteraan Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	3,27	3,35	3,42	3,64	4	4,5	5,5
2	Persentase Kemiskinan (%)	%	20,89	20,29	19,68	19,20	18,71	18,23	17,27
3	Kemiskinan Ekstrem	%	2,28	2,08	1,88	1,68	1,48	1,28	1,08
4	PDRB Per Kapita	(Juta)	18,72	18,85	18,97	19,35	19,74	20,53	21
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,82	1,8	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75
6	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,315	0,315	0,314	0,313	0,312	0,310
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,27	67,48	67,69	68,15	68,61	69,08	70,00
8	Pertumbuhan PAD	%	-5,05	2	2,56	3,19	5,84	5,85	5,87
	Kesehatan Untuk Semua								
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,02	71,52	72,02	72,42	72,82	73,22	73,62
10	Indeks keluarga Sehat	Indeks	0,096	0,096	0,096	0,097	0,097	0,098	0,098
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	47,30	44,00	41,20	38,50	36,00	33,70	31,50
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
	Pendidikan Berkualitas dan Merata								
13	Indeks Pendidikan	Indeks	10,77	10,78	10,86	10,96	11,06	11,16	11,26
	Hasil Pembelajaran:								
14	i) Literasi Membaca (SD/Mi)	%	43,12	45,62	48,12	51,22	54,32	57,42	60,52
15	ii) Numerasi (SD/Mi)	%	42,35	45,25	48,15	51,35	54,55	57,75	60,95
16	i) Literasi Membaca (SMP/MTs)	%	56,45	57,55	58,65	60,15	61,65	63,15	64,65
17	ii) Numerasi (SMP/MTs)	%	55,49	55,99	58,49	59,99	61,49	62,99	64,49
18	Persentase satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI.	%	-	20	30	40	50	60	70
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	53,81	53,83	53,85	53,87	53,89	53,91	53,93
	Perlindungan Sosial Adaptif								
20	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	38,20	39,00	39,80	40,60	41,40	42,20	43,00
	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju								
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	84,25	84,35	84,45	84,55	84,65	84,75	84,85
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	50,7	51,27	51,85	52,42	52,99	53,57	54,14
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif								
23	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	50,46	50,6	50,74	50,88	51,02	51,16	51,3
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	43,41	45,90	50,60	53,30	56,00	60,70	65,90
25	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	8,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00
26	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40
27	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,08	96,28	96,48	96,68	96,88	97,08	97,28
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Daya Saing Sumber Daya Manusia								
1	Angka Ketergantungan	%	49,75	49,65	49,55	49,45	49,4	48,14	47,14



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-49

INDIKATOR KINERJA DAERAH									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi								
2	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	7,74	8,14	8,54	8,94	9,34	9,74	10,14
3	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0,57	0,575	0,58	0,585	0,59	0,595	0,6
4	PDRB Ekonomi Kreatif (Miliar)	Rp	-	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32
5	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,006	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,018
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	82,66	84,66	86,66	87,16	87,66	88,16	88,66
7	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	15	15,5	16	17	18	19	20
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,61	41,11	41,61	46,46	51,31	56,15	61,00
9	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)	%	5,70	5,75	5,80	5,85	5,90	5,95	6,00
10	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	%	4,23	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25
	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru								
	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:								
11	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	67,04	67,72	68,41	69,09	69,78	70,46	71,15
12	b) Persentase Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	29,33	30,53	31,72	32,92	34,11	35,31	36,51
13	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	%	1,75	2,69	2,71	2,76	2,81	2,86	2,91
14	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Petani	Nilai	95,70	96,02	96,87	99,53	102,18	104,84	107,50
15	Nilai Tukar Peternak/Nilai Tukar Usaha Peternak	Nilai	97,50	100,00	101,25	103,75	105,00	106,25	107,50
16	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	79,40	80,50	84,05	88,25	92,66	97,30	102,16
	Transformasi Informasi Digital								
17	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,11	2,40	2,65	2,90	3,15	3,40	3,65
18	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,30	5,38	5,47	5,55	5,63	5,72	5,80
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global								
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	2.358,06	2.428,06	2.498,06	2.568,06	2.638,06	2.708,06	2.778,06
20	Net Ekspor Barang dan Jasa	Miliar	-2020,19	-1960,19	-1900,19	-1840,19	-1780,19	-1720,19	-1660,19
21	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	4,65	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Kota dan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi								
22	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	62,75	63,33	64,09	64,54	64,99	65,45	65,9
23	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6183	0,6207	0,6232	0,6382	0,6532	0,6682	0,6832
24	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks	0,51	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55
	Stabilitas Ekonomi Makro								
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,00191	0,00467	0,00613	0,00633	0,00655	0,00678	0,00702
26	Laju Inflasi	%	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59
27	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	%	37,37	39,13	40,88	42,64	44,39	46,15	47,9
28	Total Kredit/PDRB (%)	%	30,52	30,72	30,92	31,12	31,32	31,52	31,72



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029

IV-50

INDIKATOR KINERJA DAERAH									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
29	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,68	3,73	3,75	3,77	3,79	3,82	3,83
30	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu	47.413	47.713,33	48.013,33	48.313,33	48.613,33	48.913,33	49.213,33
ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif								
1	Indeks Pembangunan Hukum*	Indeks	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,43	2,49	2,54	2,66	2,77	2,89	3
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	91,82	92,07	92,32	92,57	92,82	93,07	93,32
4	Indeks Integritas Daerah	Indeks	62,71	64,5	65,25	67,5	68,25	70,3	70,60
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,16	61,41	62,66	63,91	65,16	66,41	67,66
6	Maturitas SPIP	Nilai	2,40	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,00
7	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	%	-	-	1,49	3,51	4,48	7,46	10,45
8	SAKIP	Nilai	60,31	60,78	61,25	62,19	63,12	64,06	65
	Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial								
9	Persentase Penegakan Perda	%	25,00	30,00	32,00	42,00	52,00	62,00	72,00
10	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	%	74,79	-	-	-	-	78,00	-
11	Indeks Rasa Aman	Indeks	56,00	60,08	64,17	68,25	72,33	76,42	80,50
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	20,00	22,00	32,00	42,00	52,00	62,00	72,00
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan								
13	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,35	3,42	3,49	3,55	3,62	3,68	3,77
14	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	%	3,760	3,764	3,769	3,775	3,782	3,789	3,803
15	Jumlah Kerjasama Antar Daerah (Komulatif)	Kerjasama	1	1	1	2	2	2	3
16	Persentase Fasilitasi Pemasangan Pilar Batas Desa	%	20	25	30	35	40	45	50

Sumber: Olahan Tim Penyusun RPJMD Kab.TTU 2025-2029



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-51

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Kunci

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Indeks Pendidikan	Indeks	10,77	10,78	10,86	10,96	11,06	11,16	11,26
2	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Tahun	13,36	13,37	13,38	13,39	13,4	13,41	13,42
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,17	8,18	8,34	8,53	8,72	8,91	9,1
4	Hasil Pembelajaran:								
	i) Literasi Membaca (SD/Mi)	%	43,12	45,62	48,12	51,22	54,32	57,42	60,52
	ii) Numerasi (SD/Mi)	%	42,35	45,25	48,15	51,35	54,55	57,75	60,95
	i) Literasi Membaca (SMP/MTs)	%	56,45	57,55	58,65	60,15	61,65	63,15	64,65
	ii) Numerasi (SMP/MTs)	%	55,49	55,99	58,49	59,99	61,49	62,99	64,49
5	Persentase satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI.	%	-	20	30	40	50	60	70
6	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Ruang Kelas)	%	39,35	39,38	39,42	39,45	39,48	39,51	39,54
7	Persentase Fasilitas Pendidikan dalam kondisi Baik (Kawasan Perbatasan)	%	22,6	39,38	39,42	39,45	39,48	39,51	39,54
8	Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	97,51	97,93	98,34	98,76	99,17	99,59	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Indeks keluarga Sehat	Indeks	0,096	0,096	0,096	0,097	0,097	0,098	0,098
2	Kesehatan Ibu dan Anak								
	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	188,75	112,21	100	90	80	70	60
	Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka	8,8	7,8	6,19	5,47	4,97	4,47	3,97
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	47,30	44,00	41,20	38,50	36,00	33,70	31,50
	Prevalensi Wasting	%	12,30	11,80	11,50	11,20	10,90	10,60	10,30
3	Cakupan penemuan dan pengobatan Kasus HIV/AIDS (%)	%	92,06	93,06	94,06	94,31	94,56	94,81	95,06
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	54,00	57,50	61,00	64,50	68,00	71,50	75,00
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	89,9	>95	>95	>95	>95	100	100
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	100	100	100	100	100	100	100



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-52

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
7	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit)	%	74,4	74,4	75,52	76,64	77,76	78,88	80,00
8	Persentase Fasilitas Kesehatan dalam kondisi Baik (Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit) (Kawasan Perbatasan dan Pantai Utara)	%	74,4	74,4	75,52	76,64	77,76	78,88	80,00
9	Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	80,54	93,91	94,5	95,13	95,75	96,38	100
10	Maturitas BLUD	Skor	74,06	75,22	76,37	77,53	78,69	79,84	81,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	74,08	76,14	77,84	78,3	78,75	79,21	79,66
2	Rasio elektrifikasi	%	96,91	96,93	96,95	96,97	96,99	97,01	97,03
3	Akses Rumah Tangga terhadap air minum layak (%)	%	92,51	92,71	93,01	93,3	93,59	93,88	94,17
4	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih	%	21,31	21,69	22,82	23,19	23,57	23,94	24,32
5	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	80,84	81,12	81,4	81,7	82	82,3	82,6
6	Jalan dalam Kota Kondisi baik (Kewenangan Kabupaten)	%	38,72	39,41	40,22	40,91	41,61	42,30	43,00
7	Capaian Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Kawasan Perbatasan	%	74,08	76,14	77,84	78,3	78,75	79,21	79,66
8	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	46,2	46,95	47,7	49,2	50,7	52,2	53,7
10	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	83,85	84,2	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3
11	Rasio Jaringan Irigasi	%	1,088	1,095	1,108	1,122	1,136	1,15	1,163
12	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	0,644	0,645	0,646	0,647	0,648	0,649	0,65
13	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	63,19	63,39	63,59	63,79	63,99	64,19	64,39
2	Persentase Rumah Layak Huni pada Kawasan Perbatasan	%	63,19	63,39	63,59	63,79	63,99	64,19	64,39
3	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,14	0,145	0,15	0,155	0,16	0,165	0,17
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0	10	15	20	25	30	35
5	Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Ruang Terbuka Publik dalam kota terbangun	Jumlah		1	1	1	1	1	1



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-53

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	130,92	127	125	110	100	95	90
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,35	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48
3	Persentase Desa atau Kelurahan yang terdampak Bencana	%	86,53	82,88	79,22	71,92	64,61	57,31	50
	Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana)	%	82,18	93,91	94,5	95,13	95,75	96,38	100
4	Indeks Rasa Aman	Indeks	56,00	60,08	64,17	68,25	72,33	76,42	80,50
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	20,00	22,00	32,00	42,00	52,00	62,00	72,00
6	Persentase Penegakan Perda	%	25,00	30,00	32,00	42,00	52,00	62,00	72,00
7	Angka Kriminalitas	Angka	17,00	16,00	15,00	11,50	8,00	4,50	1,00
8	Angka Kriminalitas dalam Kota	Angka	17,00	16,00	15,00	11,50	8,00	4,50	1,00
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	-	50	60	68,75	77,5	86,25	95
10	Proporsi Penduduk yang merasa Aman yang berjalan di Kawasan Kota Kefamenanu	%	-	50	60	68,75	77,5	86,25	95
11	Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja)	%	82,18	93,91	94,5	95,13	95,75	96,38	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	40	40,25	40,5	40,75	41	41,25	41,5
2	Persentase Masyarakat Miskin dan Masyarakat berkebutuhan Khusus Lainnya yang mendapatkan Layanan Sosial	%	-	65	70	75	80	85	90
3	Capaian SPM Bidang Sosial	%	99,73	100	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase Penduduk yang bekerja	%	98,02	98,12	98,15	98,17	98,19	98,2	98,21
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,82	1,8	1,79	1,78	1,77	1,76	1,75
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	38,2	39,00	39,80	40,60	41,40	42,20	43,00
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	82,66	84,66	86,66	87,16	87,66	88,16	88,66
5	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	%	18,27	18,40	18,52	18,76	19,01	19,25	19,5



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-54

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	13,93	15,18	16,43	17,68	18,93	20,18	21,43
7	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	15	15,5	16	17	18	19	20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	50,46	50,6	50,74	50,88	51,02	51,16	51,3
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,08	96,28	96,48	96,68	96,88	97,08	97,28
3	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,4
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	78,52	80,52	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
5	Kabupaten Layak Anak	Indeks	-	-	0,26	0,265	0,27	0,275	0,28
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73,61	73,81	74,45	75,6	77,54	78,11	80
2	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	80,1	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6	80,7
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	17,84	17,17	16,5	16,25	16	15,75	15,5
4	Ketersediaan Protein Perkapita	%	54,2	54,7	55,2	55,7	56,2	56,7	57,2
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%			20	40	60	80	100
2	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan milik Pemerintah	%	-	-	12,5	25	37,5	50	62,5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,32	77,82	77,99	78,17	78,34	78,51	79,68
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	43,76	42,42	44,82	46,02	47,22	48,42	49,62
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	29,78	30,98	32,18	33,38	34,58	35,78	36,98
4	Persentase Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca	%	-	-	60	55	50	45	40
5	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks			60	60,05	60,1	60,15	60,2
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	88,60	88,60	88,60	88,66	88,72	88,78	88,84
6	Indeks Kualitas Air	%	71,70	71,9	72,10	72,30	72,50	72,70	72,90
7	Indeks Kualitas Udara	%	94,51	94,53	94,55	94,57	94,59	94,61	94,63
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	1,05	1,10	1,60	2,10	2,60	3,10	3,60



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-55

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	85,24	85,29	85,34	85,39	85,44	85,49	85,54
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	61,65	62,15	63,15	64,15	65,15	66,15	67,15
4	Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan (KTP)	%	98,16	98,21	98,26	98,31	98,36	98,41	98,46
5	Persentase Keluarga yang memiliki Akta Nikah	%	58,3	64,60	69,60	74,61	79,62	84,63	89,94
6	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	96,96	97,46	97,97	98,48	98,99	99,49	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6183	0,6207	0,6232	0,6382	0,6532	0,6682	0,6832
2	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	45	50	60	68	77	86	100
3	Jumlah Desa Maju	Desa	4	4	4	5	5	6	6
4	Persentase Fasilitas Pemasangan Pilar Batas Desa	%	20	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00
5	Persentase BumDes Aktif	BumDes	27,47	43,95	54,94	66,21	77,47	88,74	100
6	Persentase Keaktifan PKK	%	50	55	65	76	82	93	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	43,41	45,9	50,6	53,3	56	60,7	65,9
2	Angka Ketergantungan	%	49,75	49,65	49,55	49,45	49,4	48,14	47,14
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,57	1,55	1,53	1,5	1,47	1,45	1,43
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Laju Pertumbuhan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB	%	4,23	4,5	4,65	4,8	4,95	5,1	5,25
2	Rasio Konektivitas	%	50,00	51,50	53,00	54,50	56,00	57,50	59,00
3	Lampu Penerangan Jalan terpasang (Target 90 Lampu terpasang)	%	-	50	100	100	100	100	100
4	Rambu-Rambu Lalu Lintas yang terpasang (Target 50 Rambu Setiap Tahun)	%		50	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,43	2,49	2,54	2,66	2,77	2,89	3
2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,3	5,38	5,47	5,55	5,63	5,72	5,8



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-56

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
3	Persentase Aduan Masyarakat melalui Call Center yang tangani	%		100	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,006	0,008	0,01	0,012	0,014	0,016	0,018
2	Persentase UMKM Aktif	%		50	50,2	50,4	50,6	50,8	51,00
2	Persentase Koperasi Aktif	%	40,62	48,44	59,38	68,75	79,69	90,63	100,00
3	Persentase UMKM dalam Kota Terbina	%	-	7,5	15,00	22,50	30,00	37,50	45,00
4	UMKM pada Kawasan Perbatasan Terbina	UMKM		5	5	5	5	5	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Miliar	2.358,06	2.428,06	2.498,06	2.568,06	2.638,06	2.708,06	2.778,06
2	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	4,65	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar	125,47	138,02	151,82	167	183,7	202,07	222,28
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	8,5	10	12,5	15	17,5	20
2	Wirausaha Muda Terbina	Wirausaha Muda	25	25	25	25	25	25	25
3	Jumlah Prestasi Olahraga (Cabang Olahraga)	Jumlah	10	20	14	15	15	17	17
4	Persentase Pemuda yang Dibina	%	11,38	65,71	65,71	65,71	67,02	68,36	69,73
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,11	2,4	2,65	2,9	3,15	3,4	3,65
2	Persentase Data Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang dipublish (Mengacu Data IKU dan IKD)	%	50	75	100	100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Keamanan)	Indeks	2,43	2,49	2,54	2,66	2,77	2,89	3
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	50,7	51,27	51,85	52,42	52,99	53,57	54,14
2	Jumlah Kegiatan Prosesi Adat Rutin yang dilakukan	Kegiatan	17	18	20	21	22	23	24
3	Jumlah Warisan Budaya Atoin Meto yang dilestarikan	Jumlah	175	179	183	187	191	195	199
4	Persentase Satuan Pendidikan, Unit Kerja Pemerintahan serta BUMN/BUMD/BUMDes yang menerapkan Nilai Budaya Atoin Meto	%	66,67	69,5	72,33	78	83,67	89,33	95



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-57

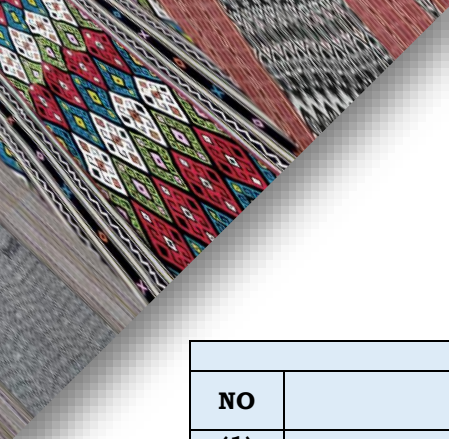
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
5	Kamus Bahasa Daerah	Kamus				1	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	53,81	53,83	53,85	53,87	53,89	53,91	53,93
2	Perpustakaan Digital	Perpustakaan	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	75,94	76,44	76,94	77,44	77,94	78,44	78,94
2	Persentase Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	%	55,81	56,94	57,94	58,94	59,94	60,94	61,94
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	79,4	80,50	84,05	88,25	92,66	97,30	102,16
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	Nilai	79,4	80,5	84,05	88,25	92,66	97,3	102,16
3	Pertumbuhan Produksi Nelayan	%	-7,64	1	1	1	1	1	1
4	Pertumbuhan Produksi Pembudidaya Perikanan	%	4	4	4	4	4	4	4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Miliar)	Miliar	29,43	30,93	32,43	33,93	35,43	36,93	38,43
2	PDRB Ekonomi Kreatif (Miliar)	Rp	-	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,32
3	Jumlah Event/Festival dalam Kota yang terselenggarakan (Minimal 12 Event atau Festival)	Event	-	12	12	12	12	12	12
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	18.671	32.226	45.781	59.336	72.890	86.445	100.000
7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp		50.000.000	70.000.000	90.000.000	110.000.000	130.000.000	150.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Usaha Petani	Nilai	95,7	96,02	96,87	99,53	102,18	104,84	107,5
2	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	%		50	50,5	51	51,5	52	52,5
3	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi pada Kawasan Perbatasan	%	5,02	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
4	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung pada Kawasan Perbatasan	%	4,41	5	5	5	5	5	5



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-58

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
5	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Padi	%	5,02	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9
6	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Pangan Jagung	%	4,41	5	5	5	5	5	5
7	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Perkebunan (3 Komoditi Prioritas)	%		5	5	5	5	5	5
8	Nilai Tukar Peternak/Nilai Tukar Usaha Peternak	Nilai	97,5	100	101,25	103,75	105	106,25	107,5
9	Luasan Hijauan Pakan Ternak	Ha	1.465	1.612	1.773	1.950	2.145	2.359	2.595
10	Populasi ternak Sapi	Jumlah	172.064	175.849	179.718	183.672	187.713	191.842	196.063
11	Populasi ternak Babi	Jumlah	110.714	113.150	115.639	118.183	120.783	123.440	126.156
12	Populasi ternak Kambing	Jumlah	68.253	69.755	71.289	72.858	74.460	76.099	77.773
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Net Ekspor Barang dan Jasa	Miliar	-2020,19	-1960,19	-1900,19	-1840,19	-1780,19	-1720,19	-1660,19
2	Persentase Kecamatan di Kawasan Perbatasan yang memiliki pasar Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Miliar	321,12	327,54	334,09	340,78	347,59	354,54	361,63
4	Persentase pasar yang ditingkatkan	%	-	-	4,17	12,5	20,83	29,17	37,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (Miliar)	Miliar	63,57	69,57	75,57	81,57	87,57	93,57	93,97
2	Proporsi IKM Non Pangan pada Level Kabupaten	%	35,85	36,05	37,87	38,97	40,07	41,17	42,27
3	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	IKM	742	755	767	792	817	842	867
4	IKM dalam Kota Terbina (Kumulatif)	IKM	-	5	10	15	20	25	30
5	IKM pada Kawasan Perbatasan Terbina (Kumulatif)	IKM	-	5	10	15	20	25	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
1	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	%	50	55	60	65	70	75	80
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
SEKRETARIAT DAERAH									
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	3	3	3	3
2	Bantuan Sosial Tersalurkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	3,6	4,67	5,74	6,8	7,87	8,93	10
4	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,68	3,73	3,75	3,77	3,79	3,82	3,83
5	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	%	37,37	39,13	40,88	42,64	44,39	46,15	47,9
6	Total Kredit/PDRB (%)	%	30,52	30,72	30,92	31,12	31,32	31,52	31,72
7	Tingkat Inflasi	%	1,53	1,54	1,55	1,56	1,57	1,58	1,59
9	Indeks Pembangunan Hukum	Indeks	0,6	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66
10	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	94,1	94,6	95,1	95,6	96,1	96,6



IV-59

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
11	Pembentukan dan Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	Desa	9	12	16	19	23	26	30
12	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemda Kab.TTU	Kerjasama	13	15	15	15	15	15	15
13	Capaian SPM Kab.TTU	%	93,33	93,91	97,00	100	100	100	100
14	Indeks LPPD	Indeks	2,6	2,67	2,74	2,81	2,88	2,95	3,02
15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	91,82	92,07	92,32	92,57	92,82	93,07	93,32
16	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,16	61,41	62,66	63,91	65,16	66,41	67,66
17	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	60,31	60,78	61,25	62,19	63,12	64,06	65
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	Indeks	83,48	84,57	84,62	84,67	84,72	84,77	84,82
19	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	%	-	-	1,49	3,51	4,48	7,46	10,45
	SEKRETARIAT DPRD								
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja DPRD	%		64,57	65,07	65,57	66,07	66,57	67,07
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PERENCANAAN								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks			60,00	62,50	65,00	67,50	70,00
	KEUANGAN								
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	68,17	69,38	70,6	71,81	73,02	74,24	75,45
2	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Pertumbuhan PAD	%	-5,05	2	2,56	3,19	5,84	5,85	5,87
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,00191	0,00467	0,00613	0,00633	0,00655	0,00678	0,00702
5	Persentase Realisasi PAD terhadap target PAD	%	77,75	78,25	78,75	79,25	79,75	80,25	80,75
6	Persentase PAD terhadap APBD	%	4,29	5,49	5,64	- 5,79	5,94	6,09	6,24
	KEPEGAWAIAN								
1	Indeks Merit Sistem	Indeks	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi dengan Minimal Kompetensi Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	40,61	41,11	41,61	46,46	51,31	56,15	61,00
2	Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian/Kajian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100
	PENGLOLAAN PERBATASAN								
1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks	0,51	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

IV-60

INDIKATOR KINERJA KUNCI									
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Indeks Integritas Daerah	Indeks	62,71	64,50	65,25	67,50	68,25	70,30	70,60
2	Maturitas SPIP	Nilai	2,40	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,00
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
1	Persentase Desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	45	50	60	68	77	86	100
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%		100	100	100	100	100	100
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	84,25	84,35	84,45	84,55	84,65	84,75	84,85
2	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	66,67	66,74	66,8	66,87	66,94	67,00	67,07
3	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi	%	74,79	-	-	-	-	78,00	
4	Jumlah Event Keagamaan terselenggara	Event	16	17	18	19	20	21	22

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025



**Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029**

V-1

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2025-2029. Dokumen ini menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Periode 2025–2030, yang dalam penyusunannya mempedomani pada RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023-2043 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Selain itu dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Dokumen ini sinkron dan terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 – 2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 – 2029 yang telah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, politis, *bottom-up top-down*, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan di Daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan/Penganggaran lainnya wajib mempedomani RPJMD ini.

Untuk mencapai target, tujuan dan sasaran dan memastikan arah pembangunan jangka menengah daerah, perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 – 2029 secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kefamenanu, 22 Agustus 2025

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO